

JURNAL

PEMERINTAHAN DAN POLITIK

- “Green Aisyiyah” : Praksis Ekofeminis Gerakan Aisyiyah dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia
Penulis : Amaliatulwalidain Ramli, Novia Kencana, Melinda Melinda
- Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital
Penulis : Isabella Isabella, Atrika Iriyani, Delfiazi Puji Lestari
- Collaborative Governance dalam Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (Index of Happiness) di Kota Bandung
Penulis : Winda Agustina, Widuri Wulandari
- The Political Parties Coalition Behaviour in Election: A Meta-Analysis
Penulis : Dimas Subekti, Makmun Wahid
- Implementasi Kebijakan City Branding Madiun Kota Pendekar dan Dampaknya bagi Kota Madiun
Penulis : Sunarso Sunarso, Abdul Halim, Mai Puspadya Bilyastuti, Ester Kristanti Setyaningtyas
- Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022
Penulis : Ferdy Yanuar, Dede Sri Kartini, Idil Akbar
- Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
Penulis : Idham Noviar, Evi Priyanti
- Sistem Penyimpanan Arsip Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Plelen
Penulis : Aria Mulyapradana, Aghus Jamaludin Kharis, Farikul Muafiq, Intan Indi Paramita, Madina Cahya Lestari
- Analisis SWOT dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan UMKM
Penulis : Fadlurrahman Fadlurrahman, Eny Boedi Orbawati, Rani Pajrin, Ari Mukti, Budi Raharjo
- Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia
Penulis : Muslimin Ritonga, Raegen Harahap

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

**Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754**

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 8 Nomor 3 Agustus 2023

Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang telah terakreditasi Sinta 4 dan terafiliasi dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit (4) empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dengan jumlah 10 artikel setiap edisi.

PELINDUNG

H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D

PENANGGUNG JAWAB

Aji Windu Viatra, S.Sn.,M.Sn
(Universitas IGM)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Shinta Puspasari, S.Kom., M.Kom.
(Universitas IGM)

REVIEWER TEAM

Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Phil. Ridho Al Hamdi, M.A. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Tunjung Sulaksono, M.Si (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Nengyanti (Universitas Sriwijaya) 5. Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, M.I.P. (Universitas Sains Al Qur'an)
Ady Muzwardi, M.I.P. (Universitas Maritim Raja Ali Haji) (Universitas Siliwangi)
Riska Sarofah, M.I.P 8. Ilham Zitri, M.I.P. (Universitas Muhammadiyah Mataram)
Dr. Aos Kuswandi (Universitas Islam 45 Bekasi)
Queenie Pearl Tomaro (Mindanao State University - Iligan Institute of Technology)
Dwi Mirani, M.Si (Universitas Sriwijaya)

EDITORIAL BOARD

Amaliatulwalidain, M.A. (Universitas IGM)
Isabella, M.Si (Universitas IGM)
Novia Kencana, S.IP., M.PA (Universitas IGM)
Doris Febriyanti, S.IP., M.Si (Universitas IGM)
Herman Lawelai, M.I.P. (Univ. Muhammadiyah Buton)
Afrijal, M.I.P. (Universitas Syiah Kuala)
Junior Hendri Wijaya, M.I.P. (STPMD "APMD"Yogyakarta)
Hapsa, S.IP., M.I.P. (Universitas Jambi)
Dr. Atrika Iriani, M.Si (STISIPOI Candradimuka Palembang)

EDITOR IN CHIEF

Muhammad Qur'anul Kariem,S.IP.,M.I.P
(Universitas IGM)

TIM REDAKSI

Melinda
M. Alief Akhbar P.A.G., S.I.P

PENERBIT

LP2MK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
ALAMAT REDAKSI

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 8 Nomor 3 Agustus 2023

DAFTAR ISI

“Green Aisyiyah” : Praksis Ekofeminis Gerakan Aisyiyah dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia	Hal 158 - 166
Amaliatulwalidain Ramli, Novia Kencana, Melinda Melinda.....	
Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital	Hal 167 - 172
Isabella Isabella, Atrika Iriyani, Delfiazi Puji Lestari.....	
Collaborative Governance dalam Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (Index of Happiness) di Kota Bandung	Hal 173-182
Winda Agustina, Widuri Wulandari.....	
The Political Parties Coalition Behaviour in Election: A Meta-Analysis	Hal 183-192
Dimas Subekti, Makmun Wahid.....	
Implementasi Kebijakan City Branding Madiun Kota Pendekar dan Dampaknya bagi Kota Madiun	Hal 193-201
Sunarso Sunarso, Abdul Halim, Mai Puspadya Bilyastuti, Ester Kristanti Setyaningtyas.....	
Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022	Hal 202-212
Ferdy Yanuar, Dede Sri Kartini, Idil Akbar.....	
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang	Hal 213 - 220
Idham Noviar, Evi Priyanti.....	
Sistem Penyimpanan Arsip Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Plelen	Hal 221-228
Aria Mulyapradana, Aghus Jamaludin Kharis, Farikul Muafiq, Intan Indi Paramita, Madina Cahya Lestari.....	
Analisis SWOT dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan UMKM	Hal 229 - 237
Fadlurrahman Fadlurrahman, Eny Boedi Orbawati, Rani Pajrin, Ari Mukti, Budi Raharjo	
Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia	Hal 238-245
Muslimin Ritonga, Raegen Harahap.....	

Jurnal ini didedahkan untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan yang tertarik pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Bagi Masyarakat Umum yang berminat memiliki jurnal ini dapat menghubungi Redaksi.

“*Green Aisyiyah*” : Praksis Ekofeminis Gerakan Aisyiyah dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia

Amaliatulwalidain¹, Novia Kencana², Melinda³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
Alamat Korespondensi : amaliatulwalidain@uigm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify the Green Aisyiyah Program as a realization of the eco-feminist idea of dealing with climate change in Indonesia. The Green Aisyiyah Program is a program initiated by the Division of the Environmental Agency for Disaster Management (LLHPB), as one of the divisions within the structure of the Aisyiyah Movement. In elaborating this research, using qualitative methods with a phenomenological approach supported by Green Politics theory and ecofeminist theory. The results of the study explained that the Green Aisyiyah program is synonymous with empowering women to commit and contribute to protecting the environment in a sustainable manner in anticipation of climate change, various derivatives of the Green Aisyiyah program such as Green Ramadan, Green Eid al-Fitr, and Green Eid al-Adha were constructed through various activities that are very close to the daily lives and lives of women as agents of change because it cannot be denied that women are an important subject in access to natural resources, food and the environment.

Keywords : *Green Aisyiyah, Ecofeminism, Aisyiyah Movement, Climate Change*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait Program *Green Aisyiyah*, sebagai realisasi dari praksis gagasan Ekofeminis dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Program *Green Aisyiyah* merupakan program yang digagas oleh Divisi Lembaga Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana (LLHPB), sebagai salah satu Divisi dalam struktur Gerakan Aisyiyah. Dalam mengelaborasi penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang didukung oleh teori Green Politik dan teori ekofeminis. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa program *Green Aisyiyah* identik dengan kegiatan pemberdayaan kaum perempuan untuk berkomitmen dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan guna mengantisipasi terjadinya perubahan iklim, berbagai turunan dari program *Green Aisyiyah* seperti *Green Ramadan*, *Green Idul Fitri*, dan *Green Idul Adha* dikonstruksi melalui berbagai kegiatan yang sangat dekat dengan keseharian dan kehidupan kaum perempuan sebagai agen perubahan karena tidak dapat disangkal bahwa perempuan merupakan subjek penting dalam akses terhadap sumber daya alam, pangan dan lingkungan.

Kata Kunci : *Green Aisyiyah, Ekofeminis, Gerakan Aisyiyah, Perubahan Iklim*

A. Pendahuluan

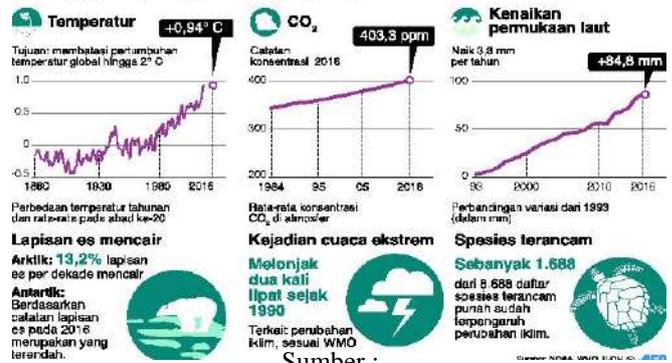
Perubahan Iklim (*Climate Change*), beberapa dasawarsa telah menjadi permasalahan global bagi sebagian besar negara-negara di dunia. Perubahan iklim muncul sebagai isu politik pada tahun 1970-an, di mana upaya aktivis dan formal dilakukan untuk memastikan krisis lingkungan ditangani dalam skala global. Perhatian pada fenomena perubahan iklim sebagai masalah global, secara internasional telah dibahas dalam berbagai pertemuan dan konferensi global guna mencari solusi yang tepat. Pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia, PBB melalui mengadakan konferensi pertama yang menjadikan lingkungan sebagai isu utama. Konferensi ini memuat 26 prinsip, yang menempatkan masalah lingkungan di garda terdepan (www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972). Semenjak tahun 1990 hingga sekarang dalam laporan Oxfam, tercatat hampir 94% bencana alam didunia, khususnya di Negara berkembang dan Negara dunia ketiga terjadi karena permasalahan lingkungan yang mempengaruhi eskalasi parah pada perubahan iklim (Irene Dankelman, 2013). Bahkan sekarang dampak perubahan iklim semakin terasa, bukan tanpa alasan perubahan iklim terjadi begitu saja, alasan konkret, bahwa tanggung jawab akibat perubahan iklim terjadi karena pembangunan dan pertumbuhan pesat negara-negara industri yang sama sekali mengesampingkan prinsip ekologis dalam praktek-praktek koorporasinya (Denton, 2002).

Kemunculan Protokol Kyoto pada tahun 1997, semakin mempertegas komitmen dari negara-negara didunia, khususnya negara-negara industri untuk menyepakati mengurangi efek gas rumah kaca (Stearney, 1994): (Gupta, 2016), karena perubahan iklim sangat begitu terasa, terjadi dengan semakin meningkatnya suhu dari efek rumah kaca, sebab 80 % gas diatmosfer timbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil oleh Negara-negara industri. Dalam observasi resmi yang dirilis oleh IPCC (*The Intergovernmental Panel on Climate Change*) sebuah lembaga lingkungan, pada tahun 2001 lalu, yang berpusat di Amerika, menulis bahwa terjadi perubahan signifikan pada beberapa indikator penting, yang menyebabkan semakin tingginya kasus perubahan iklim dan peristiwa bencana alam didunia, yakni :1).Suhu permukaan rata-rata bumi telah meningkat sekitar 0,6°C selama 20 tahun terakhir, cuaca terasa sangat panas, bahkan terkadang lebih panas dari suhu minimum.2). Tutupan salju di beberapa negara telah mulai mencair.3).Permukaan laut global telah meningkat, dengan kandungan suhu panas lautan yang turut juga meningkat.4).

Terjadinya peningkatan suhu panas ekstrim dan kekeringan di beberapa Negara, terutama wilayah Afrika dan Asia (IPPC, 2001)

Gambar 1 : Tanda-Tanda Perubahan Iklim

Tanda-Tanda Perubahan Iklim



Sumber :

<https://mediaindonesia.com/humaniora/392994/ini-strategi-indonesia-tingkatkan-mitigasi-perubahan-iklim> (diakses hari Minggu 16 Juli 2023)

Fakta tersebut semakin dipertegas kembali, pada rilis laporan terbaru oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dalam *The State of the Climate in Asia Report* pada tahun 2021 lalu, bahwa suhu permukaan laut rata-rata telah mencapai rekor tertinggi dari beberapa tahun terakhir, terutama terjadi di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik, sehingga pemanasan laut di dan sekitar Asia meningkat melampaui rata-rata global, selain itu juga terjadi penyusutan gletser es di Pegunungan Tinggi Asia, termasuk Himalaya dan Dataran Tinggi Tibet, bahkan penyusutan gletser terbesar terjadi di wilayah Kutub seluas 100.000 km² akibat kondisi yang sangat hangat dan kering. Akibat pencairan es di kutub, suhu laut dan udara naik, terjadi peningkatan dalam peristiwa bencana seperti gelombang badai, curah hujan tinggi dan kekeringan dipastikan menyebabkan gangguan besar pada siklus produksi pangan dunia (<https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate/asia>).

Variabilitas dari indikator tersebut tidak hanya mengarahkan pada pandangan akan perubahan iklim yang terjadi secara massif sebagai tantangan global, melainkan juga perubahan iklim sangat berdampak besar terhadap kualitas hidup seluruh masyarakat di dunia. Bencana alam di beberapa negara, akibat perubahan iklim, beresiko tinggi pada peningkatan korban dan korban yang paling banyak terdiri dari kaum perempuan, anak-anak dan kelompok rentan, belum lagi beban

dan situasi yang sulit yang dirasakan oleh kaum perempuan, akan mempengaruhi kualitas dan angka harapan hidup bagi perempuan. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kelangkaan volume air tanah, implikasinya akan terjadi pengurangan hasil biomassa hutan, bahkan peningkatan resiko penyakit bagi anak-anak, perempuan dan orang tua. (Arora-Jonsson, 2011). Menurut Irene Dankelman, perubahan iklim akan sangat membatasi akses bagi hampir Sebagian besar kaum perempuan, di pedesaan dibandingkan dengan kaum perempuan di kota, kaum perempuan di pedesaan memiliki kontribusi penting pada kegiatan pertanian sehingga mereka memiliki intensitas tinggi untuk mengakses sumber daya ekologis lainnya (Irene Dankelman, 2010). Dapat disimpulkan, bahwa kaum perempuan mempunyai ketergantungan lebih besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam dan ekologis, di banyak tempat atau wilayah kaum perempuan juga memikul tanggung jawab untuk mengamankan pangan, air, bahan bakar dibandingkan kaum lelaki

Perhatian terhadap perubahan iklim dan korelasinya dengan kehidupan kaum perempuan, perlahan mulai mewarnai perkembangan akademis dan benar-benar diangkat sebagai isu Feminis dalam lingkungan global, dari tahun 1970 hingga 1990 (Carr & Thompson, 2014), menyemai gagasan tersebut, segala aktivisme lingkungan kemudian dilihat dengan kacamata pendekatan feminis, yang dimaksudkan tidak hanya bergerak pada wacana semata, melainkan mulai dirancangnya pengetahuan dan pedagogi feminis yang bersimpul pada isu lingkungan atau dikenal dengan istilah “Ekofeminis (Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, 1996). Konstruksi dari Ekologi Politik Feminis, bukan saja menganalisis mengenai eksploitasi alam dan pembangunan yang dianggap akan merusak harmonisasi ekologi yang menyebabkan perubahan iklim yang merugikan perempuan (Jamison, 2010), juga melibatkan beberapa faktor diantaranya terkait dengan relasi kuasa, relasi gender dan relasi sosial, karena krisis ekologi bukan timbul dari eksploitasi alam semata, melainkan ada kekuasaan yang dominan sebagai katalisatornya.

Pada perkembangannya, konstruksi ekologi politik feminis selain meneropong kaum perempuan sebagai fokus, konfigurasi ekologi politik Feminis kemudian mulai mengelaborasi dan menyoroti bagaimana ketimpangan yang disebabkan oleh rusaknya ekologi global, juga berpengaruh pada sistem tatanan ekologi di tingkat nasional maupun lokal, sehingga akan memunculkan bentuk

ketidakadilan yang bersifat multidimensi mencakup etnis, kelas, ras, usia bahkan kebangsaan. Berbagai kasus memberi gambaran jelas, bagaimana rusaknya ekologi lokal akibat kerasnya perusahaan ekstraktif dalam mengeksploitasi sumber daya alam telah menghilangkan beberapa ekosistem penting, konflik agraria, hilangnya tanah adat (ulayat), mengusir peran masyarakat adat pada pengelolaan hutan dan lingkungannya seperti yang terjadi di beberapa wilayah, yaitu distrik Chamoli-Himalaya (Shobhita Jain, 2011), di Afrika (Rocheleau & Edmunds, 1997), di Vietnam dan Zimbabwe (Jacobs, 2013), juga di Indonesia (Tickamyer & Kusujarti, 2020).

Kekhawatiran pada kerusakan lingkungan dengan segala dampaknya, terutama perubahan iklim dan berbagai bencana alam, menuai beragam upaya yang dilakukan oleh berbagai gerakan lingkungan didunia, beragam aktivitas, aksi dan rekognisi untuk melindungi lingkungan pada tataran mikro maupun makro dilakukan semakin gencar. Serangkaian aktivitas dengan melibatkan masyarakat melalui edukasi dan berbagai program dilakukan secara kontinyu, seperti contoh beberapa gerakan lingkungan dunia, yakni *Britain Camps for Climate Action* (CCA) (Rootes et al., 2012), *Sierra Club* dan *The National Audubon Society* di Amerika (Brian Tokar, 2004), *German Climate Movement* di Jerman (Brian Tokar, 2004), *The Australian Climate Movement*, *Green Peace*, *Friends of The Earth*, *Forum Brasileiro de Mudancas Climaticas* di Brazil, *China Civil Climate Action Network (CCAN)* di Cina (Patrick Schroeder, 2004) serta WALHI di Indonesia (Pam Nilan & Gregorius Ragil Wibawanto, 2015). Selain itu, secara spesifik, berbagai gerakan lingkungan yang berhaluan ekologi politik feminis turut memiliki andil signifikan dalam proses penyadaran pada krisis lingkungan dan perubahan iklim, seperti gerakan Chipko di India (Rao, 2012), Gerakan Feminis La Via Campesina di Brazil, Green Ekofeminis di Afrika, the Kenyan Green Belt movement di Kenya termasuk juga di Indonesia, hadir Gerakan Ibu Bumi di Kendeng, Gerakan Perempuan Molo di NTT, Gerakan tolak reklamasi di Teluk Benoa Bali serta Gerakan *Green Aisyiyah*. Terlepas dari berbagai macam gerakan ekofeminis yang ada, Maka Secara khusus penelitian ini, hanya akan menganalisis bagaimana praksis dari gerakan *Green Aisyiyah* dan kedekatannya dengan gagasan ekofeminis, karena selama ini identitas Gerakan Aisyiyah sebagai gerakan perempuan muslim terbesar di Indonesia begitu lekat dengan gerakan keagamaan ketimbang gerakan ekofeminis, sehingga

menjadi sesuatu yang menarik untuk dianalisis lebih intens lagi keterkaitan antara nilai ekofeminis dalam tubuh gerakan Aisyiyah di era kontemporer.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam upaya melakukan penelusuran dan analisis pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif-kualitatif, sebagai metode yang sangat erat kaitannya dengan rumpun *Social Studies* dan fenomenologi dalam mengamati perilaku sosial, praktik dan interaksi kelompok, individu dari konteks yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teoritis gerakan lingkungan (*Environmental Theory*) dan Ekologi Feminis (*Ecofeminism Theory*) dengan teknik analisis induktif, perspektif holistik, pengumpulan data primer- sekunder dan netralitas dalam penarikan kesimpulan (Lowndes et al., 2018).

C. Pembahasan

a. Perubahan Iklim di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara di Kawasan Asia, menjadi negara ketiga yang berkontribusi besar pada penghasil emisi dari efek rumah kaca akibat degradasi lingkungan dan kebakaran hutan (Mariah, 2010). Posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara dan garis khatulistiwa sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim yang mana keadaan cuaca di Indonesia berada pada kondisi yang relatif lama dan mencakup wilayah yang luas (Faradiba, 2021). Apabila terjadi kondisi iklim yang ekstrim, misalnya musim hujan maka menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan di musim kemarau (F, 2022). Menurut laporan dari World Bank (2009) Indonesia merupakan negara yang sangat rentan dalam menghadapi perubahan iklim terutama di beberapa wilayah, Bali, Jawa, Sumatera dan Papua (World Bank, 2021).

Gambar 2



Sumber :

<https://bpbdt.go.id/2023/01/03/sebaran-kejadian-bencana-alam-tanggal-1-3-januari-2023/> ((diakses hari Minggu 16 Juli 2023)

Dari data yang dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) telah terjadi 1.102 bencana alam di Indonesia dari rentang periode Januari hingga Juli 2023. Bencana- bencana yang terjadi meliputi 16 gempa bumi, 2 kali erupsi gunung berapi, banjir 699 kejadian, cuaca ekstrem dan tanah longsor 334 kejadian, gelombang pasang 20 kejadian dan kekeringan 17 kejadian (lihat : <https://tinyurl.com/caur9za8>). Selain bencana alam, ancaman yang juga dihadapi adalah masalah ketahanan pangan, akibat curah hujan tinggi dan kekeringan, banyak petani yang mengalami gagal panen dan gagal tanam, sehingga menurunkan produktivitas pertanian (Perdinan et al., 2019). Perubahan iklim juga, berpengaruh jelas pada proyeksi masalah kesehatan, perpindahan penduduk serta infrastruktur (Tickamyer & Kusujarti, 2020)

b. Melacak “Green Politics” Sebagai Akar Gerakan Lingkungan dan Ekofeminis

Gerakan lingkungan dipahami sebagai jaringan atau organisasi yang terlibat dalam aksi kolektif dengan tujuan mengejar kebaikan dan manfaat dari lingkungan, bentuk gerakan lingkungan sangat beragam, mulai dari yang sangat terorganisir-formal, informal bahkan radikal dengan cakupan ruang lingkup dari gerakan tingkat lokal hingga tingkat global (Rootes, 1999). Secara teoritis, melacak sejarah awal kemunculan dari gerakan lingkungan, ditemukan fakta, bahwa gerakan lingkungan permulaannya merupakan gerakan ekologi tradisional, yang berakar dari ajaran moral utilitarian, yang mempercayai manusia sebagai pelestari lingkungan, kepentingan manusia pada lingkungan dan alam bebas harus dilakukan dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian tanpa

boleh melakukan perubahan yang merugikan (Sills, 1975) dengan kata lain, manusia dipersilakan untuk mengambil manfaat dari lingkungan, tapi jangan sampai merusak.

Pada tahun 1960, dengan munculnya berbagai bentuk gerakan lingkungan diberbagai negara, polarisasi gerakan lingkungan kemudian mulai dikaitkan dengan ideologi “*green politics*” atau politik hijau, yang tergolong ideologi baru dan berkembang di Eropa ketika itu, ada 7 prinsip dasar dari ideologi “*Green Politics*” yang dikategorikan oleh Capra dan Sprenek (Lihat, Stavrakakis, 1997), yaitu : 1). Ekologi, 2). Tanggung jawab sosial, 3). Demokrasi di akar rumput, 4). Anti kekerasan, 5). Desentralisasi, 6). Relasi patriarkis, 7). Spiritualitas. *Green politics* sebagai produk baru dari pemikiran politik kontemporer mulai memberikan landasan praksis sebagai alat bantu metodologis guna mengamati berbagai isu-isu tradisional maupun kontemporer terkait lingkungan. Secara khusus ideologi politik hijau digunakan untuk melakukan usaha penyelidikan filosofis yang merangkum tema besar terkait dengan wacana pada krisis ekologi global yang tidak hanya menyebabkan rusaknya lingkungan secara global, melainkan juga turut berpengaruh pada keberlangsungan sistem politik dan keberlangsungan proses demokrasi di akar rumput. Ideologi politik hijau berusaha mendorong budaya baru akan peran dan tanggung jawab besar negara pada kerusakan lingkungan, tidak hanya itu, terdapat kritik gencar pada aktivitas ekonomi kapitalistik yang seringkali mengabaikan norma-norma pada kepemilikan kolektif. Bahkan beberapa negara telah mengadopsi ideologi ini menjadikannya berkerja dalam sistem politik formal dengan mendirikan Partai Hijau (*Green Party*) seperti di Norwegia dan Australia (Aardal, 1990), Jerman dan Inggris.

Pada tahun 1970-an dalam peringatan hari bumi dan lingkungan di Amerika, muncul istilah untuk menyebut bumi dengan istilah “*Motherhood*”. Istilah ini mengacu pada retorika mengenai keberadaan bumi sebagai “ibu”, yang identik dengan merawat dan menjaga kelangsungan hidup manusia, dengan menyediakan air, makanan (pangan), mineral bahkan udara. Retorika ini juga kemudian mengilhami lahirnya istilah Ekofeminis yang dipopulerkan oleh Francoise d'Eubonne pada tahun 1974, karena melihat keterlekatan aktivisme perempuan dengan alam (Mellor, 1992) bisa diibaratkan bahwa alam dan perempuan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Popularitas pendekatan Ekofeminis semakin dikaitkan pada analisis berbagai realitas dan persoalan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada

kehidupan perempuan (Baker, 1993) selain itu, terdapat klaim epistemologis dari kalangan ekofeminis, karena perempuan sangat lekat dengan alam, maka perempuan lebih banyak memiliki pengetahuan tentang alam dibandingkan dengan pria.

c. “*Green Aisyiyah*” : Praksis Ekofeminis Gerakan Aisyiyah dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia

Mengaris bawah, jelas sekali terdapat keterkaitan erat gerakan lingkungan dan pendekatan ekofeminis, bahwa kepedulian kaum perempuan dan ekologi memang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Ekofeminis lahir sebagai respon praktis yang secara khusus memandang bahwa realitas dan degradasi lingkungan akan berdampak besar bagi kehidupan kaum perempuan, Mengulang lagi pendapat Stearney, bahwa apabila apabila terjadi kerusakan pada lingkungan maka yang sangat dirugikan adalah kaum perempuan (Stearney, 1994). Bisa diasumsikan, Ekofeminis sebagai bagian dari gerakan lingkungan menjadi kritik peradaban dan mencoba membangun dan mempromosikan nilai-nilai kesadaran ekologi. Menyadari bahwa lingkungan sangat dekat dengan kehidupan kaum perempuan, maka Gerakan Aisyiyah, sebagai gerakan perempuan Islam Modern terbesar di Indonesia, yang berdiri pada tanggal 19 Mei 1917 (Amaliatulwalidain, 2022) dan masih kokoh berjuang bagi kepentingan kaum perempuan, secara intensif mengambil peran strategis dalam keterlibatannya dengan permasalahan lingkungan. Isu mengenai lingkungan menjadi isu yang kesekian dari berbagai isu menyangkut kehidupan perempuan dan menyita perhatian Gerakan Aisyiyah, sehingga pada pertemuan tahunan atau Mukhtamar ke 47 di Makassar pada tahun 2015 lalu, maka Gerakan Aisyiyah menyematkan satu divisi (sub-organisasi) dalam strukturnya, yakni Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau sering disingkat LLHPB (<http://surl.li/jldhu>).

Esensi nyata dari kehadiran Divisi LLHPB dalam tubuh Gerakan Aisyiyah, merupakan perwujudan nyata dalam upaya melindungi alam dan kehidupan manusia (Amaliatulwalidain, 2019) dari pengaruh kerusakan lingkungan termasuk juga perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam, berikut misi dan visi dari Divisi LLHPB, yaitu :

1. Mendukung dan mengusahakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang telah menjadikan bumi dan langit beserta isinya.

2. Mendukung dan mengusahakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sebagai perwujudan kemuliaan manusia sebagai pemimpin di muka bumi sehingga tercipta budaya melestarikan dan menjaga lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami perubahan lingkungan parah dan,
4. Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Memasyarakatkan Fiqih lingkungan, Fiqih bencana, dan Fiqih air melalui sosialisasi di lingkungan keluarga Muhammadiyah dan Aisyiyah dan amal usahanya, PT, sekolah, dan masyarakat untuk tegaknya tanggung lingkungan dan tanggap bencana.
6. Pembentukan ADEM (*Aisyiyah Disaster Environment Management*).

Beberapa manajemen solusi pemberdayaan kaum perempuan terhadap kelestarian lingkungan kemudian dibentuk dan dirangkum oleh Gerakan Aisyiyah dengan mengagas program “*Green Aisyiyah*”. Gagasan ini semakin diperkuat dengan nilai-nilai ideologis-keagamaan yang menjadi landasan dasar dalam Gerakan Aisyiyah, beberapa kutipan dari berbagai ayat di dalam Al-Qur’an (lihat Q.S. Al-Baqarah: 30, Q.S. Ar-Rum: 41, Q.S. Al-Qashah: 77, Q.S. Ar-Rahman: 7-8 dan Q.S. Al-A’raf: 85), dijadikan acuan penting, dalam menebarkan dan mempromosikan program “*Green Aisyiyah*” yang memang sejalan dengan perintah Agama. Penyematan istilah “*Green Aisyiyah*” sebagai program utama dari Divisi LLHPB tentu menarik, mengingat genre ideologi “*Green*” berasal dari filsafat barat serta identik dengan gerakan lingkungan yang mengakar secara politik di negara-negara Eropa pada tahun 1960-an. Bisa jadi kecenderungan penggunaan ideologi “*Green*” yang digunakan oleh berbagai organisasi atau gerakan pada skala regional hingga global semakin ter-rekonstruksi bersamaan dengan meningkatnya kerusakan lingkungan global.

Uniknya ideologi ini “*Green Aisyiyah*”, kemudian dimaknai ulang atau lebih tepatnya dikonstruksi oleh gerakan Aisyiyah dengan pemahaman makna yang lebih agamis dan bersanding pada unsur lokalitas, dengan berbagai turunannya seperti “*Green Idul Adha*,

“*Green Ramadan*”, dan “*Green Idul Fitri*”, yang menyerukan bagi masyarakat, apabila melaksanakan aktivitas sehari-hari agar lebih ramah lingkungan, terlebih lagi ketika bulan Ramadan dan Idul Fitri. Seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air dan listrik, membawa kantong belanja ramah lingkungan, dan membawa wadah guna ulang, saat menyelenggarakan acara pengajian, berbuka bersama, shalat berjamaah, tadarus, dan aktivitas ibadah lainnya. Program ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, dan dilaksanakan mulai dari rumah bersama keluarga, di sekolah, kantor, dan jamaah masjid.

Gambar 3



Sumber :

<http://llhpbandonesia.or.id/id/berita/seruan-aksi-green-ramadan-dan-green-idulfitri.html> (diakses hari Minggu 16 Juli 2023)

Secara praktis seruan pada program “*Green Aisyiyah*” beserta turunannya secara keseluruhan, terangkum dalam berbagai aktivitas kegiatan berjejaring yang muaranya berasal dari keluarga dan motori oleh perempuan, karena persentuhan langsung aktivitas tersebut secara praktikal teralisasi didalam rumah dan keluarga, yang mana rumah dan keluarga menjadi basis kehidupan yang sangat dekat dengan perempuan, diantaranya :

1. Penggunaan Air : dimaksudkan bahwa, terjadi sinergistias dalam memanfaatkan air wudhu, dengan menghemat air, mengecilkan keran air serta menampung air bekas wudhu untuk dimanfaatkan kembali menyiram tanaman dirumah, masjid dan mushola
2. Puasa minim sampah : meminimalisir sampah plastik ketika sahur dan berbuka, serta memilah sampah atau sisa makanan
3. Menggunakan Deterjen & Sabun Ramah Lingkungan yang tidak mencemari air tanah
4. Ketahanan pangan, dengan mengkonsumsi makanan sehat, sayur

dan buah dari kebun atau halaman sendiri

5. Rumah sehat tanpa plastik
6. Menghemat listrik

Aktivitas program *Green Aisyiyah* secara berjejaring melibatkan kaum perempuan sebagai motor penggerak dalam memberdayakan keluarga untuk menjaga lingkungan sudah tepat dilakukan, karena kaum perempuan secara langsung memiliki akses pada produksi, pola pengasuhan didalam keluarga, sehingga memiliki tanggung jawab dari penggunaan air mensuplay dan memastikan makanan sehat, hingga menghemat energi.

D. Kesimpulan

Gerakan Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam terbesar di Indonesia, telah memberikan terobosan-terobosan besar, terutama terkait perannya dalam berkontribusi untuk mengantisipasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Melalui program “*Green Aisyiyah*” beserta turunan dari kegiatan lainnya menjadi praksis dari pemberdayaan kaum perempuan dan lingkungan yang secara intensif dan massif digagas sesuai dengan landasan dan identitas Gerakan yang sejalan dengan nilai-nilai moral-keagamaan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi subjek dalam keberhasilan program *Green Aisyiyah* yang sejalan dengan pendekatan Ekofeminis, bahwa kaum perempuan memiliki andil besar dalam melakukan rekonstruksi sosial yang tentunya menguntungkan kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Aardal, B. (1990). Green Politics: A Norwegian Experience. *Scandinavian Political Studies*, 13(2), 147–164. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1990.tb00434.x>
- Amaliatulwalidain. (2019). Peran Dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyyatul Aisyiyah Dalam Menginternasikan Kebijakan Berperspektif Gender Di Kotapalembang Tahun 2016. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.646>
- Amaliatulwalidain, N. A. (2022). Green Aisyiyah : Contribution and Role of the Aisyiyah Movement in Anticipating the Impact of Climate Change in Indonesia. *Asia For Earth*, 291. <http://eprints.itn.ac.id/9374/1/2022-seminarinterthespatialconcept.pdf>
- Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change. *Global Environmental Change*, 21(2), 744–751. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005>
- Baker, S. (1993). The Principles and Practice of Ecofeminism: A Review. *Journal of Gender Studies*, 2(1), 4–26. <https://doi.org/10.1080/09589236.1993.960526>
- Brian Tokar. (2004). Movements for climate justice in the US and worldwide Brian Tokar. In *ROUTLEDGE HANDBOOK OF THE CLIMATE CHANGE MOVEMENT* (Issue 1, pp. 1–14). Routledge.
- Denton, F. (2002). Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: why does gender matter? In R. Masika (Ed.), *Gender, Development, and Climate Change* (p. 10). Oxfam.
- Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, E. W. (1996). GENDER AND ENVIRONMENT A feminist political ecology perspective. In D. Rocheleau & and E. W. Barbara Thomas-Slayter (Eds.), *Feminist political ecology. Global issues and local experiences* (p. 3). Routledge. <https://doi.org/10.2307/3060380>
- F, F. (2022). The Impact of Climate on Flood Disasters in Indonesia Faradiba. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 31(1), 364. <http://repository.uki.ac.id/8116/5/TheImpactofClimateonFloodDisastersinIndonesia.pdf>
- Faradiba, F. (2021). Determination of Climate Factors in Flood and Drought Disaster in Indonesia using Instrumental Variable (IV) Methods. *Jurnal Ilmu Fisika / Universitas Andalas*, 13(1), 54–61. <https://doi.org/10.25077/jif.13.1.54-61.2021>
- Gupta, A. (2016). Climate Change and Kyoto Protocol: An Overview. In Vikash Ramiah & Greg N. Gregoriou (Ed.), *Handbook of Environmental and*

- Sustainable Finance* (Issue December 2016, p. 9). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803615-0.00021-2>
- Irene Dankelman. (2013). Climate change: Learning from Gender Analysis and Women's Experiences Of Organising For Sustainable Development. In *Gender, Development, and Climate Change* (Issue 2008, p. 21).
- Jacobs, S. (2013). Agrarian reforms. *Current Sociology*, 61(5–6), 862–885. <https://doi.org/10.1177/0011392113486660>
- Lowndes, V., Marsh, D., Stoker, G., Editors, S., Peters, B. G., Pierre, J., & Stoker, G. (2018). Theory and Methods in Political Science. *Theory and Methods in Political Science*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-60353-1>
- Mariah, M. (2010). Indonesia: A Vulnerable Country in the Face of Climate Change. *Global Majority E-Journal*, 1(1), 46–56.
- Mellor, M. (1992). Green Politics: Ecofeminist, Ecofeminine or Ecomasculine? *Environmental Politics*, 1(2), 229–251. <https://doi.org/10.1080/09644019208414022>
- Pam Nilan & Gregorius Ragil Wibawanto. (2015). “Becoming” an environmentalist in Indonesia. *Geoforum*, 62, 63. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/45613274/Nilan__Wibawanto_Geoforum_article-libre.pdf?1463204087=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBecoming_an_environmentalist_in_Indonesias.pdf&Expires=1689409006&Signature=bCsZzTDZwaRIxOjs5nTz7kr-wJuA
- Patrick Schroeder. (2004). China's emerging climate change movement - finding a place to stand. In Matthias Dietz & Heiko Garrelts (Ed.), *ROUTLEDGE HANDBOOK OF THE CLIMATE CHANGE MOVEMENT* (p. 194). Routledge.
- Perdinan, P., Atmaja, T., Adi, R. F., & Estiningtyas, W. (2019). Adaptasi Perubahan Iklim Dan Ketahanan Pangan: Telaah Inisiatif Dan Kebijakan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 60–87. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.75>
- Rao, M. (2012). Ecofeminism at the Crossroads in India: A Review. *Dep*, 20(12), 124–142.
- Rocheleau, D., & Edmunds, D. (1997). Women, Men and Trees: Gender, Power and Property in Forest and Agrarian Landscapes. *World Development*, 25(8), 1351–1371. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00036-3](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00036-3)
- Rootes, C. (1999). Environmental movements: From the local to the global. *Environmental Politics*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/09644019908414435>
- Rootes, C., Zito, A., & Barry, J. (2012). Climate change, national politics and grassroots action: An introduction. *Environmental Politics*, 21(5), 677–690. <https://doi.org/10.1080/09644016.2012.720098>
- Shobhita Jain. (2011). Ecological Movement A Case Study of Women 's Role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh. *Economic And Political Weekly*, 19(41), 1788–1794.
- Sills, D. L. (1975). The environmental movement and its critics. *Human Ecology*, 3(1), 1–41. <https://doi.org/10.1007/BF01531771>
- Stavrakakis, Y. (1997). Green ideology: a discursive reading. *Journal of Political Ideologies*, 2(3), 259–279. <https://doi.org/10.1080/13569319708420763>
- Stearney, L. M. (1994). Feminism, Ecofeminism, and the Maternal Archetype: Motherhood as a Feminine Universal. *Communication Quarterly*, 42(2), 145–159. <https://doi.org/10.1080/01463379409369923>
- Tickamyer, A. R., & Kusujiarti, S. (2020). Risksapes of gender, disaster and climate change in Indonesia. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 13(2), 233–251. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsaa006>

World Bank. (2021). *Climate Risk Profile: Indonesia (2021)*. Asian Development Bank. www.worldbank.org

Website :

<http://llhpb.aisyiyah.or.id/id/berita/seruan-aksi-green-ramadan-dan-green-idulfitri.html> (diakses hari Senin 17 Juli 2023)

<https://bpbd.t.go.id/2023/01/03/sebaran-kejadian-bencana-alam-tanggal-1-3-januari-2023/> (diakses hari Minggu 16 Juli 2023)

<https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate/asia>. (diakses hari Minggu 16 Juli 2023)

<https://mediaindonesia.com/humaniora/392994/ini-strategi-indonesia-tingkatkan-mitigasi-perubahan-iklim> (diakses hari Minggu 16 Juli 2023)

www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972 (diakses hari Minggu 16 Juli 2023)

Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital

Isabella¹⁾, Atrika Iriyani²⁾, Delfiazi Puji Lestari³⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

²⁾Program Studi Magister Administrasi Publik, STISPOL Candradimuka

³⁾Program Studi Administrasi Negara, STIAP ADS Palembang

Email Koresponden : isabella@uigm.ac.id

ABSTRACT

In an effort to shape the culture of a digital society in Palembang, this study examines digital literacy. The purpose of this study is: Analyze the supporting and impeding factors for this program. Identify the implementation of digital literacy programs as an endeavor to develop the character of the digital society in the city of Palembang. In this study, a qualitative descriptive methodology was utilized to describe and assess how the Digital Literacy program was implemented in an effort to shape the characteristics of a digital society in Palembang. The analytical methods employed involve qualitative data analysis methods using FGD, interviews, and documentation. Additionally, the NVivo 12 Plus and SmartPLS analysis complement this research data. The theory applied is Merilee S. Grindle's theory of policy implementation. Digital Skills, Digital Culture, Digital Ethics, and Digital Safety are some of the supporting indicators in the Kominfo RI framework for digital literacy. The study's findings show that promoting digital literacy is a movement that cannot be carried out by one institution alone; instead, the government, society, and stakeholders all need to get involved if we want to avoid falling behind. People who are learning to use digital operating systems in daily life are concerned with developing their digital skills. The government is known to be interested in creating news in the media or online, therefore it requires journalists who are impartial and can speak the truth without instilling fear. Still other discoveries.

Keywords : Digital Literacy, Character of Society

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini: Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi program literasi digital sebagai upaya membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang; Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat program ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif, yang menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan program Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif melalui observasi, wawancara, FGD, dokumentasi. Data penelitian ini didukung juga dengan menggunakan analisis SmartPLS dan menggunakan Aplikasi NVivo12 Plus. Teori yang digunakan pada adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Adapun indikator pendukung dalam kerangka kerja literasi digital yang digunakan oleh Kominfo RI terdiri dari Digital Skills, Digital Culture, Digital Ethics, dan Digital Safety. Temuan pada penelitian ini diantaranya Literasi Digital merupakan gerakan yang tidak bisa dikerjakan oleh satu Institusi, semua orang harus terlibat agar tidak tertinggal meliputi Pemerintah/Kominfo RI, Masyarakat, dan Stakeholder. Dalam Digital Skill berkaitan dengan individu dalam mengetahui memahami sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui bahwa Pemerintah cenderung memiliki kepentingan dalam membuat berita di media atau dunia digital sehingga diperlukan jurnalis yang tidak memihak dan dapat menyampaikan kebenaran tanpa diiringi rasa takut. Temuan lainnya masih perlunya upaya pemerintah dalam memenuhi infrastruktur yang berkaitan dengan program literasi digital seperti pemerataan jangkauan jaringan internet serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli kuota internet agar literasi digital dapat terlaksana.

Kata Kunci : Literasi Digital, Karakter Masyarakat

1. Pendahuluan

Saat ini, sebagian besar orang menggunakan internet untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, dan menonton video secara online. Hal ini adalah cara paling cepat, murah, dan mudah untuk menyampaikan informasi ke berbagai bagian masyarakat melalui teknologi informasi berbasis digital. Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mensurvei, tahun 2020, di Indonesia pengguna internet telah mencapai 196,71 juta pengguna aktif atau sekitar 73,7% dari total populasi penduduk Indonesia. Untuk kondisi di Palembang sendiri menurut informasi dari Kominfo Kota Palembang tahun 2021, jumlah orang yang menggunakan internet di Kota Palembang mencapai sekitar 1,1 juta orang dengan persentase penetrasi internet sekitar 62,9 persen dari total populasi Kota Palembang.

Pertumbuhan pengguna yang masif ini membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatnya penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet. Sebagai ilustrasi, penggunaan dunia digital di Indonesia, sejak 2008 terdapat lebih dari 144 orang yang telah diproses hukum dikarenakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama terkait dengan berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial (The Jakarta Post, 2017).

Kementerian Kominfo telah memblokir 1.858.554 situs web dengan konten pornografi pada Desember 2020 (Kominfo, 2021). Dengan menggunakan media sosial, masih banyak orang yang mengaku menyebarkan informasi pribadi sensitif. Selain itu, 30% hingga 60% dari responden mengaku pernah terpapar hoaks, 11% mengaku pernah menyebarkan hoaks karena tidak memikirkan kebenaran informasi, dan beberapa hoaks yang ditemukan terkait dengan masalah politik, kesehatan, dan agama yang paling sering diakses melalui Facebook. Tindakan pemerintah ini jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan TIK dan Internet di Indonesia tidak menguntungkan. Oleh karena itu program literasi digital sangat penting bagi masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat Peta Jalan Literasi Digital 2021–2024, menggunakan referensi global dan nasional, untuk membuat masyarakat Indonesia sadar akan literasi digital. Peta Jalan ini mengadaptasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama pasal 4, khususnya poin (a), (d), dan (e), yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi empat (empat) kerangka literasi digital untuk menyusun kurikulum. Perumusan kerangka kerja literasi digital dipakai sebagai basis dalam merancang program dan kurikulum literasi digital Indonesia tahun 2020-2024 terdiri dari:

Digital skill, adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Adapun indikator digital skill terdiri dari: 1) Pengetahuan dasar mengenai lanskap digital – internet

dan dunia maya; 2) Pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilahan data; 3) Pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan dan media sosial; dan 4) Pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, lokapasar (market place), dan transaksi digital.

Digital Culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Area dan indikator *Digital Culture*, sebagai berikut: 1) Pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, kebangsaan, dan bernegara. 2) Digitalisasi Kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. 3) Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya; 4) Digital rights.

Selanjutnya Siberkreasi & Deloitte (2020) merumuskan etika digital (digital ethics) adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquet) dalam kehidupan sehari-hari. Area dan indikator Digital Ethics, sebagai berikut: 1) Etika Berinternet (Netiquette). 2) Pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya; 3) Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku; 4) Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Digital safety* dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman dan nyaman (Sammons & Cross, 2017).

Digital Safety sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain 'single, formal' karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Area dan indikator Digital Safety, sebagai berikut: 1) Pengetahuan dasar mengenai fitur proteksi perangkat keras; 2) Pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital; 3) Pengetahuan dasar mengenai penipuan digital; 4) Pengetahuan dasar mengenai rekam jejak digital di media (mengunduh dan mengunggah); 5) *Minor safety (catfishing)*.

Dalam upaya untuk membangun karakter masyarakat digital, literasi digital telah menggambarkan berbagai stakeholder dan pendekatan, tetapi belum diterapkan secara optimal di tingkat internasional, nasional, maupun Kota Palembang.

Kementerian Komunikasi dan Informasi, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, bertanggung jawab atas pelaksanaan program literasi digital di Kota Palembang. Ada beberapa masalah teoritis terkait pelaksanaan program ini. Salah satu masalah yang paling penting di sini adalah bagaimana memanfaatkan model implementasi Grindle dan konten

kebijakan. Sehubungan dengan konteks implementasi sinyal, jumlah aktor yang dilibatkan dalam implementasi program literasi digital di Kota Palembang masih belum dioptimalkan (Grindle, 2017).

Problem normaltif menunjukkan bahwa belum paying hukum di level Kotal Palembang yang berkaitan dengan pelaksanaan literasi digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Gubernur Provinsi, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Literasi, Direktorat Literasi Digital di ruang ini masih digunakan. Juga sosialisasi diperlukan untuk menghilangkan kebijakn menaruh informasi pribadi yang sensitif di media sosial. Perlu melibatkan banyalk aktor kebijakan sehingga menimbulkan kerumitan dalam implementasi kebijakan, yang bukan hanya dikarenakan banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga upaya meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat.

Penelitian lainnya yang dilakukan sang Knih (2020) yang berjudul *Young People Palrticipation in The Digitall Society: al Calse Study in Bralzil* mengkaji partisipasi pemuda dalam Masyarakat Digital melalui dialog sosial dan dukungan ekosistem teknologi buat memungkinkan internasionalisasi melalui proyek Uni Eropal netWorked Youth Researlch for Empowerment in the Digitall society (WYRED). Pada kajian ini bertujuan buat meletakkan dasar buat mentralnsfer kerangka kerja WYERD kepada Pemuda Brasi dalam kaitannya dengan perubahan sosial yang diinginkan; toleransi terhadap budayal/pendapat yang berbeda; kesejahteraan mental; perubahan yang diperlukan dalam pendidikan (misalnya pendidikal berorientasi masa depan); citra diri, kepercayaan diri; keamanan dan privasi internet (Knih & Garcia-Holgado, 2020).

Berdasarkan masalah empiris, penelitian Morris dan Rohs (2021), yang berjudul "*Digitalization encouraging self-directed learning for information literate adults—A systematic review*," menemukan bahwa digitalisasi telah meningkatkan kesempatan untuk belajar mandiri dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Namun, temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa keterjangkauan teknologi digital merupakan pedang bermata dua. Pada satu sisi, teknologi memberikan pelajar akses mudah ke informasi, yang mendorong pembelajaran mandiri. Di sisi lain, dengan meningkatnya permintaan informasi, pelajar perlu memperoleh keterampilan literasi informasi yang lebih baik, yang merupakan bagian dari menjadi pelajar mandiri yang mampu mengatasi hambatan informasi.

Hasil penelitian Michalel Saliler, Julial Murbock, Fralnk Fischer (2021) dengaln judul *Digital learning in schools: Whalt does it talke beyond digital technology?* Talhun 2021, jugal menunjukan bahwa keahlian digital pengajar dan keterampilan mengaljahr terkalit teknologi dalripaldal asal dalyal teknologi digitall almaltlalh krusial. Walaupun ambang batas eksklusif dari teknologi digital dibutuhkan pada sekolah, riset mengindikasikan perubahan penekanan dari

keterampilan pengajar menggunakan teknologi dengan efektif.

Berdasarkan penelusuran penelitian yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang membahas literasi digital untuk membangun karakter masyarakat digital, berdasarkan indikator empat pilar literasi digital diantaranya *digital skill*, *digital culture*, *digital ethics* dan *digital safety*.

Dasar pelaksanaan Literasi Digital antara lain: 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F; 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal 4, khususnya point (a), (d), dan (e) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3) Asean ICT Masterplan 2020, Strategic Thrust ke 5 tentang *Human Capital Development*; 4) Pidato Presiden Republik Indonesia bulan Agustus 2020 mengenai percepatan transformasi digital; 5) Visi Misi Presiden Republik Indonesia: Indonesia Toward Digital Nation 2035, dengan menciptakan dan mengembangkan digital talent skill masyarakat Indonesia; 6) Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024.

Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat untuk tujuan pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kemampuan yang berbeda, seperti literasi komputer, literasi teknologi informasi, literasi media, dan sebagainya (Kominfo RI, 2021).

Masyarakat digital adalah contoh masyarakat di mana pola interaksi sangat dipengaruhi oleh jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat digital juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi seperti jaringan internet dan media atau platform tertentu. Secara konseptual, masyarakat digital sangat terkait dengan masyarakat jejaring atau masyarakat network. Masyarakat jejaring terdiri dari jaringan yang terdiri dari teknologi mikro elektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi (kominfo RI, 2021). Pilar utama masyarakat digital, yaitu: a) *Digital Citizenship*, yaitu penggunaan perangkat digital dalam pelayanan publik dan pemerintahan; b) *Digital Lifestyle*, yaitu penggunaan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari; c) *Digital Commerce*, yaitu penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi.

Ciri-ciri masyarakat digital adalah sebagai berikut; a) Penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam aktivitas ekonomi, Pendidikan, pelayanan publik dan kesehatan, dan sebagainya; b) Masyarakat digital memiliki kebutuhan yang tinggi akan informasi; c) *Spatial* atau terhubung dengan lokasi yang berefek pada pengorganisasian ruang dan waktu; d) Banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di bidang informasi dan komunikasi; e) Adanya perubahan pola interaksi masyarakat dari interaksi secara langsung

menjadi interaksi tidak langsung, yakni melalui jejaring sosial.

Digitalisasi masyarakat tentu membawa dampak, baik berupa kelebihan atau dampak positif maupun berupa kekurangan atau dampak negatif. Kelebihan masyarakat digital, antara lain; a) Interaksi masyarakat digital tidak lagi terbatas oleh tempat atau ruang; b) Mudahnya proses komunikasi jarak jauh dengan cepat bahkan *real time*; c) Aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan produktivitas; d) Kemudahan dalam menyebarkan maupun mencari informasi; e) Semakin luasnya lapangan pekerjaan, terutama yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Kekurangan masyarakat digital, antara lain; a) Berkembangnya jenis kejahatan baru yaitu berupa kejahatan dunia maya atau *cyber crime*; b) Pemanfaatan teknologi digital yang tidak pada tempatnya justru menurunkan tingkat produktivitas; c) Munculnya kecenderungan sifat adiktif terhadap media sosial dan game; d) Berkurangnya batas-batas privasi.

Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan literasi digital sebagai upaya untuk membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang dengan menganalisis isi, konteks, dan hasil kebijakan. Selain itu, akan menganalisis empat (empat) kerangka literasi digital untuk penyusunan kurikulum: *digital skill, digital culture, digital ethics dan digital safety*. Pada akhirnya, hasil akhir penelitian akan berupa model pelaksanaan literasi digital.

2. Pembahasan

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menceritakan dan menganalisis implementasi literasi digital sebagai upaya untuk membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang. Penelitian ini berfokus pada penerapan Literasi Digital untuk membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang.

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung. Hasil pengamatan tersebut sesuai dengan data yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan Literasi Digital untuk membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang. Siswa SMA/ sederajat yang pernah mengikuti pelatihan literasi digital dari Kominfo RI termasuk dalam tim pelaksana literasi digital Kota Palembang.

Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang menggunakan kebijakan literasi digital dan teknik analisis data kualitatif yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Melalui hasil analisis data focus Group Discussion (FGD), terlihat bahwa dari keempat pilar literasi digital, kemampuan digital adalah yang paling banyak dipilih oleh siswa. Pelajar percaya bahwa kemampuan digital adalah pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menerapkan literasi digital untuk membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang ini. dengan tingkat kontribusi tertinggi sebesar 37,5% dibandingkan dengan pilar lainnya. Pilar

etis digital mendapat skor 33,3% dari guru dan 25,0% dari siswa lainnya; keamanan digital mendapat skor 26,7% dari guru dan siswa, dan presentasi digital culture rata-rata mendapat skor 25,0% dari guru dan siswa.

Literasi Digital, merupakan Suatu kebijakan yang diimplementasikan untuk meningkatkan dan membangun karakter Masyarakat Digital Kota Palembang dalam ranah digital serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi di ranah digital memasuki era 4.0 dan era disrupsi yang semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh teknologi. Karakter masyarakat merupakan suatu sikap atau kepribadian yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era digital saat ini.

Literasi Digital merupakan gerakan yang tidak bisa dikerjakan oleh satu Institusi, semua orang harus terlibat agar tidak tertinggal meliputi Pemerintah/Kominfo, Masyarakat, dan *Stakeholder*. Dalam *Digital Skill* berkaitan dengan individu dalam mengetahui memahami sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui bahwa Pemerintah cenderung memiliki kepentingan dalam membuat berita di media atau dunia digital sehingga diperlukan jurnalis yang tidak memihak dan dapat menyampaikan kebenaran tanpa diiringi rasa takut.

Manfaat pelaksanaan Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang antara lain: Membantu Individu memahami penggunaan teknologi informasi dan dapat menambah wawasan individu; Meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami teknologi informasi; Menambah penguasaan 'kosa kata' individu, dari berbagai informasi yang dibaca; Meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu terhadap penggunaan media-media digital; serta Menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi yang menggunakan media digital.

Kebijakan Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang diharapkan dapat memperbaiki etika anggota masyarakat digital Kota Palembang dalam ranah digital, seperti tidak menyebarkan *hoax*, tidak berperilaku yang dengan konotasi negatif diranah digital, dapat memproses informasi yang didapatkan dari media digital secara bijak, dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga bermanfaat pada meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kota Palembang tentang *E-commerce* sehingga dapat menciptakan suatu peluang baru untuk meningkatkan kondisi ekonomi bagi dirinya, maupun orang lain.

Potensi perubahan yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan literasi digital dalam upaya membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang mencakup peningkatan keterampilan masyarakat di dunia digital, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang etika di dunia digital, peningkatan pemahaman masyarakat tentang keamanan data diri di dunia digital, dan peningkatan kemampuan berbudaya.

Kesuksesan Kebijakan Literasi Digital dalam upaya membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan antusiasme, tingkat pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan, dan tingkat dorongan peserta untuk menggunakan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran dan penyebaran informasi.

Menurut Juknis Literasi Digital Segmen Pendidikan tahun 2023, metode kerja yang harus dilakukan oleh penyedia jasa lain dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain: 1) Pertemuan antara pengguna/perwakilan yang ditunjuk dan penyedia dilakukan di Kota Palembang; 2) Pertemuan antara pengguna/perwakilan yang ditunjuk dan penyedia sesuai dengan undangan kegiatan; dan 3) Lokasi pelaksanaan sesuai dengan wilayah yang ditetapkan; 4) Materi narasumber diambil dari kurikulum atau modul Program Literasi Digital; 5) Mencari peserta di wilayah masing-masing dengan jumlah target yang ditentukan; 6) Membuat rencana kegiatan setiap bulan dengan target peserta setiap bulan; 7) Memilih tema untuk setiap kegiatan sesuai dengan daftar tema yang diberikan oleh Kementerian Kominfo; 8) Melakukan langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya untuk persiapan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, dan pelaporan.

Strategi untuk menerapkan kebijakan literasi digital untuk membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang, yang didasarkan pada empat (empat) kerangka literasi digital untuk pengembangan kurikulum. Dalam kasus ini, pelajar Kota Palembang menunjukkan nilai keselamatan digital 1,061, etika digital 0,946, budaya digital 0,998, dan keterampilan digital 1,066. Dari empat pilar literasi digital, keterampilan digital menjadi indikator yang paling tinggi di antara 94 informan. Ini menunjukkan bahwa keterampilan digital dapat secara efektif mengevaluasi kemampuan mereka dalam menggunakan platform media sosial, mempresentasikan perubahan informasi.

Sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan Kebijakan Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang terdiri dari sumber daya fisik, yang harus didukung dengan sarana yang memadai, seperti alat dan koneksi teknologi, serta sumber daya non-fisik, yaitu penentuan ahli atau pakar yang bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan tentang Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang. Banyak pakar berpengalaman telah menjadi narasumber atau akan menjadi narasumber di masa depan karena sumber daya yang tersedia lebih dari cukup. Banyak anggota masyarakat yang sadar dan tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan juga sudah mulai. Namun, satu-satunya hambatan adalah kondisi internet yang terkadang mengganggu dan kemampuan masyarakat untuk menggunakannya.

Arus informasi yang besar serta kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat terkadang tidak dapat

memilah informasi yang didapat apakah benar atau salah. Ini adalah masalah terbesar dengan literasi digital.

Untuk meningkatkan dan membangun karakter Masyarakat Digital Kota Palembang, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan literasi digital adalah melakukan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat Kota Palembang, seperti mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum, dengan menggunakan media yang menarik dan mudah dipahami oleh semua orang, serta meningkatkan penggunaan aplikasi atau perangkat digital serta meningkatkan keterlibatan publik. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi masyarakat. Ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam memperbaiki atau mengupdate Program Berbasis Digital dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Palembang tentang dunia digital dan kemampuan untuk memanfaatkannya. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi Karman, yang secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan dan batasan kepada masyarakat saat berselancar di dunia maya. Dengan membiasakan masyarakat untuk menggunakan dunia digital, mereka akan terbiasa dan diharapkan tidak lagi gagap tentang teknologi.

Untuk meningkatkan dan membangun karakter Masyarakat Digital Kota Palembang, pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan literasi digital telah berhasil. Banyak orang, termasuk siswa, guru, dan masyarakat lainnya, telah belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keselamatan digital. Meskipun demikian, masyarakat di pinggiran Kota Palembang belum menggunakan kecanggihan digital karena sinyal yang buruk dan informasi yang diterima terlambat.

Pengaruh penerapan kebijakan Literasi Digital sebagai upaya untuk membangun karakter masyarakat digital di Kota Palembang sangat positif. Dengan kegiatan ini, masyarakat Kota Palembang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara berperilaku dan menggunakan dunia maya. Di tengah kekurangan program literasi digital, peserta, terutama di Kota Palembang, antusias mengikutinya. Selain itu, topik-topik yang diangkat sangat penting dan menarik, meningkatkan minat peserta dari berbagai kalangan.

Setiap aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang membuat masyarakat harus beradaptasi untuk tidak tertinggal. Dalam dunia digital, masyarakat sudah mampu membedakan informasi yang benar atau salah, menjaga etika dalam bersosial media, dan menghindari pembuatan dan penyebaran ujaran kebencian.

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan literasi digital di Kota Palembang adalah peraturan seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, perlu ada tim pelaksana, narasumber, dan materi atau

tema yang menarik untuk menarik minat peserta Literasi Digital di Kota Palembang. keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan di bidang pendidikan juga.

Salah satu kendala yang menghalangi pelaksanaan kebijakan literasi digital di Kota Palembang adalah konektivitas jaringan internet yang menjadi hambatan dan harus diperbaiki. Akibatnya, kegiatan webinar seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami informasi di dunia digital yang berkembang melalui jaringan internet yang semakin berkembang, terutama di era 4.0 dan era disrupsi, di mana teknologi memengaruhi semua aspek kehidupan. Namun demikian, pola pikir masyarakat yang kadang-kadang tertutup membuat mereka tidak tertarik untuk mengikuti webinar dan kegiatan literasi digital lainnya. Masyarakat seringkali tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti webinar dan belajar menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Disamping itu, saat pelaksanaan webinar, seringkali mengalami keterbatasan kuota maupun faktor teknis berupa konektivitas dan jaringan.

3. Kesimpulan

Literasi Digital merupakan gerakan yang tidak bisa dikerjakan oleh satu Institusi saja. Semua orang harus terlibat agar tidak tertinggal meliputi Pemerintah/Kominfo, Masyarakat, dan Stakeholder. Hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Pelaku Kebijakan Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang. Pemerintah dalam hal ini Kominfo yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi, Dinas Pendidikan, Sekolah, Ormas dan Media. Pengambilan Keputusan berdasarkan inisiasi Kominfo RI dan Tim Siber Kreasi, serta berdasarkan kebutuhan masyarakat akan literasi digital Pengambilan Keputusan dilakukan bersama dalam memberikan pengetahuan seperti workshop, webinar ataupun melakukan sosialisasi.

Pemerintah dalam hal ini Kominfo yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi, Dinas Pendidikan, Sekolah, Ormas dan Media. Pengambilan Keputusan berdasarkan inisiasi Kominfo RI dan Tim Siber Kreasi, serta berdasarkan kebutuhan masyarakat akan literasi digital Pengambilan Keputusan dilakukan bersama dalam memberikan pengetahuan seperti workshop, webinar ataupun melakukan sosialisasi.

Digital Skills mampu secara efektif dan mengevaluasi kemampuan literasi digital dalam menggunakan platform media sosial, presentase terhadap perubahan informasi digital yang ada dapat mempengaruhi pelajar Kota Palembang terhadap literasi digital. Sumber daya yang dilibatkan dalam implementasi Kebijakan Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang, berupa Sumber daya fisik yang harus didukung dengan sarana yang memadai (tools dan koneksi berbasis teknologi) serta Sumber daya non fisik berupa penentuan para expert atau pakar yang berperan

dalam memberikan pengetahuan mengenai Literasi Digital sebagai upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital di Kota Palembang agar dapat mencapai sasaran.

Dalam hal Peserta juga sudah mulai banyak anggota masyarakat yang sadar dan tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Namun, hanya saja yang menjadi kendala adalah kondisi internet yang terkadang bermasalah serta kemampuan masyarakat dalam menggunakannya. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak, dan juga kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi jadi terkadang masyarakat tidak mampu memilah informasi yang di dapat apakah benar atau salah.

Literasi digital sangat penting dalam membangun masyarakat digital yang kompeten. Di Kota Palembang, kebijakan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi dan internet dengan benar. Dalam konteks yang lebih luas, program literasi digital juga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat di era digital. Oleh karena itu, program literasi digital perlu terus didorong dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan secara online dengan aman dan efisien. Terlebih lagi bagi Siswa SMA, dimana saat ini media-media pembelajaran juga lebih banyak menggunakan teknologi digital. Begitu juga informasi-informasi untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi saat ini pendaftaran ke berbagai perguruan tinggi lebih banyak menggunakan media internet secara *online*.

Daftar Pustaka

- Adikara, G. J., Kurnia, N., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto, X. A., Desiana, F., & Astuti, S. I. (2021). *Aman bermedia digital* (Gilang Jiwana Adikara & Novi Kurnia (ed.)). Dirjen Aplikasi Informatika.
- Ameliah, R., Adi Hegara, R., Rahmawati, I., & Dkk. (2021). Status Literasi Digital di Indonesia Ringkasan Eksekutif. *Indeks Literasi Digital Indonesia*, 9. <https://katadata.co.id/StatusLiterasiDigital>
- Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Ratri, L., Nurhajati, L., Lotulung, L. J. H., & Kurnia, N. (2021). *Budaya Bermedia Digital* (E. N. P. Santi Indra Astuti (ed.)). Kementerian Komunikasi dan Informatika. <http://literasidigital.id/books/modul-budaya-bermedia-digital/>
- B.Miles, Matthew, A.Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Helen Salmon (ed.); 3rd ed.). SAGE Publication.

- Barrutia, J. M., & Echebarria, C. (2021). Effect of the COVID-19 pandemic on public managers' attitudes toward digital transformation. *Technology in Society*, 67, 101776. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101776>
- Hahn, K. (2021). Social Digitalisation. In *Social Digitalisation*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-79867-3>
- Kemkominfo. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU No. 19 Tahun 2016*, 1, 1–31.
- Knihs, E., & Garcia-Holgado, A. (2020). Young People Participation in the Digital Society: a case study in Brazil. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(April), 10–27. <http://wyredproject.eu>
- Kominfo. (2021). Kerangka Kerja Acuan Penyelenggaraan Literasi Digital 2021. In -: *Vol.*
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Fitratun Annisya (ed.)).
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Esti, L., Hartanti, P., Made, N., Amanda, R., & Kurnia, N. (2021). *Modul Etis bermedia digital* (S. I. A. Frida Kusumaastuti (ed.)). Kementerian Komunikasi dan Informatika. <http://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Li, J., Brar, A., & Roihan, N. (2021). The Use of Digital Technology to Enhance Language and Literacy Skills for Indigenous People: A systematic literature review. *Computers and Education Open*, 2(August 2020), 100035. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100035>
- Mawadi. (2018). *Kota Palembang Dalam Angka 2022*. ISSN: 2527, 43–52.
- Monggilo, Z. M. Z. (2021). *Cakap Bermedia Digital* (N. K. Zainuddin Muda Z. Monggilo (ed.)). Dirjen Aplikasi Informatika. <http://literasidigital.id/books/modul-cakap-bermedia-digital/>
- Morris, T. H., & Rohs, M. (2021). Digitization bolstering self-directed learning for information literate adults—A systematic review. *Computers and Education Open*, 2, 100048. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100048>
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar Antropologi, Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. CV. Anugrah Utama Raharja.

***Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (*Index of Happiness*) di Kota Bandung**

Winda Agustina¹⁾, Widuri Wulandari²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cimahi, Jawa Barat
Email Koresponden: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine collaborative governance in increasing the index of people's happiness in the city of Bandung. The happiness index for the city of Bandung has increased from 2014 to 2018. However, in 2019-2020 there was no measurement of the happiness index in the city of Bandung. The community happiness index in 2019-2020 can experience a decline, this is due to the impact of 10 community happiness index benchmarks in the city of Bandung. This research uses the theory from Ansel and Gash which looks at governance collaboration in 4 stages namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that: 1) the initial conditions, collaboration can be carried out by both parties according to needs, 2) there is no specific institutional design that houses the happiness index, 3) the Bandung City Cooperation Field acts as an intermediary between the government and the collaborating parties, 4) there has been a collaboration of municipal, group and individual internal governance.

Keywords: *Collaboratio,; Governance, Community Happiness Index*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung. Indeks kebahagiaan Kota Bandung mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Namun pada tahun 2019-2020 tidak ada pengukuran indeks kebahagiaan di Kota Bandung. Indeks kebahagiaan masyarakat pada tahun 2019-2020 bisa mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan terdampaknya 10 tolok ukur indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori dari Ansel dan Gash yang melihat kolaborasi pemerintahan dalam 4 tahapan yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kondisi awal, kolaborasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan, 2) tidak adanya desain kelembagaan khusus yang menaungi indeks kebahagiaan, 3) Bidang Kerja Sama Kota Bandung berperan sebagai pelantara antara pemerintah dengan pihak yang bekerjasama, 4) telah dilakukannya kolaborasi pemerintahan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintahan, Indeks Kebahagiaan Masyarakat

1. Pendahuluan

Indikator kebahagiaan di beberapa negara maju telah dijadikan sebagai indikator dalam membuat rumusan kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Indikator kebahagiaan digunakan untuk melengkapi indikator ekonomi yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat selama ini. Hansson (2006) telah melakukan penelitian yang berjudul *Economic Growth and Happiness - in the Western World Today* (pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan di dunia barat - saat ini). Penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kebahagiaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif kepada rata-rata kebahagiaan, hal itu dapat dilihat bahwa kebanyakan orang kaya lebih bahagia dibandingkan orang dengan ekonomi miskin. Lebih luas daripada itu negara-negara kaya memiliki angka tingkat kebahagiaan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang dan negara miskin.

Indikator ekonomi seperti penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi selama ini dijadikan acuan sebagai kemajuan pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dinilai belum cukup dalam memantapkan tingkat kesejahteraan secara faktual. Dengan meningkatnya fokus pada pembangunan berkelanjutan menjadikan kebutuhan dalam mengembangkan dan juga mengimplementasikan berbagai langkah sistematis mengenai kesejahteraan yang menjadi prioritas internasional (Chelli, Ciommi and Gigliarano, 2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arie Kapteyn, Arthur Van Soest dan James P. Smith (2004) dengan judul "*Life Satisfaction*" menyatakan bahwa kebahagiaan yaitu sebuah gambaran dari tingkat kesejahteraan yang diperoleh setiap individu, maka indikator kebahagiaan yaitu parameter yang dapat menggambarkan suatu tingkat kesejahteraan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan sosial. Hal ini telah diamanatkan dalam Pancasila, sila kelima, yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Selain itu juga terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan empat pokok tujuan pembangunan nasional yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut konstitusi di Indonesia, konsep dalam memajukan kesejahteraan umum digambarkan menjadi suatu proses pencapaian tingkat *welfare state* (negara kesejahteraan) sekaligus *progress of society* (perkembangan sosial masyarakat).

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggambarkan kesejahteraan umum bukan hanya mengarah ke arah kondisi kemakmuran material (*prosperity, welfare*) tapi juga mengarah pada suatu konsep kebahagiaan (*public Happiness, Happiness*) (Laboratorium Quality Control Departemen

Statistika Universitas Padjajaran, 2018). Menurut Seligman (2008) kebahagiaan memiliki cakupan makna yang luas tidak hanya pada kondisi *pleasant life* (kondisi yang menyenangkan) dan juga *good life* (kehidupan yang baik) tetapi pada kondisi di mana mendapatkan *meaningfull life* (kehidupan yang bermakna). Hal ini menjadikan bahwa dalam pembangunan nasional, yang menjadi perhatian besar bukan hanya kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan material, namun juga kebahagiaan.

Aspek kebahagiaan yang diterapkan di Indonesia menerapkan antara aspek kebahagiaan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia (BPS Kota Bandung, 2017). Menurut OECD, ada 10 aspek yang menjadi komponen utama dalam pengukuran indeks kebahagiaan yaitu: hubungan sosial, keharmonisan keluarga, kesehatan, ketersediaan waktu luang, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, kondisi rumah dan aset, pendapatan rumah tangga, pendidikan, dan pekerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menjadikan 3 kategori dari 10 aspek tersebut, untuk mengukur kebahagiaan di Kota Bandung, diantaranya: pertama, kebahagiaan yang bersifat kota, yaitu berkaitan dengan keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Kedua, kebahagiaan yang bersifat kelompok, yaitu berkaitan dengan hubungan sosial, keharmonisan keluarga, kondisi rumah dan aset, dan pendapatan rumah tangga. Ketiga, kebahagiaan yang bersifat internal individu, yaitu berkaitan dengan ketersediaan waktu luang, pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan.

Menurut hasil penelitian *World Happiness Report* tingkat kesedihan masyarakat dari beberapa negara (diantaranya: Australia, Kanada, Brazil, Hong Kong, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Malaysia, Prancis, dll) pada tahun 2020 meningkat 10% dibandingkan tahun 2017-2019, dan tingkat kecemasan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 8% dibandingkan dengan tahun 2017-2019.

Grafik 1.1 Angka Indeks Kebahagiaan Kota Bandung Tahun 2014-2020



Sumber: Lab Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran Tahun 2014 dan Tahun 2018 & Badan Pusat Statistik Kota Bandung Tahun 2015-2017.

Berdasarkan pada tabel di atas, bahwa indeks kebahagiaan Kota Bandung mengalami peningkatan

sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Angka indeks kebahagiaan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2014 sebesar 68,23. Lab Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran (UNPAD) melakukan pengukuran indeks kebahagiaan Kota Bandung pada tahun 2015 sebesar 70,60. Angka indeks kebahagiaan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2016 sebesar 73,27. Angka indeks kebahagiaan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 73,47. Lab Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran (UNPAD) melaksanakan pengukuran indeks kebahagiaan Kota Bandung pada tahun 2018 sebesar 75,10.

Namun, pada tahun 2019-2020 tidak ada pengukuran indeks kebahagiaan di Kota Bandung dikarenakan sejak tahun 2018 Badan Pusat Statistik Kota Bandung melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) setiap 3 tahun sekali dan kembali akan melakukan pengukuran Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) pada tahun 2021. Indeks kebahagiaan pada tahun 2019-2020 bisa mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari terdampaknya 10 tolok ukur indeks kebahagiaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan 10 aspek indeks kebahagiaan, bahwa 10 aspek tersebut meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, kesehatan dll. Maka untuk itu, berbagai bidang tersebut melibatkan banyak pihak (stakeholder) baik pemerintah maupun non pemerintah. Salah satu contohnya pada bidang ekonomi, seharusnya Pemerintah Kota Bandung melibatkan atau melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menyelesaikan persoalan pengangguran dan masyarakat terdampak PHK di Kota Bandung. Pada aspek kesehatan Pemerintah Kota Bandung bisa melakukan kolaborasi dengan pihak rumah sakit swasta atau dengan fakultas kesehatan perguruan tinggi yang ada. Dalam aspek pendidikan Pemerintah Kota Bandung bisa melakukan kolaborasi dengan pihak swasta berkenaan dengan akses internet agar lebih merata dan berkualitas.

Dari 10 aspek indeks kebahagiaan di Kota Bandung masih banyak ditemukan permasalahan, memang Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan kerja sama di berbagai sektor. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Bandung yang bertanggung jawab dan sebagai fasilitator dalam kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan pihak lainnya. Namun hasil kerja sama tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi. Melalui *Collaborative Governance* pemerintah dan non pemerintah turut berpartisipasi aktif sehingga tingkat kebahagiaan dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, peneliti

tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Collaborative Governance* dalam meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Kota Bandung. *Collaborative governance* merupakan konsep baru sebagai pengganti dari kodenp lain dalam pengambilan kebijakan terdahulu (Pebriani and Nasyaya, 2023). Konsep *collaborative governance* yaitu hubungan yang saling berkaitan dengan beberapa pihak (Orbawati and Mukti, 2023). Kata *Governance* sendiri memiliki makna suatu tindakan, kegiatan, pengelolaan, pengarahan pembinaan di pemerintahan (Delly, 2018).

Menurut (Abdullah, 2016) *governance* merupakan proses yang baru di manajemen pemerintahan, istilah ini muncul dari adanya perubahan paradigam bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak hanya sendiri, namun adanya keterlibatan dari sektor swasta dan *civil society*. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* yaitu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga atau pemangku kepentingan lainnya untuk proses pengambilan keputusan dari semua pihak yang bersifat formal, deliberative, berorientasi pada konsensus yang memiliki tujuan untuk kepentingan publik.

Pendapat lainnya dari La Ode Syaiful Islamy H (2018) bahwa kolaborasi ke pemerintahan merupakan adanya keseimbangan kekuatan sumber daya antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, saling bergantung dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks melalui pengambilan keputusan yang kolektif dan implementasi yang berorientasi consensus. Pendapat dari Taehyon Choi dan Peter J. Robertson (2014) yang mengatakan bahwa *collaborative governance* umumnya mengacu kepada sekelompok pemangku kepentingan yang saling bergantung dan biasanya terdiri dari berbagai macam sektor yang bekerja sama untuk mengembangkan dan juga menerapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan beragam. Pengambilan keputusan kolaboratif telah digunakan dalam berbagai kondisi kebijakan yang berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan empat proses kolaborasi yang disampaikan oleh (Ansell and Gash, 2008) yaitu a) Kondisi awal; b) Desain kelembagaan; c) Kepemimpinan fasilitatif; dan d) Proses Kolaborasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Rukin, 2019) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat narasi dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Pemanfaatan teori guna untuk memmbarkan gambaran umum pada latar belakang dan juga pada pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini akan menganalisis fenomena terkait *collaborative governance* dalam meningkatkan indeks kebahagiaan di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara dokumentasi, pengamatan langsung di lapangan (observasi), dan wawancara secara mendalam dengan para informan.

2. Pembahasan

Kebahagiaan masyarakat yang merupakan kesejahteraan subjektif masyarakat dapat meningkat jika dikelola secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat diperlukan keterlibatan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakat Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan beberapa kerja sama dengan pengampu kepentingan lainnya.

Indeks kebahagiaan pada tahun 2019-2020 bisa mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari terdampaknya 10 tolok ukur indeks kebahagiaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Pertama, dilihat dalam aspek pekerjaan, berdasarkan (Agus Warsudi, 2021) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Kota Bandung pada tahun 2019 sebanyak 105.670 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengangguran meningkat sebanyak 147.081 orang. Salah satu dampak dari meningkatnya pengangguran yaitu turunya pertumbuhan ekonomi dan juga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kedua, dilihat dari aspek kondisi keamanan, peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), banyaknya pengangguran, dan permasalahan ekonomi memberikan dampak kondisi keamanan, berdasarkan (Kompas.tv, 2020) terjadi peningkatan angka kriminalitas di Kota Bandung pada tahun 2020. Perasaan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1).

Ketiga, dilihat dari aspek pendidikan, ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung, dalam Bagian Kedua Pasal (6) menyebutkan bahwa dibatasinya pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan di institusi pendidikan lainnya. Dengan peraturan tersebut maka diberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Bandung. Akan tetapi pembelajaran jarak jauh dinilai belum optimal, hal ini disebabkan pelaksanaan sistem pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik belum optimal secara keseluruhan, internet yang kurang stabil, bahkan keaktifan peserta didik yang berkurang (Artanti Zahra Adisa, 2021).

Keempat, dilihat dari aspek kesehatan, dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, memberikan dampak yang luar biasa pada kesehatan di Kota Bandung, berdasarkan (Covid19.BANDUNG.GO.ID, 2021) sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021, total kasus terkonfirmasi sebanyak 43.354 orang dengan rincian 41,568 orang sembuh dan 1,422 orang meninggal dunia. Kesehatan adalah keadaan kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang diakui, dan juga merupakan hak asasi manusia yang dapat mewujudkan hak-hak dasar lainnya. Orang yang sehat

akan mampu menyadari hak asasi mereka dengan baik dan berjuang ketika hak asasi manusia dilanggar. Selain itu, kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan setiap orang.

Selain itu, berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung 2020 (Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2020) menunjukkan bahwa prevalensi kunjungan gangguan jiwa di Kota Bandung terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2019 sebanyak 41.531 kunjungan menjadi 43.580 kunjungan. Dengan rincian orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat pada tahun 2019 sebanyak 3.041 (86,54%) dari sasaran jumlah ODGJ berat pada tahun 2019 sebanyak 3.514 penderita. Lalu pada tahun 2020 ODGJ Berat terjadi peningkatan sebanyak 5,69% atau sebanyak 3.241 jiwa (92,23%) dari sasaran jumlah ODGJ berat pada tahun 2019 sebanyak 3.514 penderita.

Kelima, dilihat dari aspek keharmonisan keluarga, berdasarkan (Wanda Novi, 2021) selama 2020-2021 terjadi peningkatan perkara perceraian sebanyak 70-75% atau lebih dari lima ribu pasangan yang bercerai. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung penyebab meningkatnya perkara perceraian dipicu oleh beberapa faktor antara lain: permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.

Keenam, dilihat dari aspek kondisi lingkungan, berdasarkan (Arif Budiarto, 2020) puluhan mata air di Kota Bandung pada tahun 2020 dalam keadaan darurat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung mengungkapkan bahwa hanya 67 mata air dari 160 mata air yang masih memiliki air. Kondisi tersebut disebabkan oleh rusaknya lingkungan dan alih fungsi lahan yang sebelumnya merupakan kawasan atau kawasan resapan air menjadi pemukiman serta areal bisnis.

Ketujuh, dalam aspek pendapatan rumah tangga, berdasarkan (Hani Febriani, 2020) UMK Kota Bandung tahun 2020 sebesar Rp. 3.742.276,48. Namun, pada tahun 2020 berdasarkan (Ridwan and Hafil, 2023) terjadi peningkatan harga bahan pokok di Kota Bandung mengalami kenaikan hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Bandung. Terjadinya inflasi pada bulan November 2020 ini dikarenakan adanya kenaikan indeks di berbagai sektor seperti kenaikan pada minuman, makanan, tembakau, transportasi, peralatan rumah tangga, dan lainnya (BPS Kota Bandung, 2020).

Kedelapan, dalam aspek kondisi rumah dan aset, berdasarkan (Soraya and Fitrat, 2023) terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Bandung dikarenakan belum bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun berdasarkan (Jabar.antaranews.com, 2021) bahwa Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung untuk memeriksa pohon-pohon yang ada di sekitar Kota Bandung dikarenakan banyaknya pohon rentan tumbang dan patah di Kota Bandung.

Kesembilan, dalam aspek hubungan sosial, berdasarkan (bappeda.jabarprov, 2020) dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

memberikan dampak kesehatan dan sosial. Masyarakat diberikan batasan dalam berinteraksi, berlakunya pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Bekerja, beribadah, belajar dari rumah. Pemerintah menerapkan penerapan *social distancing* guna untuk menurunkan angka COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Bandung.

Kesepuluh, dalam aspek waktu luang, berdasarkan (BPS Kota Bandung, 2017) dalam aspek ketersediaan waktu luang, laki-laki cenderung memiliki waktu luang yang lebih sedikit daripada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai indeks subdimensi kepuasan hidup personal yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan.

Dari kesepuluh permasalahan yang terjadi di Kota Bandung ini, bisa menurunkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung.

KONDISI AWAL

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu kesejahteraan. Pemerintah Daerah Kota Bandung berupaya dalam meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan subjektif masyarakatnya, hal tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya pengukuran terhadap indeks kebahagiaan masyarakatnya. Selain itu secara nasional dilakukan pula survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) setiap 3 tahun yang bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat mengenai apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada tanggal 27 Desember 2021 telah publikasikan hasil pengukuran indeks kebahagiaan masyarakat level nasional oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat menempati posisi ke 5 dari bawah dengan angka indeks kebahagiaan masyarakat sebanyak 70,23, hal tersebut menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan di Jawa Barat berada di bawah nilai indeks kebahagiaan masyarakat nasional yakni 71,49. Badan Pusat Statistik Kota Bandung tetap melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) akan tetapi hal tersebut hanya menyajikan data dengan level estimasi provinsi, hal itu dikarenakan kurangnya jumlah sampel yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung untuk menentukan angka indeks kebahagiaan masyarakat pada level kota.

Kondisi awal dari kolaborasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yaitu dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan semaksimal mungkin agar meningkatkan kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan berbagai pihak didasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Awal kolaborasi dalam meningkatkan kebahagiaan di Kota Bandung bisa saja diawali oleh dua belah pihak, yang artinya bisa diinisiasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan

kebutuhan atau bisa pula dari stakeholder yang memiliki inovasi dan menawarkan diri ke Pemerintah Daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu berkaitan dengan indeks kebahagiaan yang bersifat kota hal ini berkaitan dengan dilakukannya kolaborasi mengenai kondisi lingkungan yang ada di Kota Bandung, dan yang bersifat kelompok hal ini berkaitan dengan dilakukannya kolaborasi mengenai peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat Kota Bandung dengan meningkatkan UMKM yang ada di Kota Bandung. Kondisi awal kolaborasi berbagai pihak di Kota Bandung yang berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan masyarakat telah dilakukan dengan cukup baik.

DESAIN KELEMBAGAAN

Dalam desain kelembagaan para stakeholder diminta untuk terlibat dalam negosiasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kolaborasi pemerintahan sebagai suatu konsensus yang memiliki orientasi, meskipun terkadang konsensus tersebut tidak selalu tercapai. Maka dalam desain kelembagaan ini para pemangku kepentingan diharapkan agar dapat membagi dan memahami hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yang berkenaan dengan peraturan dasar dan tata laksana dalam suatu proses kolaborasi yang legal, transparan, partisipan yang inklusif dan juga forum yang inklusif.

Mengenai desain kelembagaan proses kolaborasi pemerintahan dalam upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, maka dapat diketahui bahwa dilakukan berdasarkan dengan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang dituangkan dalam disposisi. Disposisi tersebut merupakan suatu sikap dari Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga kerja sama tersebut dapat direalisasikan. Dengan diterbitkannya disposisi ini, pihak yang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak diketahui bahwa desain kelembagaannya tidak terintegrasi dalam suatu kelembagaan. Tidak adanya desain kelembagaan yang ada di Kota Bandung yang berkaitan dengan indeks kebahagiaan. Hal ini dikarenakan kerja sama Pencapaian Indeks Kebahagiaan dilakukan oleh semua lembaga dan dinas di Kota Bandung. Semua dinas di Kota Bandung diharuskan dapat mencapai visi misinya, hal ini berhubungan dengan indeks kebahagiaan dari masyarakat.

Proses kerja sama dilakukan dengan permohonan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan suatu kerja sama. Setelah itu, pihak ketiga memberikan kerangka ataupun acuan kerja dan juga tujuan kerja samanya itu sendiri, setelah tiga proses tersebut dilaksanakan maka

barulah akan diterbitkan Kesepakatan Bersama (KesBer) antara pihak ketiga dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Setelah substansi Kesepakatan Bersama tersebut jelas, selanjutnya Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung mengundang kembali pihak ketiga, dinas yang bersangkutan, dan Bidang Hukum Sekretariat Kota Bandung untuk berunding membahas mengenai draft naskah kerja sama. Dalam naskah kerja sama tersebut berisi maksud dan tujuan kerja sama, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama, bagaimana pelaksanaan dari kerja sama, pembiayaan kerja sama, jangka waktu kerja sama, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar (sewenang-wenang) dan pengakhiran kerja sama. Setelah melalui proses tersebut naskah akan dikembalikan ke Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk di proses dan dibagikan kembali ke masing-masing pihak.

KEPEMIMPINAN FASILITATIF

Dalam menyukseskan suatu proses kolaborasi kepemimpinan menjadi suatu elemen penting dalam memberdayakan, merangkul dan juga melibatkan para stakeholder hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan akan terjadinya pergesekan serta rendahnya kepercayaan dalam berpartisipasi dalam suatu kolaborasi pemerintahan. Keberadaan pemimpin biasanya tergantung sesuai keadaan atau kolaborasi yang dilakukan. Kepemimpinan fasilitatif berhubungan dengan musyawarah atau perundingan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan aturan aturan dasar, pembangunan kepercayaan, dan fasilitasi perbincangan antar pemangku kepentingan dan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Kepemimpinan fasilitatif dari *collaborative governance* dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, kerja sama yang dilakukan sebagai upaya agar tidak ada pihak yang dirugikan maka, ditetapkannya hak dan kewajiban bagi para pengampu kepentingan. Para pemangku kepentingan melakukan beberapa kali pertemuan untuk menentukan berbagai poin dari kerja sama yang akan dilaksanakan. Sebagai bentuk antisipasi konflik selama dalam proses kerja sama Pemerintah Daerah Kota Bandung melegalkan naskah atau draft kerja sama tersebut oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung. Akan tetapi, dalam bentuk kepemimpinan fasilitatif dengan media massa, Pikiran Rakyat berusaha melakukan fungsinya yaitu pengawasan, kontrol sosial dan edukasi secara profesional.

PROSES KOLABORASI

Proses kolaborasi merupakan suatu elemen yang penting di mana proses kolaborasi diawali dengan perundingan yang berkaitan dengan kepercayaan masing-masing pihak. Setelah perundingan itu dilakukan maka akan terbentuk komitmen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam suatu proses kolaborasi. Setelah adanya komitmen dari para pengampu

kepentingan memiliki pemahaman bersama dalam merumuskan permasalahan, mengidentifikasi nilai, dan menetapkan tujuan yang jelas. Maka, apabila para pengampu kepentingan memiliki paham yang sama maka akan ditentukan suatu rencana strategis dalam menjalankan proses kolaborasi tersebut.

Dalam meningkatkan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung membuat program “Mentoring Go Export Business Matching, Designer Dispatch Service and Rebranding” yang bertujuan untuk mendorong UMKM yang ada di Kota Bandung untuk melakukan ekspor sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi dari UMKM tersebut. Odora Knitwear merupakan salah satu UMKM yang mengikuti program tersebut, untuk sekarang ini Odorakitwear telah melakukan ekspor ke berbagai negara selain Indonesia seperti Malaysia dan New Zeland. Dalam proses produksi Odora Knitwear memberdayakan masyarakat Kota Bandung berdasarkan informasi yang peneliti dapat bahwa jumlah karyawan Odora Knitwear sebanyak 22 orang karyawan tetap, hal ini menunjukkan bahwa dengan program ini memberikan dampak perekonomian yang lebih luas, tidak hanya pemilik dari UMKM saja yang dapat meningkatkan perekonomiannya akan tetapi juga penyerapan karyawan. Adanya penyerapan karyawan yang dilakukan oleh UMKM di Kota Bandung, mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian.

Beberapa kolaborasi pemerintahan yang berkaitan dengan peningkatan indeks kebahagiaan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu. kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Kota Bandung dengan stakeholder lainnya mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi keamanan di Kota Bandung dengan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandung.

Kemudian terdapat kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi lingkungan di Kota Bandung yakni kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dengan Universitas Telkom yang bertujuan untuk mendukung pengembangan program ketahanan pangan di Kota Bandung. Lalu terdapat kolaborasi pemerintahan dengan para pengampu kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat kelompok. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Kereta Api Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung, lalu adapun kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Perum Bulog Cabang Bandung kolaborasi ini bertujuan untuk penyediaan

paket bahan kebutuhan pokok bagi keluarga penerima manfaat di Kota Bandung, dan terdapat juga kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang transportasi darat di wilayah Kota Bandung.

Selanjutnya, terdapat kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan keharmonisan keluarga di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bandung dengan *Save The Children* yang bertujuan untuk optimalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dan terakhir dalam kolaborasi yang bersifat kelompok yakni yang berkaitan dengan kondisi rumah dan aset, adapun kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjajaran yang bertujuan untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung.

Kolaborasi pemerintahan dengan stakeholder lainnya dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat internal individu. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat internal individu yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendidikan di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Muhammadiyah Bandung yang bertujuan untuk peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Bandung, lalu kemudian terdapat kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang bertujuan mengenai kegiatan penelitian dan pembangunan di Kota Bandung, lalu terdapat kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Komputer Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Bandung. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan waktu luang Pemerintah Kota Bandung melakukan kolaborasi pemerintahan dengan PT. Mahkota Permata Perdana yang bertujuan untuk pembuatan program destinasi pariwisata baru. Selain data kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2021, berdasarkan data yang peneliti dapat dari Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, terdapat beberapa kolaborasi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai stakeholder lainnya pada tahun 2020 dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020

No	Badan Hukum/ Lembaga/ Perguruan Tinggi
1	Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2	Pemerintah Kota Bandung dengan Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
3	Pemerintah Kota Bandung Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

	Tbk.
4	Kesepakatan Bersama Antara PT. Mahkota Permata Perdana dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Pendirian Mal Pelayanan Publik Kota Bandung di Kawasan Summarecon Bandung
5	Kesepakatan Bersama antara Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung (Bandung <i>Economic Empowerment Center</i>) dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung
6	Pemerintah Kota Bandung Dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
7	Perjanjian Kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandung tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Bandung Nomor : 445/23065 -Dinkes dan nomor : 885/KTR/V - 01/1219 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Bandung
8	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Pendidikan Indonesia dengan Pemerintah Kota Bandung terkait Analisis Penanggulangan Wabah Covid -19 -19 di Kota Bandung Berbasis Webgis.
9	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung (Bandung Empowerment Center) dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Uji Coba Implementas Internet of Things (IOT) di Pemerintah Daerah Kota Bandung
10	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung (Bandung Empowerment Center) dengan Dinas Pendidikan tentang TV Satelit 132

Sumber: Dokumen Kerja Sama Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2020

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kolaborasi pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2020 yang berkaitan dengan peningkatan indeks kebahagiaan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu. kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Kota Bandung dengan para pengampu kepentingan lainnya mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi keamanan di Kota Bandung dengan Universitas Pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menganalisa penanggulangan wabah Covid-19 berbasis webgis di Kota Bandung. Lalu terdapat kolaborasi pemerintahan dengan para pengampu kepentingan dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat kelompok. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat kelompok yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Bandung Ekonomi Empowerment Center (Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung) yang bertujuan untuk uji coba implementasi dari *Internet of Thing* (IoT) di Kota Bandung. Terakhir terdapat kolaborasi pemerintahan dengan para pengampu kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat internal individu.

Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat internal individu yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendidikan di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Bandung Ekonomi Empowerment Center (Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung) mengenai TV Satelit 132 yang sarana alternatif pembelajaran bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bandung. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan jaminan kesehatan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melakukan kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Bandung mengenai Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kolaborasi pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2020 yang berkaitan dengan peningkatan indeks kebahagiaan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu. Kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Kota Bandung dengan stakeholder terkait mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi lingkungan di Kota Bandung dengan PT. Biofarma mengenai pembangunan fasilitas sanitasi yang terintegrasi di SDN 136 Sukawarna. Lalu terdapat kolaborasi pemerintahan dengan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat kelompok.

Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat kelompok yakni kolaborasi yang berkaitan mengenai hubungan sosial dengan dikeluarkannya berita acara hibah serah terima Microlibrary yang berada di Kecamatan Kiara Condong Bandung. Terakhir terdapat kolaborasi pemerintahan dengan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat internal individu. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat internal individu yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendidikan Pemerintah Kota Bandung melakukan kerja sama dengan 15 perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, perguruan tinggi tersebut yakni: Universitas Kristen Maranatha, Politeknik Piksi Ganesha, Universitas Bhakti Kencana, Universitas Bandung Raya, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung, Institut Teknologi Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Gunung Djati, Universitas Pasundan, Universitas Halim Sanusi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Immanuel Bandung, dan Universitas Kebangsaan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan data didapatkan oleh peneliti, maka diketahui bahwa terjadi beberapa proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai stakeholder terkait mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung baik yang bersifat kota, bersifat kelompok maupun yang bersifat internal individu. Akan tetapi, tidak semua elemen indeks kebahagiaan melakukan kolaborasi dengan pihak lain, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakatnya.

Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Kota Bandung sudah terjalin dengan berbagai pihak, baik dengan pihak swasta, kelompok masyarakat, perguruan tinggi maupun media massa. Namun belum semua dari kerja sama ini dilakukan evaluasi tindak lanjut dari *output* kerja sama. Perlu adanya analisis kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, jika dilihat masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *collaborative governance* dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa ada upaya dalam peningkatan Indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kolaborasi pemerintahan yang bersifat kota, bersifat kelompok dan bersifat internal individu. Akan tetapi, hal tersebut masih dirasa belum optimal karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dilihat dari kerja sama yang sudah dilaksanakan selama ini dengan masyarakat masih dirasa kurang terbangun, khususnya partisipasi dalam pembangunan ekonomi, juga keamanan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa kondisi awal kolaborasi pemerintahan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan di Kota Bandung yaitu bisa diinisiasi oleh kedua belah pihak, yang artinya bisa diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung atau dari stakeholder lain, tergantung kebutuhan serta inovasi. Adapun upaya awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam

meningkatkan indeks kebahagiaan yaitu dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun desain kelembagaan dalam kolaborasi pemerintahan dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya mengenai kepemimpinan fasilitatif dari *Collaborative Governance* dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, ditetapkannya hak dan kewajiban bagi para pengampu kepentingan. Para pemangku kepentingan melakukan beberapa kali pertemuan dalam membuat poin-poin dari kerja sama yang akan dilaksanakan. Terakhir mengenai proses kolaborasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai stakeholder yaitu telah dilakukan baik yang bersifat kota, bersifat kelompok maupun yang bersifat internal individu. Akan tetapi, tidak semua elemen indeks kebahagiaan melakukan kolaborasi dengan pihak lain, hal tersebut perlulah dijadikan suatu pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung hendaknya memperkuat komitmen dalam meningkatkan indeks kebahagiaan di Kota Bandung, dalam menciptakan program yang berkaitan mengenai peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung
2. Pemerintah Kota Bandung perlu memanfaatkan teknologi informasi dengan menciptakan suatu aplikasi terpadu yang dapat menghubungkan para stakeholder dan dapat memperbaharui mengenai sejauh mana progress dari kerja sama yang sedang dilaksanakan.
3. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan evaluasi kerja sama yang dilakukan selama ini
4. Pemerintah Kota Bandung perlu memperhatikan program yang dilaksanakan agar dituangkan ke dalam aturan hukum yang pasti supaya memberikan keamanan mengenai hak dan kewajiban yang mengikat antar pihak.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. T. (2016) 'Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan', *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), pp. 65–72. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/83870211.pdf>.

Agus Warsudi (2021) 'Akibat Badai Pandemi Covid-19, 42.000 Warga Kota Bandung Menganggur', *iNewsJabar.id*.

Ansell, C. and Gash, A. (2008) 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. doi: 10.1093/jopart/mum032.

Arif Budianto (2020) 'Lingkungan Rusak, Puluhan Mata Air di Kota Bandung Kritis', *iNewsJabar.id*. Available at: <https://jabar.inews.id/berita/lingkungan-rusak-puluhan-mata-air-di-kota-bandung-kritis>.

Artanti Zahra Adisa (2021) 'Pembelajaran Jarak Jauh Efektif atau Tidak?', *kumparan.com*.

bappeda.jabarprov (2020) *Pentingnya Sosialisasi dalam Pembatasan Sosial Berskala Mikro*, *bappeda.jabarprov.go.id*. Available at: <http://bappeda.jabarprov.go.id/pentingnya-sosialisasi-dalam-pembatasan-sosial-berskala-mikro/>.

BPS Kota Bandung (2017) *Indeks Kebahagiaan 2017*. Kota Bandung.

Chelli, F. M., Ciommi, M. and Gigliarano, C. (2013) 'The Index of Sustainable Economic Welfare: A Comparison of Two Italian Regions', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 81, pp. 443–448. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.457.

Choi, T. and Robertson, P. J. (2014) 'Deliberation and decision in collaborative governance: A simulation of approaches to mitigate power imbalance', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(2), pp. 495–518. doi: 10.1093/jopart/mut003.

Covid19.BANDUNG.GO.ID (2021) *Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung*. Available at: <https://covid19.bandung.go.id/>.

Delly, M. (2018) *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Hani Febriani (2020) 'Daftar Lengkap UMK 2021 di Jawa Barat, Kota Bandung hingga Karawang Mengalami Kenaikan', *PIKIRAN RAKYAT*. Available at: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01996428/daftar-lengkap-umk-2021-di-jawa-barat-kota-bandung-hingga-karawang-mengalami-kenaikan>.

Hansson, M. (2006) 'Economic Growth and Happiness - in the Western World Today', *Globalisation and transformation in a Comparative Perspective*, pp. 41–60.

- Jabar.antaranews.com (2021) 'DPKP3 Bandung ajak warga pelihara pohon agar tak tumbang', *Jabar.antaranews.com*. Available at: <https://jabar.antaranews.com/berita/328197/dpkp3-bandung-ajak-warga-pelihara-pohon-agar-tak-tumbang>.
- Kapteyn, A., Smith, J. P. and Soest, A. van (2004) 'Life satisfaction', *Physiotherapy Practice in Residential Aged Care*, pp. 71–83. doi: 10.1016/B978-0-7506-8772-0.50007-5.
- Kompas.tv (2020) 'Kompas.tv. (2020). Waspada! Kejahatan di Kota Bandung Meningkat Selama Pandemi', *Kompas.tv*.
- Laboratorium Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran (2018) *Survei Indeks Kebahagiaan 2018 Kota Bandung*. Available at: https://issuu.com/opendatabdg/docs/survei_indeks_kebahagiaan_kota_band.
- La Ode Syaiful Islamy H. (2018) *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Orbawati, E. B. and Mukti, A. (2023) 'Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19', *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8(1).
- Pebriani, H. and Nasyaya, A. (2023) 'Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu', *JURNALPEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8(2), pp. 137–148.
- Ridwan, F. and Hafil, M. (2023) 'Harga Telur Ayam Naik di Bandung Jelang Ramadhan', *Republika.co.id*. Available at: <https://ramadhan.republika.co.id/berita//rrm8kp430/harga-telur-ayam-naik-di-bandung-jelang-ramadhan?>
- Rukin (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ebook)*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia.
- Seligman, M. E. P. (2008) 'Positive health', *Applied Psychology*, 57(SUPPL. 1), pp. 3–18. doi: 10.1111/j.1464-0597.2008.00351.x.
- Soraya, D. A. and Fitrat, I. (2023) 'Petugas TPS Keluhkan Penumpukan Sampah, Dukung TPA Darurat di Bandung', *Republika.co.id*. Available at: <https://rejabar.republika.co.id/berita/ru0uz9432/petugas-tps-keluhkan-penumpukan-sampah-dukung-tpa-darurat-di-bandung>.
- Wanda Novi (2021) 'Angka Perceraian di Kota Bandung Meningkat, Ternyata Ini Penyebabnya', *jabarekspres.com*. Available at: <https://jabarekspres.com/berita/2021/09/06/angka-perceraian-di-kota-bandung-meningkat-ternyata-ini-penyebabnya/>.

The Political Parties Coalition Behavior in Election: A Meta-Analysis

Dimas Subekti¹⁾, Makmun Wahid²⁾

^{1), 2)} Department of Government Science, Universitas Jambi,
KM. 15, Mendalo Darat, Jambi
Luar Kota District, Muaro Jambi Regency, Jambi Province.

Email Koresponden : dsubekti05@gmail.com

ABSTRACT

The formation of political party coalitions can be applied productively to patronage democracy, but this requires a broader comprehensive study and the addition of new conceptualizations. Therefore, this study aims to determine the development of research on the theme of political party coalition behavior from 2015 to 2021 indexed by Scopus. This study uses a scoping review method. The source of this research data comes from the Scopus database. The findings in this study that the coalition behavior of political parties will not be separated from the topic of voting behavior and the electoral system, this is evident in this study. The political parties in building coalitions must consider the level of electability by looking at behavior in the voters. Moreover, the electoral system will determine whether political parties need to form coalitions or not if they want to participate in electoral contestation. Furthermore, parliamentary elections and proportional representation are topics that have opportunities as novelties for future research related to this themes. Furthermore, Indonesia (southeast asia), Spain, Norway (Europa), Uruguay and Colombia (South America) have recently paid great attention to research on the political parties coalition behavior. The implications of the findings of this study are as a form of a reference for knowledge regarding the study of political parties. More than that, it is important to describe these findings because they can classify world research which so far has only been limited to individual findings.

Keywords : Political Parties, Coalitions Behaviour, Election, Meta-Analysis

ABSTRAK

Pembentukan koalisi partai politik dapat diterapkan secara produktif pada demokrasi patronase, namun hal ini membutuhkan kajian komprehensif yang lebih luas dan penambahan konseptualisasi baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian dengan tema perilaku koalisi partai politik dari tahun 2015 hingga 2021 yang terindeks Scopus. Penelitian ini menggunakan metode scoping review. Sumber data penelitian ini berasal dari database Scopus. Temuan dalam penelitian ini bahwa perilaku koalisi partai politik tidak akan terlepas dari topik perilaku memilih dan sistem pemilu, hal ini terbukti dalam penelitian ini. Partai politik dalam membangun koalisi harus mempertimbangkan tingkat elektabilitas dengan melihat perilaku pemilih. Selain itu, sistem pemilu akan menentukan apakah partai politik perlu berkoalisi atau tidak jika ingin mengikuti kontestasi pemilu. Lebih lanjut, pemilu parlementer dan representasi proporsional merupakan topik yang memiliki peluang sebagai hal baru untuk penelitian di masa depan terkait tema ini. Selain itu, Indonesia (Asia Tenggara), Spanyol, Norwegia (Eropa), Uruguay, dan Kolombia (Amerika Selatan) baru-baru ini menaruh perhatian besar pada penelitian tentang perilaku koalisi partai politik. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah sebagai bentuk referensi pengetahuan mengenai studi partai politik. Lebih dari itu, temuan ini penting untuk dideskripsikan karena dapat mengklasifikasi penelitian dunia yang selama ini hanya sebatas temuan individual.

Kata Kunci : Partai Politik, Perilaku Koalisi, Pemilu, Analisis Meta

1. Introduction

The choice of candidates by political parties is one of the most important decisions they make. Running candidates enables parties to promote their objectives and guiding principles, develop their brand, and even gain access to elected office. It stands to reason that party members prioritize the success of their own party over all others. However, in certain cases, party leaders will back a rival party, forging a pre-election coalition while forgoing the chances for party building that come from fielding their own candidate (Bruhn, 2021). Many academics have examined, tested and developed studies of political party coalitions, mostly in the context of coalitions formed to establish national governments after elections, but more recently studies have focused more on pre-election political party coalitions (Hendrawan et al., 2021).

The objective reason of this research is the formation of political party coalitions can be applied productively to patronage democracy, but this requires a broader comprehensive study and the addition of new conceptualizations. Thus, this research is important because mapping is an in-depth step to explain the study with the theme the coalition of political parties in elections as an effort to create a stronger conceptual related to this. More than that, this research also describes research topics that are very likely to be discussed in more depth by further researchers related to the theme of the coalition of political parties in election.

Pre-electoral coalitions of political parties form across a variety of elections contexts. The dominant theories contend that the nature of coalitions can be explained by the ideological proximity of coalition partners and the extent of the contribution that parties make. Parties also assess how trustworthy and reliable they believe potential coalition partners to be. When a party's contribution to thwarting a common opponent is taken into account, some potentially plausible coalitions fail to form due to a lack of trust or form despite ideological disagreements (Bruhn, 2021). The political parties that form coalition administrations in many Western democracies lay down their policy goals in coalition agreements, which severely limit any further legislative action by the government. Coalition agreements are desirable papers for policy advocates to influence because of their impact on future policymaking (Schermann & Ennsner-Jedenastik, 2014; Zubek & Klüver, 2015).

Many studies on political party coalitions have been carried out, research from Decker & Adorf, (2018) explain about coalition politics in the crisis, the German party system before and after the 2017 Federal Election. Six parties were able to win entry into the Bundestag in the 2017 federal election, illuminating the transformation of Germany's political party system. Research from Hiller, (2018), this article examined the impact of coalition announcements on the parties' negotiating position following the 2013 German Federal Election using the value of excluded coalitions. More specifically, we estimate the distribution of power in the potential

German governing coalitions based on polling conducted in the run-up to the election.

Then, research from Morini & Loveless, (2021), Examine the electoral results of established and emerging parties that join and depart from grand alliances. Major parties don't seem to form large coalitions following unfavorable election outcomes, according to the study. Research from Moeis & Sutrisno, (2019) explain regional election 2018 Social Network Analysis, Towards National Coalition in the 2019 Indonesian General Election. Parties are looking for the best possible configuration to increase the likelihood that their coalitional presidential candidate will win as well as to increase electability in legislative elections due to the coattail effect. Research from Haselmayer & Jenny, (2018) explain Negative campaigning among coalition partners. Although coalition parties frequently criticize one another, they avoid "burning bridges" with their allies by launching vicious attacks. These findings have repercussions for the study of coalition politics and negative campaigning.

Based on previous research that has been done, the focus can be classified, namely on coalition politics in the crisis, social network analysis towards national coalition, and negative campaigning among coalition partners. Therefore, this research focuses more on mapping and describes research topics that are very likely to be discussed in more depth about this theme. This is important because there has been no other research that has comprehensively focused on discussing it from this point of view, so at this point it becomes a novelty in this research. Therefore, this study aims to explain the dynamics of political parties around the world by mapping research global with the theme The political parties coalition behaviour in election through the scopus database from 2016-2022.

Then, Sona N Golder, (2005) work on the subject of pre-election coalitions is the most thorough. She contends that there is an institutional structure that fosters incentives for coalitions. Systems that favor bigger parties but have a lot of parties (like in federal systems), such as plurality or majoritarian systems, produce more pre-election alliances. In parliamentary systems, many studies have shown that political parties are motivated to join pre-coalition to influence policy decisions and secure office positions (Shin, 2019). In presidential democracies, recent work has emphasized that the promise of unreliable executive candidates to political party partner candidates reduces office incentives for the latter to form pre-election coalitions. Policy incentives can still be obtained, at least when policy agreements among pre-election coalition members are publicized during the campaign (Kellam, 2017).

There are various reasons why political party coalitions are formed. Two basic hypotheses are put out by the literature, each of which is based on a somewhat different assumption on the primary goals of the parties. First, coalition partners should be predicted by ideological affinity between parties if parties are primarily interested in pursuing policies. Second,

political parties as job seekers and show size as the primary indicator of coalition involvement. When parties can provide a significant number of seats to create a governing majority, they join coalitions. political parties expect the coalition not to cost them any side payments (such as cabinet portfolios), they should try to minimize costs by including only those parties necessary to establish a legislative majority(Hiller, 2018). Third, coalitions of political parties are formed when the participating parties have at least a minimum level of trust in their potential partners. The method used most often in political science assessing citizen trust as a quality based on evaluation; thus, citizens “give and withhold confidence in politics based on an assessment of its merits”. Citizens are more likely to trust a political system when it delivers the benefits they expect. On the other hand, when a political system is underperforming, we can expect citizens to trust it less(Van der Meer & Hakhverdian, 2017).

More than that, meta-analysis is often defined as a study that reviews a particular topic descriptively, the purpose of meta-analysis is to analyze the test results of previous studies through qualitative and quantitative methods to summarize the findings(Smets & van Ham, 2013). A technique called "meta-analysis" systematically combines the findings of earlier research to assess the scope and consistency of an effect(Zoizner, 2021). Its capacity to undertake moderator analyses outside of a single context and to integrate prior findings is one of its key benefits. Thus, even when compared to comparative studies, which look at the same effect across different countries or political systems but typically within the same context, it boosts the generalizability of the conclusions(Schuck et al., 2013).

Comparing meta-analysis research to traditional or narrative literature reviews reveals several advantages. Results are more reliable when earlier research is included (the total number of studies included in a meta-analysis is its effective sample size)(Cancela & Geys, 2016). Meta-analysis offers the advantage of generating an average impact size as a consequence, as opposed to concentrating only or largely on the significance of results (the latter, of course, is dependent on sample size)(Van der Pas & Aaldering, 2020). Meta-analysis "useful in revealing gaps in the literature, providing insight into new paths for research, and finding mediating or interactional correlations or trends either too subtle to observe or that cannot be hypothesized and verified in individual studies," according to the authors. Therefore, there is sufficient basis for a meta-analysis of political advertising's effects(Copeland & Boulianne, 2022).

This study uses a scoping review method. Scoping reviews is a method for identifying knowledge gaps, describing a corpus of literature, elaborating on ideas, or looking into research practices. Scoping reviews can be used to validate the applicability of inclusion criteria and prospective questions and may be beneficial predecessors to systematic reviews(Munn et al., 2018). In a meta-analysis, data from a primary,

secondary, or tertiary publication covering a specific time period can be retrieved and examined from a variety of perspectives to ascertain the institution's article distribution, authorship patterns, citation patterns, and article length. Items are distributed, articles are broken down by topic, and many other bibliographic characteristics(Panda et al., 2013).

The source of this research data comes from the Scopus database. This study uses the Scopus search engine to identify research related to the coalition of political parties in election from 2016 to 2022. The reason for this time span is because the process of coalition of political parties in elections in various parts of the world is dynamic. The rapid development of information technology has become one of the factors in the formation of coalitions of political parties in the digital era, changing from the old paradigm. Search results from the scopus database, research related to this theme as many as 393 documents. The main resource for studies that evaluate scientific research is now the Scopus database. Scopus can accurately index scientific literature to offer details on each scientific article's metadata, including publication information, abstracts, references, and other information because it is one of the largest data centers in the world(Mongeon & Paul-Hus, 2016).

This study uses analysis features in the Scopus database to obtain bibliographic data from articles with the theme of the coalition of political parties in election. Meanwhile, to visualize keywords based on network, density and overlay, this study uses VOSviewers software. The goal is to get keywords that are strongly related to the theme, then map out topics that have a great opportunity to be researched further related to the theme and find countries that discuss the theme. A software program for creating and visualizing bibliometric networks is called VOSviewer (Febriyanti & Zubaidah, 2023). The visual depiction of bibliometric maps is a focus of VOSviewer software(Van Eck & Waltman, 2010). Figure 1 show the stages of data collection and processing in this study.

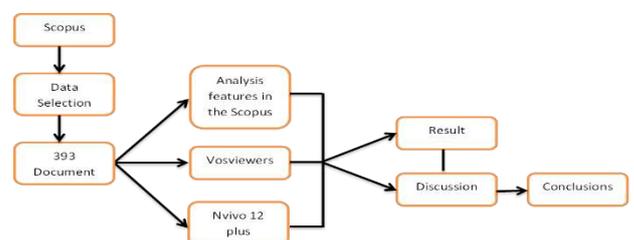


Figure 1. Research Stage

2. Result

Bibliographic Mapping in Worldwide Research

The results of the data from the Scopus database produced 393 documents with the theme of political party coalitions from 2016 to 2022. The data can be displayed and analyzed to produce significant findings on the focus of the study on political parties. Moreover, the data will also be useful for explaining the trend of

global publications about coalitions of political parties indexed by Scopus. It aims to understand how the development of the theme in the constellation of world research. Based on the data obtained from 393 documents, in the early part of this research will map the publications per year, publication sources, most contributing countries, authors and affiliations. Figure 2 shows the number of document publications per year from 2016-2022 with the theme of coalition of political parties indexed by Scopus.

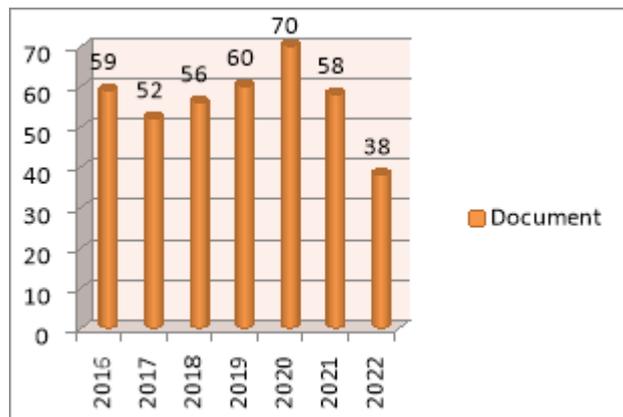


Figure 2. Document by years

Figure 2 shows that in 2016 global publications with the theme of coalition research of political parties indexed by Scopus were 59, then in 2017 there were 52 documents. Furthermore, in 2018 publications increased to 56 documents, and again increased in 2019 to as many as 60 documents. In 2020, it is the time to have research publications on coalitions of political parties with the highest Scopus index, which is as many as 70 documents. Furthermore, in 2021 there will be a decrease, which is 58 documents and again in 2022, which is 38 documents.

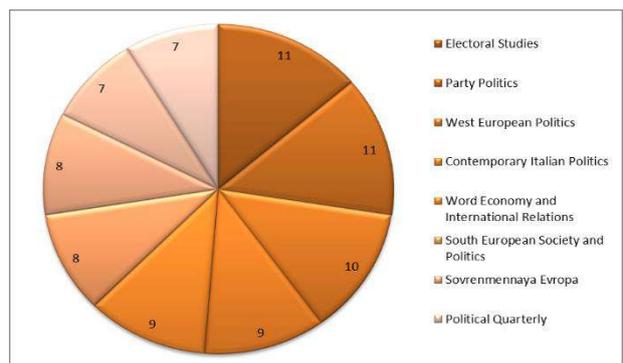


Figure 3. Document by Source

Figure 3 shows the top 9 journal sources that publish global research on political party coalitions from 2016-2022 indexed by Scopus. Electoral studies and Party Politics are the highest sources of journals publishing articles with the theme of coalitions of political parties, each of which has 11 documents. Then, West European Politics published 10 documents, Contemporary Italian Politics had 9 documents, Word Economy and International Relations 9 documents.

Furthermore, the South European Society and Politics has 8 documents, Sovrenmennaya Evropa also has 8 documents. Lastly, Political Quarterly only publishes 7 documents and Regional and Federal also has 7 documents.

Then, this study found that Electoral Studies and Party Politic became the source of the journal with the highest contribution in publishing research on coalitions of political parties from 2016 to 2022 indexed by Scopus. This is indeed an important finding, because it will become a very fundamental reference for academics, especially in the field of political party studies, to publish their research in the two journals. Because these two journals have proven to be the highest sources of publication in the focus of the study, they are also reputable journals. Electoral Studies is a journal indexed Q1 Scopus(Scimago, 2022a). Electoral Studies is an international publication devoted to the study of elections and voting in various parts of the world, according to its objectives and domain of study. Electoral Studies has been published for more than 35 years and has built a solid reputation as a leading journal in the area. It offers a venue for the investigation of subjects like turnout, voting behavior, campaigns, political parties, and electoral systems, among many others. It publishes theoretically informed and empirically sound research on all aspects of elections. Numerous new democracies that have recently emerged around the world offer a wealth of fresh data and opportunities to test theories(Sciencedirect, 2022).

Likewise with Party Politics which is an indexed journal Q1 Scopus (Scimago, 2022b). Considering the objectives and reach of party politics, especially every democratic political system is fundamentally based on political parties, and given the frequent and dramatic changes that the political landscape undergoes, the study of political parties' role and structure is one of the most active fields of research today. Peer-reviewed publication Party Politics is devoted to the study of this crucial area of political science. This esteemed publication provides a forum for the analysis of political parties, including their historical evolution, structure, policy agendas, ideology, electoral and campaign tactics, and their role within the many national and international political systems of which they are a part(Sagepub, 2022).

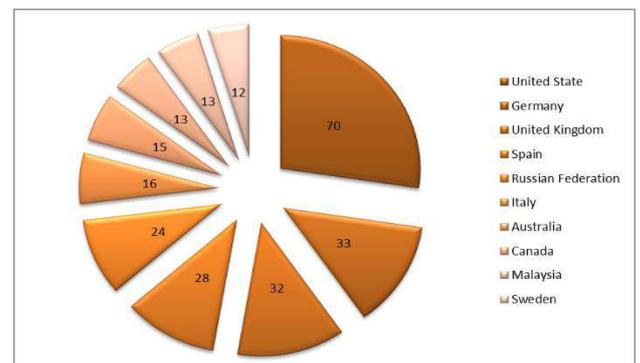


Figure 4. Document by Country

Figure 4 shows the top 10 countries that contributed the most to the publication of research on political party coalitions from 2016 to 2022 indexed by Scopus. United State is the country with the highest contribution in scientific publications of research on coalitions of political parties with 70 documents. Followed by Germany which has 33 documents, United Kingdom has 32 documents published. Furthermore, Spain has a Scopus indexed publication of 28 political party coalitions. The Russian Federation has 24 documents, the State of Italy has 16 documents. Then, Australia has 15 documents, Canada has 13 documents published. Finally, Malaysia has 13 documents and Sweden has 12 documents.

Furthermore, this study found that the country that contributed the most to the publication of research with the theme of political party coalitions from 2016 to 2022 which was indexed by the Scopus was the United States. This finding is in line with the data which states that the academic world of research in the United States is very secure. One of the keys to the success of the United States as a developed country is the progress of its research world. The United States devoted 2.8% of GDP to research and development (R&D) in 2012. The private sector accounts for two-thirds of the total. Uncle Sam's country is said to have a research budget of USD 511 billion(Ananda, 2021).

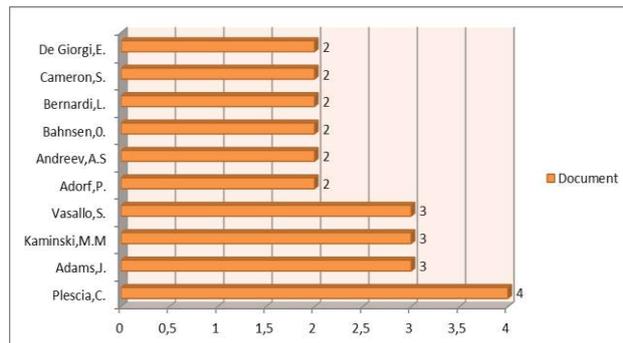


Figure 5. Document by Author

Figure 5 shows the top 10 most influential authors in scientific publications about political party coalitions from 2016 to 2022 indexed by Scopus. Plescia, C. is the author who publishes the most research on the theme of political party coalitions, which are 4 documents. Followed by Adam, J with 3 documents, Kaminski, M.M has 3 documents published, Vassallo, S also has 3 scientific research publication documents indexed by Scopus. Then, Adorf, P has 2 documents published, Andreev, A.S has 2 documents, Bahnsen, O has 2 documents, Bernardi, L has 2 documents, Cameron, S has 2 documents and De Giorgi, E also has 2 documents.

Then, the findings in this study are that Plescia, C. is the most influential writer in research with the theme of political party coalitions. This finding can have implications for the world's academic world, because the expertise of an academic can be measured by how much that person conducts research and publishes the results of his research in a particular theme. Some of his research

entitled "Losers together? Grand coalitions in the EU member states"(Morini & Loveless, 2021). Research entitled "On the nature of voters' coalition preferences"(Plescia & Aichholzer, 2017). Furthermore, research entitled "When Marriage Gets Hard: Intra-Coalition Conflict and Electoral Accountability"(Plescia & Kritzinger, 2022). Research entitled "Coalitions in the news: How saliency and tone in news coverage influence voters' preferences and expectations about coalitions(Eberl & Plescia, 2018) and etc.

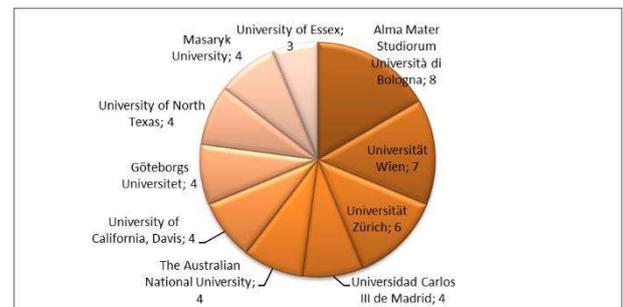


Figure 6. Document by Affiliation

Figure 6 shows the top 10 affiliates who contributed the most to scientific publications with the theme of political party coalitions from 2016 to 2022 indexed by Scopus. Alma Mater Studiorum Università di Bologna is the affiliate with the highest contribution, which has 8 documents. Followed by Universität Wien which has 7 documents, Universität Zürich with 6 documents. Then, Universidad Carlos III de Madrid has 4 documents, The Australian National University has 4 documents. Furthermore, the University of California, Davis, also has 4 documents, Göteborgs Universitet publishes 4 research documents, the University of North Texas has 4 documents. Lastly, Masaryk University has 4 documents and the University of Essex also has 4 documents.

Furthermore, this study is that Alma Mater Studiorum Università di Bologna is the affiliate with the highest contribution in publishing research with the theme of political party coalitions from 2016 to 2022 which is indexed by Scopus. The oldest university in the Western world, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, has led the path for innovation with the help of an ever-expanding program catalog, cutting-edge research, a persuading third purpose approach, and a widening global outlook. The University of Bologna has been centered on the needs of its students since its founding in 1088, and thanks to its five campuses (in Bologna, Cesena, Forl, Ravenna, and Rimini), as well as its branch in Buenos Aires, it provides its students with a diverse course catalog that is suited to the demands of contemporary society: over 200 degree programs within its 32 departments and 5 schools. The Alma Mater is one of Italy's major universities with a student body of over 85,000. It also ranks first in Italy for the number of exchange students it sends abroad and is in the top 5 universities in Europe for this measure. In addition, important worldwide rankings place the University of

Bologna among the top 5 Italian universities (QS, Shanghai, Times Higher Education, GreenMetric) (topuniversities, 2022).

The keywords are political economy, voting and government.

Visualization of networks, overlays, and density of the Coalition of Political Parties in Elections

This study seeks to display networks, overlays, and density of the coalition of political parties in electors. Networks visualizations is a way to display a network of keywords about the coalition of political parties interconnected. Then, overlays seeks to show the research trend from year to year. Meanwhile, Density aims to explain topics that still have a great opportunity to be examined related to the theme of the political party coalition. This study uses the number of keyword occurrences at least twice in all research publications included as analyzed using a VOSviewer.

Table 1. Occurrence and total link strength of keyword

No	Keywords	Occurence	Total link strenght
1	Voting Behavior	27	134
2	Electoral system	22	97
3	Democracy	25	85
4	Political Parties	42	68
5	Political ideology	13	67
6	Parliament	15	64
7	Political power	10	53
8	Government	13	52
9	Government formations	14	47
10	Political system	10	45

Table 1 shows the occurrence and total link strength of keywords with research on political party coalitions. Voting behavior is the strongest keyword with a total link strength of 134. Followed by the electoral system with a total link strength of 97, democracy with a total link strength of 85. Then, political parties with a total link strength of 68, political ideology with a figure of 67, parliament is 64, political power is 53. Furthermore, government with a total link strength of 52, government formation with a number of 47 and political system with a number of 45.

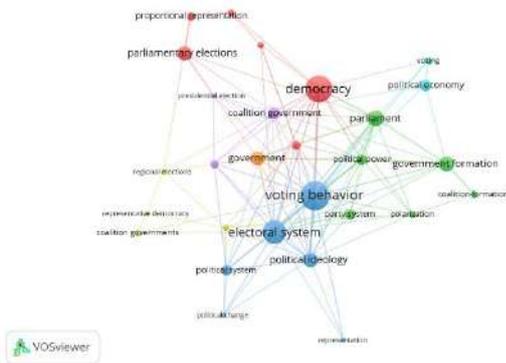


Figure 7. Network based on keyword

Figure 7 shows a network based on keywords from research on political party coalitions from 2016 to 2022 indexed by Scopus. Analysis using VOSviewer resulted in 7 clusters marked with color. Each cluster has a different color, this aims to make it easier to identify the network of these keywords. Cluster 1 has a red color which can be interpreted as a discussion about the government system. The keywords consist of authoritarianism, democracy, electoral coalition, leadership, parliamentary system and proportional representation. Then, cluster 2 is green which can be grouped with discussions about coalition dynamics. The keywords consist of coalition formation, government formation, parliament, party system, polarization, and political power.

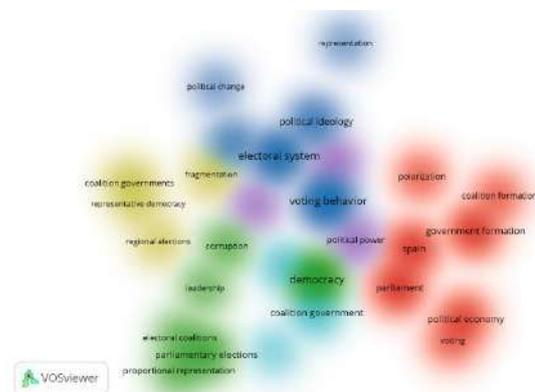


Figure 8. Density based on keyword

Figure 8 is the result of VOSviewer analysis using the density visualization feature. Density analysis in VOSviewer is a way to present topics that are often discussed and still have the opportunity to be discussed further in research with the theme of political party coalitions. In other words, density is used to search and find novelty for further research related to the theme of political party coalitions. In the concept of using density in VOSviewer, it can be identified that the red color indicates that the topic is most often discussed, while the green color is a topic that has not been studied much, which can then be a finding for further research.

Cluster 3 has a blue color with groupings that discuss electoral dynamics. The keywords consist of the electoral system, political change, political ideology, political system, representation, and voting behavior. Cluster 4 in yellow and cluster 5 in purple can be grouped together in the discussion of election level dynamics. The keywords consist of coalition government, fragmentation, regional election, presidential election and political conflict. Furthermore, cluster 6 has a light blue color and cluster 7 has an orange color. These two clusters can be grouped in the political vote discussion.

Figure 8 shows that the topics in red are coalition formation, government formation, polarization, parliament, political economy and voting. This means

that the topic has often been discussed in research on the theme of political party coalitions. While the topics in green are democracy, electoral coalition, parliamentary elections, proportional representation, leadership and corruption. These topics have a great opportunity to be discussed further in the context of research with the theme of political party coalitions.

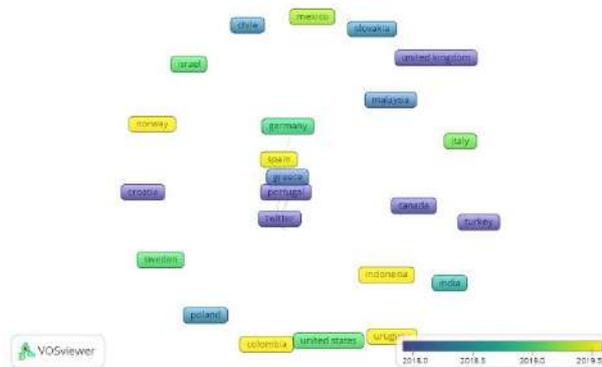


Figure 9. Overlay based on Country

Figure 9 shows the results of the VOSviewer analysis with the overlay visualization feature. The purpose of this analysis is to map trends in research on coalitions of political parties from 2016 to 2022 indexed by Scopus by country. It is understandable that which countries around the world are currently talking about coalitions of political parties, with the aim of finding that the theme is still developing in that country. Figure 9 shows that countries on three continents have recently concentrated on research with the theme of political party coalitions. The yellow color on the results of the density analysis shows that on the Asian continent there are Indonesia, the European continent has Spain and Norway and the Americas has Colombia and Uruguay.

3. Discussion

Research publications with the theme of political party coalitions from 2016 to 2022 which are indexed by Scopus, the data findings in figure 1 show that 2020 is the time with the highest publication documents. These findings are directly proportional to the holding of elections in 2020 around the world and their relationship to the process of forming a coalition of political parties. Coalition of political parties cannot be separated from elections, because the coalition formation process is carried out with the aim of gaining power between political parties to face the implementation of elections (Meriläinen & Tukiainen, 2021). The interesting thing is that in 2020 countries around the world are grappling with the COVID-19 virus. However, some countries are still able to hold elections. The Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) in its report states that there are 23 countries holding elections in 2020 (Bicu & Peter, 2021).

The holding of elections in the COVID-19 pandemic has the potential to reshape political dynamics, especially political party coalitions. The political

landscape will change significantly if mass casualty events occur especially for a sustained period of time. The political landscape is very complex, economic factors, perceptions of leadership at various levels of government, and cooperation between political parties ultimately contribute to the election results (Johnson et al., 2020). The multi-party system in a country is a driving force for coalitions. Political parties need partners to increase their power in elections. Ideologically, it is also the reason for the formation of a coalition of political parties. Although, the trend of political parties in various countries lately places more pragmatic reasons for just pursuing power in the goal of forming coalitions (Kalaycıoğlu, 2016).

Figure 7 and table 1 show the findings that voting behavior is a topic that has a strong relationship with the research theme of political party coalitions. Political party coalitions influence voting behavior through two different signaling processes. Coalition signals both change how parties' ideologies are viewed and prioritize coalition interests over party interests. The first to examine a different theory of how coalition signals impact voting. According to this coalition expectation mechanism, coalition signals influence voters' choices at the polls by altering their perceptions of the coalitions that will probably emerge following the election. Additionally, the first comprehensive analysis of each of the three pathways connecting coalition signals to individual voting behavior (Bahnsen et al., 2020). Signals of political party coalitions influence voting behavior. According to this process, coalition signals alter the usefulness of voting through changing voter knowledge. Voters who are being logical should consider this while evaluating the likelihood of creating a different coalition after the election if campaign remarks indicate that parties prefer certain coalitions over others (Duch et al., 2010).

Then, the research theme about political party coalitions has a strong relationship with the topic of the electoral system. This finding is important, because it can serve as a form of reference that the electoral system has an influence on the dynamics of political parties. The electoral incentives and - more often than not - disincentives for coalition building in presidential elections are the main subject of the study of electoral coalitions under presidential systems. Given that many presidential systems feature several political parties and since presidential elections are inherently unjust, one may anticipate that pre-election coalitions are frequently formed. In presidential elections, plurality electoral laws promote electoral coordination through pre-election coalitions (Kellam, 2017). Presidential pre-electoral coalitions always involve a nomination agreement, unlike certain legislative pre-election coalitions when the parties present separate electoral lists and merely declare that they want to govern together if given the chance (Renwick & Pilet, 2016).

More than that, figure 8 shows the finding that from the theme of the coalition of political parties, a topic that has the opportunity to be used as a novelty for further research is about parliamentary elections and proportional representation. The spoiling process for parliamentary elections is straightforward. Political parties from two or more comparable rivaling coalitions may engage in play without allowing the other to pass (Amaliatulwalidain et al., 2022; Bulqiyah et al., 2023). They lose as a result of splitting the vote, making a different party the winner. In a slightly different scenario, a little rival may deprive a potential victor of enough votes to render him a loser (Kaminski, 2018). Factors that operate at two different levels might be linked to the political desire for the adoption of proportional representation. At the level of the party, there is one set of concerns in play (Putra, 2023). Partisan opinions on whether it is desirable to change the election rules are impacted by disparities in how votes are translated into seats and views of potential gains in the allocation of seats under the new electoral rules. These elements account for the differences in viewpoints among right-leaning parties as well as the position of Social Democratic parties regarding electoral reform. Politicians are affected by a second set of variables that operate at the election district level (Leemann & Mares, 2014).

Then, regarding the findings of this study about countries that have recently paid attention to research on political party coalitions, namely from three different continents. Indonesia, Spain, Norway, Uruguay and Colombia are the countries that are currently focusing on the research theme. This finding can actually be studied that these countries adhere to an electoral system that automatically has a struggle between political parties. Thus, that academics in the country pay more attention to the theme of the coalition of political parties as a discussion of its dynamics. As an illustration, in context of Indonesia, research from (Lewis, 2020) find that candidates supported by pra election coalitions made up of political parties with council seat share percentages above first-round mayoral electoral vote thresholds have an advantage of 14 to 18 percentage points over candidates supported by smaller pra election coalitions in those elections. The analysis finds that, despite having no discernible effect on the electoral success of incumbents, pra elections coalitions are particularly effective in helping non-incumbent candidates win office. Therefore, pra election coalitions can help candidates win elections, but they are formed in corrupt environments.

In the end, governance problems relating to the creation and operation of pra election coalitions place heavy restrictions on the growth of local democracy in Indonesia. Shows at intermediate degrees of informational uncertainty, coalition governments are most stable and long-lasting. Voters' votes are too widely dispersed when they have very little knowledge of the

parties, which prevents the creation of strong majorities. Additionally, with a similar overall effect, voters with very specific perceptions of the parties will group together in tiny electoral niches.

4. Conclusion

The conclusion in this study is that the publication of research on coalitions of political parties around the world has experienced a very significant development. In the last seven years, no less than 35 articles have been published in reputable journals indexed by Scopus. The theme of the dynamics of political parties, in this case in particular the discussion of coalitions of political parties, still has a high level of interest in the world of academics. What's more, the increasingly complex dynamics of world politics related to political parties are accompanied by rapid technological advances. Thus, political changes become so fast that it is also unavoidable.

Furthermore, the coalition behavior of political parties will not be separated from the topic of voting behavior and the electoral system, this is evident in this study. The political parties in building coalitions must consider the level of electability by looking at behavior in the voters. Moreover, the electoral system will determine whether political parties need to form coalitions or not if they want to participate in electoral contestation. Furthermore, parliamentary elections and proportional representation are topics that have opportunities as novelties for future research related to this themes. Furthermore, Indonesia (southeast asia), Spain, Norway (Europa), Uruguay and Colombia (South America) have recently paid great attention to research on the political parties coalition behavior.

The implications of the findings of this study are as a form of a reference for knowledge regarding the study of political parties. More than that, it is important to describe these findings because they can classify world research which so far has only been limited to individual findings. However, this study has limitations, namely the data source only takes from Scopus. So the recommendation for further research is to use other databases such as the Web of Science as an additional data source, in order to get a more comprehensive discussion.

References

- Amaliatulwalidain, Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 40–46.
- Ananda, F. R. (2021). *Daftar negara yang Jadikan Riset Sebagai Panglima Sains*. Okezone.Com.

- Bahnson, O., Gschwend, T., & Stoetzer, L. F. (2020). How do coalition signals shape voting behavior? Revealing the mediating role of coalition expectations. *Electoral Studies*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102166>
- Bicu, I., & Peter, W. P. (2021). *Elections during COVID-19: considerations on how to proceed with caution BY*. Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- Bruhn, K. (2021). When opposites attract: Electoral coalitions and alliance politics in Mexico. *Mexican Studies - Estudios Mexicanos*, 37(3), 451–475. <https://doi.org/10.1525/msem.2021.37.3.451>
- Bulqiyah, H., Kartikasari, D. W., Ans, P., & Taek, G. (2023). Karakter Pemilih Pemula di Kabupaten Tuban : Adaptasi Budaya Politik Sekolah. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 87–93.
- Cancela, J., & Geys, B. (2016). Explaining voter turnout: A meta-analysis of national and subnational elections. *Electoral Studies*, 42, 264–275.
- Copeland, L., & Boulianne, S. (2022). Political consumerism: A meta-analysis. *International Political Science Review*, 43(1), 3–18.
- Decker, F., & Adorf, P. (2018). Coalition politics in crisis?: The German Party System before and after the 2017 federal election. *German Politics and Society*, 36(2), 5–26. <https://doi.org/10.3167/gps.2018.360202>
- Duch, R. M., May, J., & Armstrong, D. A. (2010). Coalition-directed voting in multiparty democracies. *American Political Science Review*, 104(4), 698–719. <https://doi.org/10.1017/S0003055410000420>
- Eberl, J.-M., & Plescia, C. (2018). Coalitions in the news: How saliency and tone in news coverage influence voters' preferences and expectations about coalitions. *Electoral Studies*, 55, 30–39. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.07.004>
- Febriyanti, D., & Zubaidah, S. (2023). Bibliometrik Pengukuran dan Manajemen Kinerja di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 55–59.
- Golder, S. N. (2005). Pre-electoral coalitions in comparative perspective: A test of existing hypotheses. *Electoral Studies*, 24(4), 643–663.
- Haselmayer, M., & Jenny, M. (2018). Friendly fire? Negative campaigning among coalition partners. *Research and Politics*, 5(3), 1–9. <https://doi.org/10.1177/2053168018796911>
- Hendrawan, A., Berenschot, W., & Aspinall, E. (2021). Parties as pay-off seekers: Pre-electoral coalitions in a patronage democracy. *Electoral Studies*, 69(November 2019), 102238. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102238>
- Hiller, T. (2018). Excluded coalitions and the 2013 German federal election. *Applied Economics Letters*, 25(13), 936–940. <https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1386275>
- Johnson, A. F., Pollock, W., & Rauhaus, B. (2020). Mass casualty event scenarios and political shifts: 2020 election outcomes and the US COVID-19 pandemic. *Administrative Theory & Praxis*, 42(2), 249–264. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1752978>
- Kalaycioğlu, E. (2016). The conundrum of coalition politics in Turkey. *Turkish Studies*, 17(1), 31–38. <https://doi.org/10.1080/14683849.2015.1136087>
- Kaminski, M. M. (2018). Spoiler effects in proportional representation systems: evidence from eight Polish parliamentary elections, 1991–2015. *Public Choice*, 176(3–4), 441–460. <https://doi.org/10.1007/s11127-018-0565-x>
- Kellam, M. (2017). Why pre-electoral coalitions in presidential systems? *British Journal of Political Science*, 47(2), 391–411.
- Leemann, L., & Mares, I. (2014). The adoption of proportional representation. *Journal of Politics*, 76(2), 461–478. <https://doi.org/10.1017/S0022381613001394>
- Lewis, B. D. (2020). How do mayors get elected? The causal effects of pre-electoral coalitions on mayoral election outcomes in Indonesia. *Local Government Studies*, 46(3), 394–413. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1627334>
- Meriläinen, J., & Tukiainen, J. (2021). The Advantage of Incumbents in Coalitional Bargaining. *Legislative Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/lsq.12362>
- Moeis, A. O., & Sutrisno, A. (2019). Social network analysis of the pilkada serentak 2018: Towards national coalition in the 2019 indonesia's general election. *2019 Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering, APCoRISE 2019*, 2019–2022. <https://doi.org/10.1109/APCoRISE46197.2019.9318927>

- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. *Scientometrics*, *106*(1), 213–228.
- Morini, M., & Loveless, M. (2021). Losers together? Grand coalitions in the EU member states. *Rivista Italiana Di Scienza Politica*, *51*(3), 404–418. <https://doi.org/10.1017/ipo.2021.12>
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, *18*(1), 1–7.
- Panda, I., Maharana, B., & Chhatar, D. C. (2013). The journal of information literacy: A bibliometric study. *International Journal of Scientific and Research Publications*, *3*(3), 1–7.
- Plescia, C., & Aichholzer, J. (2017). On the nature of voters' coalition preferences. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, *27*(3), 254–273. <https://doi.org/10.1080/17457289.2016.1270286>
- Plescia, C., & Kritzinger, S. (2022). When Marriage Gets Hard: Intra-Coalition Conflict and Electoral Accountability. *Comparative Political Studies*, *55*(1), 32–59. <https://doi.org/10.1177/00104140211024307>
- Putra, H. P. (2023). Pengaruh Isu Kampanye Terhadap Preferensi Pemilih Milenial Pada Pemilu Tahun 2019 Di Sumatera Barat. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(2), 115–122.
- Renwick, A., & Pilet, J.-B. (2016). *Faces on the ballot: The personalization of electoral systems in Europe*. Oxford University Press.
- Sagepub. (2022). *Aims and Scope*. Journals.Sagepub.Com.
- Schermann, K., & Ennsner-Jedenastik, L. (2014). Coalition policy-making under constraints: Examining the role of preferences and institutions. *West European Politics*, *37*(3), 564–583.
- Schuck, A. R. T., Boomgaarden, H. G., & de Vreese, C. H. (2013). Cynics all around? The impact of election news on political cynicism in comparative perspective. *Journal of Communication*, *63*(2), 287–311.
- Sciedirect. (2022). *Aims and scope*. Sciedirect.Com.
- Scimago. (2022a). *Electoral Studies*. Scimagojr.Com.
- Scimago. (2022b). *Party Politics*. Scimagojr.Com.
- Shin, E. (2019). A model of pre-electoral coalition formation. *Games and Economic Behavior*, *118*, 463–485.
- Smets, K., & van Ham, C. (2013). The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-level research on voter turnout. *Electoral Studies*, *32*(2), 344–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.12.006>
- topuniversities. (2022). *About Alma Mater Studiorum - University of Bologna*. Topuniversities.Com.
- Van der Meer, T., & Hakhverdian, A. (2017). Political trust as the evaluation of process and performance: A cross-national study of 42 European countries. *Political Studies*, *65*(1), 81–102.
- Van der Pas, D. J., & Aaldering, L. (2020). Gender differences in political media coverage: A meta-analysis. *Journal of Communication*, *70*(1), 114–143.
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, *84*(2), 523–538. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Zoizner, A. (2021). The Consequences of Strategic News Coverage for Democracy: A Meta-Analysis. *Communication Research*, *48*(1), 3–25. <https://doi.org/10.1177/0093650218808691>
- Zubek, R., & Klüver, H. (2015). Legislative pledges and coalition government. *Party Politics*, *21*(4), 603–614.

Implementasi Kebijakan *City Branding* Madiun Kota Pendekar dan Dampaknya bagi Kota Madiun

Sunarso¹⁾, Abdul Halim²⁾, Mai Puspadya Bilyastuti³⁾, Ester Kristanti Setyaningtyas⁴⁾

^{1), 2), 3), 4)} Prodi Ilmu Administrasi Negara, PDKU Kabupaten Ponorogo, Universitas Merdeka Malang
Email Koresponden : mai.bilyastuti@unmer.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the strategy for implementing the city branding policy for Madiun, the City of Pendekar and its impact on the City of Madiun. This type of research is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques were carried out through observation techniques, in-depth interviews and documentation studies. Then for data analysis, the researcher did it in the following stages: (a) data collection; (b) data assessment; (c) data interpretation; and (d) data inference. The results showed that the implementation of the city branding policy for Madiun City Pendekar was well implemented through several program strategies, namely: 1) making the Madiun City Pendekar logo and clothing; 2) identity development through warrior statues; 3) Development of the Pencak Silat Gallery; 4) the Friends of Pencak Silat program; 5) organizing pencak silat events; and 6) empowering youth communities and the creative economy. The city branding policy of Madiun City of Pendekar has had a positive impact, namely improving communication between silat schools, increasing security and public order, and providing support for city tour policies. However, this positive impact is considered not optimal because clashes or brawls between silat schools still occur at low intensity.

Keywords : Policy Implementation, City Branding, Impact

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi implementasi kebijakan *city branding* Madiun Kota Pendekar dan dampaknya bagi Kota Madiun. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Kemudian untuk analisis data, peneliti melakukannya dengan tahapan sebagai berikut: (a) pengumpulan data; (b) penilaian data; (c) penafsiran data; dan (d) inferensi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *city branding* Madiun Kota Pendekar dilaksanakan dengan baik melalui beberapa strategi program, yaitu: 1) pembuatan logo dan busana khas Madiun Kota Pendekar; 2) pengembangan identitas melalui patung pendekar; 3) Pembangunan Galeri Pencak Silat; 4) program Sahabat Pencak Silat; 5) menyelenggarakan event pencak silat; dan 6) pemberdayaan komunitas pemuda dan ekonomi kreatif. Kebijakan *city branding* Madiun Kota Pendekar memberikan dampak positif, yaitu memperbaiki komunikasi antar perguruan silat, meningkatkannya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memberikan dukungan bagi kebijakan *city tour*. Namun dampak positif tersebut dinilai belum optimal karena *bentrokan* atau *tawuran* antar perguruan silat masih saja terjadi dalam intensitas yang kecil.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, City Branding, Dampak

1. Pendahuluan

Pencak silat merupakan seni bela diri yang menggabungkan bentuk gerakan tarian artistik yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti olahraga, kebatinan, seni dan pernapasan. Pencak silat asli yang ada di Kota Madiun sendiri sebenarnya mencakup gerakan dari beberapa wilayah yang ada di seluruh penjuru nusantara, seperti cimande dan silek (Nugroho et al., 2021). Bagi warga kota Madiun dan sekitarnya, pencak silat seolah merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap individu sebagai bentuk kemampuan ilmu bela diri. Pada dasarnya pencak silat mempunyai tujuan untuk pembelajaran atau pendidikan mental serta spiritual. Menjadi seorang pendekar silat harus bisa menjaga, melestarikan dan membela nilai-nilai dasar budayanya (Mulyana, 2013). Menurut penelusuran dan informasi dari berbagai sumber di Kota Madiun banyak lahir organisasi pencak silat yang besar seperti Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW), Setia Hati Tuhu Tekad (SHTT), Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS PI) Kera Sakti, Perguruan Ki Ageng Pandan Alas, Persaudaraan Setia Hati Pilangbango, Persaudaraan Pangastuti Tundung Madiun, dan Pro Patria. Selain ke delapan organisasi pencak silat tersebut, masih ada beberapa perguruan silat yang berasal dari luar Kota Madiun seperti: Persaudaraan Sejati, Persinas ASAD, Merpati Putih, Pagar Nusa, Cempaka Putih, Perisai Diri, dan Tapak Suci.

Setiap orang yang belajar pada perguruan pencak silat diharapkan dapat dan terus mendulang prestasi pada bidang olah raga, baik dikancah Nasional maupun Internasional. Namun, keinginan dan cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud sampai dengan sekarang. Dengan banyak berdirinya perguruan pencak silat di Kota Madiun yang masing-masing memiliki lambang berbagai warna ternyata juga menimbulkan masalah sosial yaitu seringnya terjadi perkelahian antar kelompok anggota perguruan pencak silat. Sampai saat ini konflik tersebut pun masih terjadi, namun secara intensitas telah berkurang. Namun demikian, tentunya juga masih dirasa sangat meresahkan serta tidak jarang juga menimbulkan kerugian dan korban yang dirasakan oleh masyarakat Kota Madiun (Sulistyono, 2014).

Salah satu kegiatan sakral yang dilakukan oleh para pesilat adalah berziarah ke makam pendiri. Tradisi *Suran Agung* adalah kegiatan ziarah ke makam pendiri perguruan silat khususnya PSHW dan PSHT, yang di dalamnya terdapat kegiatan silaturahmi antar anggota, konvoi dan atraksi seni untuk menarik simpati masyarakat. Tradisi ini sebenarnya mempunyai potensi wisata yang menarik akan tetapi dari tahun ke tahun masih diwarnai dengan bentrokan dari kedua perguruan. Sehingga *Suran Agung* belum bisa diangkat sebagai even wisata budaya yang bias dinikmati oleh masyarakat, melainkan justru identik dengan bentrokan dan tawuran antar perguruan silat. Apalagi di kota Madiun terdapat Padepokan Setia Hati Teratai Pusat se Indonesia bahkan sedunia sehingga pada malam *Suran Agung* kota Madiun benar-benar dipadati oleh pesilat dari seluruh pelosok

Indonesia termasuk dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Madiun untuk menjadikan Madiun sebagai tuan rumah perguruan silat yang ramah dan kondusif. Sehingga kota Madiun bukan saja kota destinasi berbelanja dan wisata saja melainkan juga menjadi rujukan dalam menimba ilmu bela diri silat.

Selain berziarah ke makam pendiri, dalam *Suran Agung* para pesilat PSHT mengadakan kegiatan *sah-sahan* di padepokan. Tradisi *sah-sahan* adalah sebuah acara pengukuhan bagi anggota atau murid PSHT yang telah menyelesaikan dan lulus serangkaian ujian untuk memperoleh “gelar” pendekar tingkat I (satu). Prosesi *sah-sahan* merupakan momen istimewa yang dinanti-nantikan setelah dalam waktu sekian lama para murid belajar ilmu silat, selain itu acara *sah-sahan* tersebut juga digunakan sebagai sarana silaturahmi antar pendekar serta menyambut datangnya saudara baru dalam naungan pencak silat (Sanjoyo et al., 2022).

Terjadinya gesekan atau bentrokan antar perguruan silat sebenarnya adalah sesuatu yang wajar, karena sebagaimana disebutkan oleh Mulyana di atas masing-masing aliran silat mempunyai kewajiban menjaga dan membela nilai-nilai dasar yang dianutnya. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga agar perbedaan itu tidak mengarah kepada terjadinya bentrokan atau tawuran yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan berbagai macam perguruan silat sebenarnya mengandung potensi positif yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kota Madiun yaitu membawa pencak silat semakin mendunia dan tentu saja kota Madiun semakin dikenal masyarakat Indonesia bahkan internasional. Apalagi seni bela diri pencak silat secara sah atau resmi telah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia melalui Sidang UNESCO ke 14 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, pada tanggal 9 sampai dengan 14 Desember 2019 (kemenlu.go.id). Oleh karena itu pencak silat adalah asli Indonesia, warisan budaya yang diakui secara global milik bangsa Indonesia, peninggalan kuno yang bukan hanya mengajarkan gerakan tubuh, akan tetapi juga mengajarkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, sesama manusia serta lingkungan melalui ajaran spiritualnya (Nugroho et al., 2021).

Sejak tahun 2019 yang lalu Kota Madiun memiliki pemimpin baru dalam lima tahun kedepan yaitu Drs. H. Maldi, S.H., M.M., M.Pd. sebagai Wali Kota Madiun dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB sebagai Wakil Wali Kota Madiun. Di bawah kepemimpinannya Daerah Kota Madiun mempunyai visi terwujudnya pemerintahan yang bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera (Perda Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2019). Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun yaitu mewujudkan Madiun sebagai Kota Pendekar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021. Melalui kebijakan *City Branding* Madiun Kota Pendekar yang dicetuskan tersebut bermaksud untuk mengubah stigma negatif Kota

Madiun yang identik dengan gesekan antar anggota perguruan pencak silat, juga untuk meningkatkan daya tarik kota Madiun dengan harapan kunjungan wisata meningkat, investasi masuk, berkembangnya sektor industri, sehingga akan mempengaruhi kemajuan daerah.

City Branding merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk membangun sebuah citra positif dari suatu daerah guna mempromosikan potensi daerah tersebut pada masyarakat umum (Yuli, 2011). Bagi Pemerintah Kota Madiun maksud *city branding* adalah memberikan identitas visual yang menggambarkan karakteristik, potensi, sejarah, karakter serta budaya masyarakat setempat atau masyarakat daerah. Dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2021 disebutkan bahwa tujuan atau maksud *city branding* yang pertama, adalah untuk mempromosikan potensi dan memberikan citra positif kepada daerah; dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah agar bersaing dan berkompetisi dengan daerah-daerah lain dalam mengembangkan potensi dan kunjungan wisata.

Sebelum Pemerintah Kota Madiun mencetuskan kebijakan *City Branding* Madiun Kota Pendekar, Pemkot juga telah melakukan serangkaian tahapan *conducting research* agar kebijakan ini dapat berjalan dengan sukses diantaranya yaitu : 1) melakukan pendekatan berupa dialog langsung melalui serangkaian rapat dan jaring pendapat; 2) mengedepankan konsep kearifan lokal serta melakukan promosi dengan membagi sasaran audiens; 3) menggunakan empat komponen utama yaitu *landmark*, *event*, *fesyen* dan logo sebagai pembentuk identitas branding; 4) tujuan utamanya ialah membangun ekosistem pariwisata, ekonomi kreatif serta menciptakan suasana Kota Madiun yang aman dan damai; dan 5) secara khusus menunjuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai *leading sectors* utama dalam kebijakan *City Branding* yaitu Disbudparpora, Diskominfo, serta Bappeda Kota Madiun (Aristono, 2021).

Atas dasar uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah strategi dalam implementasi kebijakan *City Branding* Madiun Kota Pendekar dan dampak apa saja yang ditimbulkan bagi Kota Madiun?

Tinjauan Pustaka

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik sebenarnya sudah dibahas dan dipertimbangkan sejak kebijakan itu dalam tahap perumusan dan pengesahan. Dalam tahap perumusan sudah diperkirakan beberapa faktor yang sekiranya bisa mendukung maupun faktor yang bisa menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian pada tahap pengesahan rancangan kebijakan itu diperdebatkan kembali oleh *policy maker*. Implementasi kebijakan yang baik adalah yang dilakukan sesuai dengan ukuran atau takaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kebijakan publik apapun mestinya mempunyai tujuan yang mulia, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat, baik lahir maupun batin. Suatu implementasi kebijakan yang baik adalah yang dilakukan melalui jalan yang sesuai dan bagaimana seharusnya untuk kepentingan rakyat. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perspektif kebijakan publik, melainkan dipandang dalam pengertian yang luas, yaitu mengorganisir dan menggerakkan seluruh badan pemerintah sebagai pelaku utama dan elemen-elemen masyarakat sebagai penerima kebijakan yang juga memberikan partisipasi untuk keberhasilan suatu kebijakan. Sehingga hakikatnya studi tentang kebijakan mencakup pertanyaan: apa, mengapa, siapa, dimana, dan bagaimana, dimana keseluruhan pertanyaan itu terkait permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi pengambil keputusan dan berkaitan dengan isi, cara ataupun prosedur yang telah ditentukan, strategi, waktu keputusan tersebut diambil serta dilaksanakan (Kencana, 2016).

Edward III memulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan apa yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal? Selanjutnya Edward III menjawab pertanyaan itu dengan mempertimbangkan 4 (empat) variabel, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi (Budi Winarno, 2007). Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam implementasi atau pelaksanaan tiap kebijakan adalah merupakan proses yang sifatnya dinamis serta meliputi banyak sekali interaksi dari berbagai macam variabel. Oleh karena itu diperlukan ketelitian menjelaskan bagaimana variabel-variabel itu saling berinteraksi dan pada gilirannya mempengaruhi proses implementasi.

Selanjutnya evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana efektif dan efisiensi program kebijakan mampu menyelesaikan berbagai masalah publik. Efektif berkenaan atau berkaitan dengan cara yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, sedangkan yang dimaksud efisien disini adalah menyangkut atau berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Apabila program-program kebijakan berhasil meraih dampak yang diinginkan maka rekomendasinya adalah terus menjalankan program kebijakan tersebut, sebaliknya apabila program-program itu gagal meraih dampak yang diharapkan maka rekomendasinya adalah merubah atau bahkan program kebijakan.

City branding adalah salah satu strategi pemasaran suatu kota untuk menciptakan posisi yang unggul dan kuat di kawasan dan dunia (Amalia et al., 2023). *City branding* yang sering disebut *smart branding* merupakan salah satu elemen dari *smart city* (kota pintar). Penetapan Madiun sebagai Kota Pendekar merupakan kebijakan yang kontroversi dan sekaligus inovatif. Karena selama ini di wilayah kota Madiun dan sekitarnya sering terjadi tawuran antar perguruan silat tapi justru ditonjolkan sebagai slogan bagi Pemkot, dan dengan harapan dapat menurunkan frekuensi tawuran serta menumbuhkan kebanggaan bagi warga kota. Selain

itu bisa dikatakan Smart branding merupakan inovasi dalam pemasaran daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing antar daerah melalui penerapan 3 (tiga) elemen, yaitu elemen pariwisata, elemen bisnis, dan elemen wajah kota (Nurdiassa et al., 2021).

Dalam pemerintahan daerah, figur Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) mempunyai peran sentral yang memberikan pengaruh proses kebijakan publik. Kepemimpinan Kepala Daerah berpengaruh terhadap perumusan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan. Dengan kepemimpinan atau *leadership* yang baik dan sesuai (*appropriate effective leadership*) maka akan terwujudlah dalam pelaksanaan kebijaksanaan itu peran serta atau partisipasi masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab yang tinggi (*creative participation*) atas dasar persetujuan, dukungan serta kepercayaan (H. Soenarko, 2005). Demikian juga dalam implementasi kebijakan *City Branding* Madiun Kota Pendekar akan bertumpu pada kepemimpinan Walikota Madiun, mengingat inisiasi kebijakan tersebut berasal dari pemikiran beliau.

Madiun Kota Pendekar adalah slogan yang untuk mewujudkan visi misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun. Pendekar merupakan akronim dari pintar, melayani, membangun, peduli, terbuka, dan karismatik menjadi pembeda dengan daerah lain. Berangkat dari pemikiran tersebut maka Wali Kota Madiun memiliki ide untuk menjadikan pencak silat menjadi ikon kota, dimana ide atau pemikiran tersebut didiskusikan dengan berbagai pihak terkait serta para stakeholder pencak silat di Kota Madiun. Hasil dari pembahasan dalam diskusi tersebut memunculkan rumusan-rumusan kebijakan yang selanjutnya akan menjadi berbagai program kerja. Hal inilah yang mendasari Pemerintah Kota Madiun mengangkat warisan budaya pencak silat sebagai upaya peningkatan citra daerah melalui kebijakan *City Branding* Madiun Kota Pendekar. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Madiun membuat berbagai strategi kebijakan terkait city branding tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara terperinci dari nara sumber yang akan digunakan peneliti sebagai pedoman untuk mengolah data guna menghasilkan penelitian yang objektif, selain itu studi kasus membutuhkan penggambaran metode melalui tinjauan literatur dan wawancara mendalam untuk memahami pengalaman, perspektif dan sudut pandang orang dalam situasi atau keadaan tertentu (Denzin & Lincoln, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dilengkapi dengan studi dokumentasi. Teknik observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dari *City Branding* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mendapatkan

informasi dan menggali data secara mendalam dari informan. Studi dokumentasi berupa dokumentasi hasil implementasi kebijakan *City Branding* yang telah dilaksanakan atau digunakan oleh Pemerintah Kota Madiun. Kemudian untuk analisis data, peneliti melakukannya dengan tahapan: (a) pengumpulan data; (b) penilaian terhadap data; (c) menginterpretasikan data; dan (d) penyimpulan data (Miles et al., 2019)

2. Pembahasan

Salah satu budaya asli Indonesia dengan keragaman yang sangat khas dalam perkembangannya di setiap daerah maupun setiap provinsi adalah pencak silat (Mizanudin et al., 2018). Dalam perkembangannya pencak silat di Provinsi Jawa Timur memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, dari zaman kerajaan hingga dengan sekarang. Perkembangan pencak silat di Provinsi Jawa Timur tidak hanya dari segi olahraga saja, akan tetapi juga dari aspek lainnya. Sejarah berkembangnya seni bela diri pencak silat di Kota Madiun yang merupakan salah satu kota yang lekat dengan pencak silat dimulai sejak tahun 1900an dan sampai dengan sekarang masih terjaga kelestariannya. Kota Madiun menjadi salah satu basis lahirnya berbagai jenis aliran perguruan pencak silat dan juga sebagai pusat perkembangan seni bela diri pencak silat di Indonesia (Utomo & Artono, 2017).

Seperti yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa di Kota Madiun tercatat empat belas perguruan pencak silat, dimana delapan perguruan pencak silat lahir dari bumi Kota Madiun dan enam lainnya adalah perguruan pencak silat dari luar Madiun yang ikut berkembang dan hidup berdampingan bersama perguruan asli dari Kota Madiun. Selain banyaknya perguruan pencak silat, Kota Madiun juga dikenal sebagai pusat padepokan pencak silat yang mempunyai anggota jutaan orang yang tersebar di penjuru dunia seperti: Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Padepokan Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) dan sebagainya. Dengan adanya padepokan-padepokan yang berdiri di Kota Madiun berdampak pada peningkatan kunjungan para pesilat dari luar daerah untuk mendatangi Kota Madiun. Sehingga diharapkan dapat melahirkan atau terciptanya sebuah wisata budaya baru yang dapat mempercepat program pengembangan wisata perkotaan atau *city tour*.

Pengangkatan pencak silat sebagai kebijakan *City Branding* dinilai tepat karena sarat dengan kearifan lokal dan dapat menjadi daya tarik masyarakat. Menurut Agus Purwowodagdo (Kepala Disbudparpora Pemkot Madiun) ada berbagai program yang dilaksanakan Pemkot Madiun untuk memperkuat dan memperkenalkan budaya pencak silat sebagai *City Branding* adalah sebagai berikut:

a) Penciptaan Logo dan Pakaian Khas Kota Pendekar

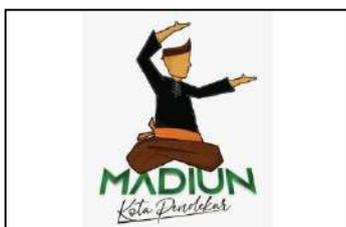
Dalam mewujudkan dan memperkenalkan sebuah merek branding diperlukan sebuah logo sebagai gambaran dan identitas pendukung dari sebuah produk (Hananto, 2019). Untuk itu, maka langkah awal yang dilakukan oleh Pemkot Madiun dalam memperkenalkan

City Branding Madiun Kota Pendekar ini ialah melalui pembuatan logo dan pakaian khas untuk Kota Pendekar. Logo dan pakaian bercorak pencak silat ini perlu dilakukan karena Kota Madiun terkenal dengan budaya pencak silat, dan sebelumnya memang belum memiliki logo atau pakaian resmi sebagai penciri khas.

Dalam penciptaan logo dan pakaian, Pemerintah Kota Madiun membuat konsep logo *City Branding* bertema budaya pencak silat karena nilai pencak silat dapat menggambarkan keadaan di Kota Madiun. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun telah menerbitkan logo baru Kota Pendekar pada tanggal 4 Mei 2021 oleh Wali Kota Madiun. Logo baru tersebut, berbentuk seorang pendekar yang sedang memeragakan gerakan pencak silat, dimana hal tersebut dianggap selaras dengan *City Branding* Kota Madiun, yaitu Kota Pendekar. Selain itu, juga diciptakan pakaian atau seragam khas Kota Pendekar, yaitu berupa setelan baju warna hitam polos bertali putih dimana pada bagian dada sebelah kanan terdapat logo Kota Pendekar.

Menurut Maldi selaku Wali Kota Madiun, bahwa pemilihan logo Kota Pendekar ini telah melalui proses penyeleksian serta pertimbangan yang cukup matang, selain itu juga sudah mendapat persetujuan dari 14 (empat belas) perguruan silat yang ada di Kota Madiun. Selain itu, pakaian yang dilengkapi dengan logo pendekar juga diharapkan mampu mempersatukan semua perguruan pencak silat yang ada di Kota Madiun serta akan bisa menampilkan bahwa pendekar di Madiun akan menuju *go internasional* (<https://radarmadiun.jawapos.com>).

Namun berdasarkan penelusuran penulis, logo dan baju pendekar yang telah diresmikan dan *launching* bersamaan dengan hari jadi Kota Madiun ke 103 ternyata menuai banyak kritik dari masyarakat Kota Madiun khususnya melalui media sosial. Mengenai adanya kritikan-kritikan tersebut, penulis berpendapat bahwa logo dan baju pendekar tersebut seharusnya dapat mewakili warga masyarakat Kota Madiun pada umumnya dan bisa menarik perhatian masyarakat luar. Hal ini penting supaya *Branding* Kota Madiun sebagai Kota Pendekar bisa tercapai semaksimal mungkin. Selain itu, logo dan pakaian seharusnya juga ditetapkan dalam Peraturan Walikota sebagai identitas resmi pakaian khas Kota Madiun, namun sampai saat ini payung hukum yang penulis maksud juga belum ada.



Gambar 1. Logo Madiun Kota Pendekar
(Sumber: <https://www.kibrispdr.org/unduh-6/logo-kota-madiun.html>)

b) Pembangunan Identitas melalui Patung Pendekar

Selain pembentukan identitas logo *landmark*, program yang telah dilakukan oleh Pemkot Madiun dalam mengimplementasikan kebijakan *City Branding* dan sekaligus untuk mengenalkan, mengangkat, menonjolkan serta mengembangkan budaya pencak silat Kota Madiun agar lebih dikenal masyarakat luas adalah pembangunan fisik terkait ikon Kota Pendekar yaitu melalui pembangunan patung pendekar. Patung pendekar pertama yang dibangun oleh Pemerintah Kota Madiun ialah setinggi 12 meter yang ada di Proliman Joyo Kota Madiun. Patung pendekar yang kedua dibangun oleh Pemerintah Kota Madiun berlokasi di Kawasan "Pahlawan *Street Center*" (PSC). Pembangunan kedua patung tersebut dijadikan sebagai simbol kerukunan perguruan silat di Kota Madiun. Selain itu dengan pembangunan patung pendekar tersebut juga akan dapat mendukung aspek-aspek destinasi wisata Kota Madiun.



Gambar 2 Patung Pendekar
(Sumber: Peneliti)

Pembangunan ikon atau identitas Kota Pendekar berupa patung pendekar memang perlu dilakukan apalagi dibangun di sejumlah tempat strategis dalam rangka memperkenalkan *City Branding* melalui bangunan fisik Kota. Hal ini memang sangat perlu, mengingat saat ini banyak sekali tugu lambang perguruan silat yang dibangun secara ilegal oleh masing-masing perguruan pencak silat di Kota Madiun yang telah menimbulkan konflik laten seperti aksi perusakan tugu tersebut. Sehingga tugu lambang yang didirikan oleh anggota perguruan silat dari berbagai perguruan pencak silat tersebut dirasa belum mewakili keempat belas perguruan yang ada. Dengan demikian, perlu adanya identitas resmi dan legal milik pemerintah kota berupa patung pendekar yang menjadi khas Kota Madiun di berbagai tempat. Dengan adanya identitas patung pendekar sebagai ikon *City Branding* Madiun Kota Pendekar ini, tentunya Kota Madiun akan lebih dikenal masyarakat dalam ataupun luar Madiun dan meluruskan stigma positif di masyarakat secara perlahan-lahan (wawancara dengan Subyantara selaku tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kota Madiun).

Dengan adanya pembangunan aspek destinasi berupa patung pendekar ini, masyarakat Kota Madiun ataupun pengunjung luar daerah akan mudah mengetahui tentang identitas dan sesuatu hal yang baru dan bahkan bisa menarik perhatian orang-orang yang sedang berkunjung ataupun yang hanya melintas di Kota Madiun. Terlebih pembangunan aspek destinasi tentang logo atau patung pendekar ini dibangun di beberapa pusat

keramaian dan tempat-tempat yang strategis di Kota Madiun. Pembangunan patung pendekar sebagai ikon Madiun Kota Pendekar juga akan menjadi pendorong sebagai penguat identitas tentang *City Branding* Madiun Kota Pendekar sehingga dapat dikenal oleh masyarakat secara luas, sekaligus juga melestarikan budaya asli Indonesia yaitu pencak silat. Pembangunan patung pendekar ini juga menjadi bukti komitmen untuk mewujudkan Madiun sebagai kota yang aman dan kondusif di tengah keanekaragaman perguruan silat.

c) Pembangunan Galeri Pencak Silat

Dalam rangka implementasi kebijakan *City Branding* Madiun Kota Pendekar dan juga sekaligus sebagai upaya pengelolaan asset budaya, maka Pemkot Madiun juga mengadakan program kegiatan pengembangan Wisata Pengalaman Pencak Silat yang direncanakan akan diwujudkan dalam bentuk Pembangunan Galeri Pencak Silat. Rencananya pelaksanaan kegiatan tersebut akan melibatkan para budayawan, anggota komunitas, unsur Kecamatan, Kelurahan, Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, serta perwakilan masyarakat Kota Madiun. Dan tentunya tujuan dari program ini adalah memperkenalkan Pencak Silat kepada para wisatawan. Pelaksanaan program tersebut dibagi 2 (dua) tahap yaitu tahap perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahap pengembangan yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2020-2028 (Wawancara dengan Romadhon selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disbudparpora Kota Madiun). Namun dikarenakan terkendala masa pandemi covid-19 maka pembangunannya masih tertunda pelaksanaannya hingga sekarang.

d) Program Sahabat Pencak Silat

Selanjutnya dalam rangka implementasi kebijakan *City Branding* Kota Pendekar dan sekaligus melakukan pembinaan pemuda, olahraga dan kesenia, maka strategi Pemkot Madiun ialah juga membuat Program Sahabat Pencak Silat. Pelaksanaannya ditunjukkan dengan pembangunan Padepokan Bersama serta secara rutin mengadakan turnamen silat dan seni. Program ini tujuannya adalah untuk mengenalkan pencak silat dan menyebarluaskan kepada wisatawan dalam negeri bahkan luar negeri. Pelaksanaan program dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: tahap perencanaan (2019), pembangunan (2020) dan pengembangan (2021-2028).

Namun pelaksanaan pembangunan Padepokan Bersama tersebut sampai saat ini belum terwujud. Menurut penelusuran peneliti, hal tersebut disebabkan karena masing-masing perguruan pencak silat belum ada kesatuan persepsi, selain itu adanya pertimbangan nilai historis masing masing perguruan juga masih menjadi faktor kendala. Oleh karena itu apabila program tersebut nantinya betul-betul dilakukan maka akan mendengarkan pertimbangan dari IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) yang merupakan induk atau pusat organisasi pencak silat.

e) Penyelenggaraan Event Pencak Silat.

Program yang lain adalah mengadakan acara-acara yang mengikutsertakan anggota perguruan pencak silat melalui Disbudparpora Kota Madiun. Berdasarkan

hasil penelusuran penelitian, terdapat beberapa event yang dilaksanakan untuk memperkenalkan budaya pencak silat kepada para wisatawan diantaranya yaitu: Pentas Seni Periodik, Pencak Silat pada Upacara Hari Jadi Kota Madiun, Workshop Pencak Silat, Festival Pencak Silat Nasional.

Pentas Seni Periodik diadakan secara rutin pada waktu tertentu seperti hari raya keagamaan, acara tersebut dimeriahkan berbagai hiburan antara lain; pertunjukan seni, hiburan musik, pencak silat, yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan pencak silat pada masyarakat Madiun ataupun masyarakat luar wilayah tersebut. Sedangkan Pada Peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang diadakan tiap tanggal 20 Juni biasanya ditampilkan berbagai karya seni asli Kota Madiun, khususnya seni pencak silat.

Workshop merupakan acara yang rutin diadakan setiap tahunnya dan diikuti oleh ratusan anggota perguruan pencak silat yang berasal dari dalam maupun luar kota. Tujuan workshop adalah untuk mempersiapkan Event Festival Seni Pencak Silat Nusantara Nasional yang rutin diadakan. Agenda workshop tersebut diantaranya membahas tentang koreografi atau gerakan pencak silat, aturan pertandingan, musik festival seni pencak silat serta yang lainnya. Sedangkan dalam acara Festival Pencak Silat Nusantara diselenggarakan berbagai acara dalam berbagai kategori lomba, seperti lomba silat antar perguruan, lomba mendongeng dan sebagainya.

f) Program Pemberdayaan Komunitas Pemuda dan Ekonomi Kreatif

Program ini bermaksud menyalurkan minat dan bakat generasi muda, yaitu dengan melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda sehingga mampu menjadi generasi muda yang kuat secara mental dan tidak gampang terprovokasi. Dalam program ini dilakukan pelatihan ketrampilan ekonomi kreatif, penyediaan spot-spot berkreasi untuk anak muda, penyediaan lapak-lapak berjualan dan kegiatan keagamaan. Program lain adalah Madiun Kota Madu yang mewajibkan peternakan lebah tanpa sengat di setiap kelurahan. Untuk itu para pemuda diberi pelatihan beternak lebah. Selain itu untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di setiap kelurahan juga diwajibkan membangun lapak berjualan untuk UMKM, dan karang taruna. Beberapa lapak itu diberi nama yang menarik, misalnya Lapak Kampir (Kanigoro), Lapak Kampung Pesona (Madiun Lor), Lapak Taman Obor (Oro-oro Ombo), Lapak Reksogati (Sogaten), Lapak Simander (Kelurahan Pandean), Lapak Mbah Remul (Rejomulya), Lapak Joglo Palereman (Kelun) dan sebagainya. Pembangunan lapak dibiayai oleh Pemerintah Kota melalui DID (Dana Intensifikasi Daerah). Dalam bidang olah raga Pemerintah Kota membangun beberapa sarana olah raga seperti spot tracking sepeda motor di Bantaran, sepatu roda dan skateboard di belakang Bosbow, spot basket di samping Taman Demangan, dekat Klentheng, GOR dan di setiap sekolah (wawancara dengan Dyah Ayu Nawang Wulan selaku Lurah Kanigoro).

Terciptanya *City Branding* Kota Pendekar tidak terlepas dari peran *stakeholder* pencak silat yang ada di Kota Madiun, yaitu IPSI dan perguruan pencak silat serta tokoh-tokoh masyarakat. IPSI sebagai organisasi yang menaungi keempat belas perguruan pencak silat di Kabupaten Madiun mempunyai peran dalam mengimplementasikan *City Branding* ini. Banyaknya perguruan pencak silat tentu IPSI Kota Madiun mempunyai tugas untuk menaungi dan meningkatkan sinergitas antar perguruan dalam upaya menjaga keharmonisan antar anggota perguruan. Dengan dipilihnya budaya pencak silat sebagai *City Branding* Kota Madiun, IPSI dan perguruan pencak silat ikut andil bagian dalam rangka mewujudkan rasa aman sesuai dengan visi misi Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun dan segenap *stakeholder* sepakat beberapa kendala akan dapat dipecahkan melalui dialog pimpinan perguruan silat (Wawancara dengan Subyantara selaku tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kota Madiun).

Keterlibatan *stakeholder* pencak silat dirasa penting karena para sesepuh mengetahui tentang perkembangan pencak silat di Kota Madiun. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya sejak lama daerah se eks karesidenan Madiun terkenal dengan gesekan antar perguruan silat terutama di saat bulan Suro dalam Suran Agung. Untuk mengurangi dan meminimalisir kesalah pahaman yang dapat memecah belah antar pesilat dari berbagai perguruan maka Pemerintah Kota Madiun dibantu dengan IPSI menciptakan dan melakukan forum komunikasi yang dilakukan bersama antar perguruan silat yang bertujuan untuk menjalin komunikasi semua perguruan pencak silat. Forum komunikasi merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kota Madiun melibatkan segenap *stakeholder* yang ada dalam rangka mewujudkan citra positif kota Madiun. Program pengembangan *city tour* diselenggarakan dengan melibatkan pihak swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu komitmen jangka panjang suatu perusahaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik (Rahman, 2018).

Kebijakan *City Branding* Kota Madiun mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian. Dengan perkembangan investasi dapat menciptakan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui *City Branding* Madiun Kota Pendekar, Pemerintah Kota Madiun ingin menghapus stigma negatif tentang pencak silat serta mengenalkan kepada masyarakat bahwa Kota Madiun merupakan daerah yang aman dan damai lewat budaya pencak silat yang menjadi potensi daerahnya. Hal ini berdampak pada minat para investor untuk membuka usaha dari skala kecil maupun skala besar di Kota Madiun. Pembangunan sektor usaha nantinya akan menyerap banyak sumber daya manusia khususnya masyarakat di Kota Madiun. Selain investor, para pelaku usaha kecil juga memanfaatkan *City Branding* ini menjadi produk unggulan Kota Madiun. Pelaku usaha kecil membuat produk-produk untuk wisatawan yang berkunjung di Kota Madiun. Hal ini juga menjadi salah

satu bentuk promosi ataupun pengenalan Kota Pendekar kepada masyarakat luas (wawancara dengan Subyantara, tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kota Madiun).

City branding ini juga berdampak pada sektor pariwisata yang ada di Kota Madiun. Semua kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota dalam rangka memperkenalkan *City branding* disambut antusias oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan animo masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, patung pendekar di kawasan PSC Jalan pahlawan Kota Madiun telah menjadi ikon baru dan mampu mendorong tingkat kunjungan wisatawan di Kota Madiun. Para pelaku usaha khususnya UMKM juga memanfaatkan *branding* ini untuk menghasilkan produk-produk ciri khas Kota Pendekar. Tidak dipungkiri, adanya *branding* ini dapat memunculkan ide bisnis dikalangan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi secara perlahan.

Dampak *City branding* ini juga dirasakan khususnya bagi perkumpulan perguruan pencak silat di Kota Madiun. Bulan suro yang identik dengan konflik antar perguruan juga dapat ditekan dengan adanya *City branding* ini. Gesekan antar perguruan ditekan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Berbagai kegiatan yang bertema pencak silat juga diadakan pemerintah untuk menghindari gesekan pada bulan suro. Kegiatan tersebut dikemas melalui berbagai kegiatan seperti festival pencak silat, parade pendekar dan sarasehan budaya. Kegiatan tersebut melibatkan semua perguruan pencak silat sehingga tercipta kerukunan antar anggota perguruan yang ada di Kota Madiun. Selain itu, *City branding* ini berdampak pada peningkatan kunjungan ke tempat padepokan atau pusat perkumpulan pencak silat di Kota Madiun. Banyak anggota pencak silat dari luar kota untuk mengetahui *City branding* tersebut. Tidak jarang para pesilat melakukan kegiatan seperti bersilaturahmi dengan sesama anggota perguruan ataupun nyekar di makam sesepuh perguruan (Wawancara dengan Subyantara selaku tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kota Madiun).

Dari hasil penelitian, maka bisa dikatakan bahwasannya *City Branding* Madiun Kota Pendekar yang diangkat oleh Pemerintah Kota Madiun telah terimplementasi dengan baik dan memberikan berdampak positif pada semua sektor dan lapisan masyarakat. Dari sektor pariwisata, adanya kampung pesilat dimanfaatkan sebagai strategi untuk daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Madiun. *Trend* peningkatan kunjungan wisata juga di manfaatkan oleh para pelaku usaha khususnya UMKM. Para pelaku usaha memanfaatkan *branding* ini sebagai peluang usaha baru dengan cara menciptakan produk seperti kaos dan lainnya yang mencantumkan logo Madiun Kota Pendekar pada produk yang diproduksi. Selain itu, gesekan antar perguruan pencak silat dapat diminimalisir melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota sehingga terwujud Kota Madiun yang aman. Hal inilah yang berdampak pada peningkatan minat investor untuk mendirikan usaha di wilayah Kota Madiun.

Selanjutnya untuk menjaga kesinambungan dalam membangun city branding ini perlu sinergi dari peran pemerintah, dukungan masyarakat, pembiayaan, dan teknologi (Hasibuan & Krianto Sulaiman, 2019). Pemerintah Daerah sebagai *leading* sektor harus menjaga keempat elemen tersebut selalu berada dalam kondisi baik. Salah satu dari elemen itu jelek akan mengganggu kesinambungannya. Atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Madiun tersebut telah meraih penghargaan TOP *City Branding Award 2022*. Dengan diterimanya anugrah tersebut, berarti Pemerintah Kota Madiun telah berhasil mewujudkan kinerjanya dalam hal peningkatan tata kota, berinovasi dan destinasi wisata terbaru. Sekedar informasi, Kota Madiun selain sebagai Kota Pendekar juga dikenal dengan beberapa sebutan sebagai Kota Gadis dan Kota Pecel.

3. Kesimpulan

Keberadaan perguruan pencak silat di Madiun merupakan warisan budaya telah mendarah daging bagi setiap individu warga kota harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat berprestasi mengharumkan kota Madiun di mata dunia internasional. Keberadaan 14 aliran perguruan silat merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk melahirkan atlet-atlet pencak silat nasional maupun internasional.

Penetapan *City Branding Madiun Kota Pendekar* menarik perhatian masyarakat wilayah kota Madiun maupun masyarakat luar kota. Karena selama ini di kota Madiun dan sekitarnya sering terjadi bentrokan atau tawuran antar perguruan silat yang mengarah pada kerusuhan sosial. Melalui city branding ini Pemerintah Kota Madiun bertekad mengubah stigma negatif kota Madiun yang identik dengan bentrokan antar perguruan silat menjadi kota yang menarik, aman, ramah dan kondusif sebagai destinasi wisata kota (*city tour*) dan investasi.

Implementasi kebijakan *City Branding Madiun Kota Pendekar* dilakukan melalui strategi program penciptaan logo dan pakaian khas pendekar, pembangunan identitas melalui patung pendekar, pembangunan galeri pencak silat, program sahabat pencak silat, penyelenggaraan even pencak silat dan pemberdayaan komunitas pemuda dan ekonomi kreatif. Kebijakan *city branding* Madiun Kota Pendekar memberikan dampak positif, yaitu meningkatkannya keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan dukungan bagi kebijakan *city tour*, dan memperbaiki komunikasi antar perguruan silat. Sampai dengan sekarang proses implementasi masih sedang berjalan dan diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi kota Madiun dan sekitarnya.

Catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemkot adalah bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya menyangkut program-program fisik saja melainkan menyangkut sikap dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu silaturahmi kepada seluruh tokoh-tokoh harus dilakukan secara intensif, rutin dan tidak membedakan perguruan silat. Selanjutnya masing-masing

pimpinan atau tokoh perguruan harus selalu menanamkan jiwa persaudaraan baik antar anggota perguruan maupun dengan anggota perguruan lain kepada seluruh murid-muridnya. Sehingga tercipta paradigma baru perguruan silat yang mengutamakan sikap persaudaraan dan saling menghargai.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

- Amalia, D., Nesya, N., & Tyrta, M. (2023). Implementasi Kota Pintar (Smart City) Di Kota Surabaya. In *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* (Vol. 5, Issue 1).
- Aristono, T. (2021). *Pengembangan Kampung Pesilat sebagai City Branding (Studi Kualitatif Basic Interpretative di Kabupaten Madiun)*.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses* (Cet. 1). Media Pressindo.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Fifth Edition). SAGE Publications, Inc.
- H. Soenarko. (2005). *Public policy: pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah*. Airlangga University Press.
- Hananto, B. A. (2019). Perancangan Logo Dan Identitas Visual Untuk Kota Bogor (Logo and Visual Identity Design For Bogor City). *JURNAL TITIK IMAJI*, 2(1), 19–32. <http://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imagi/>
- Hasibuan, A., & Krianto Sulaiman, O. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. In *Cetak) Buletin Utama Teknik* (Vol. 14, Issue 2). Online.
- Kencana, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 2(1), 17–22.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mizanudin, M., Sugiyanto, A., & Saryanto. (2018). SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra) Edisi 3 Tahun. *Prosiding SENASBASA*, 2(2), 264–270. <http://researchreport.umm.ac.id/index.php/>

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 40). Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. (2013). *Pendidikan Pencak Silat: Membangun Jati Diri dan Karakter Bangsa*. Remaja Rosda Karya, 2013.
- Nugroho, S. S., Sarjiyati, & Anam, M. C. (2021). *Madiun Kota Pendekar Perspektif Kebijakan Wisata Budaya Pencak Silat*. Lakeisha.
- Nurdiassa, A., Zulfikar, A., Rasyid, F., & Wulandari, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia Smart City Policy Implementation in Realizing Makassar a World City. *Journal of Public Administration and Government*, 3, 37–46. <https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.114>
- Rahman, P. (2018). Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar Pada PT. Semen Baturaja Persero Tbk Site Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 3(2).
- Sanjoyo, M. P., Fatkurrohman, R. A., & Jodi, J. (2022). Kajian Fungsional Tradisi Sah-Sahan Pencak Silat Pesaudaraan Setia Hati Terate. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 3(1), 172–182. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.01.017>
- Sulistiyono, R. (2014). *Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Antar Oknum Perguruan Pencak Silat Di Kabupaten Madiun*.
- Utomo, G. D. C., & Artono. (2017). Pencak Silat Setia Hati Terate Di Madiun Dari Awal Sampai Pada Masa Pendudukan Jepang. In *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 5, Issue 1).
- Yuli, A. (2011). City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Di Tinjau Dari Aspek Hukum Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 5, 50–68.

Website:

<https://www.kibrispdr.org/unduh-6/logo-kota-madiun.html> (diakses hari Rabu 10 Mei 2023)

Penerapan *Dynamic Governance* terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022

Ferdy Yanuar¹⁾, Dede Sri Kartini²⁾, Idil Akbar³⁾

^{1), 2), 3)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran
Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email Koresponden : ferdy19002@mail.unpad.ac.id¹⁾

ABSTRACT

Urbanization is a dynamic phenomenon, where the population lock-in that occurs is triggered by the large number of economic centers in urban areas, especially in the JABODETABEK area. However, in reality Depok City, which is one of these satellite cities, has not been able to overcome the impact of increasing urbanization on plantation management. Dealing with plantation governance in responding to urbanization challenges in Depok City is the focus of the Depok City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), the Depok City Housing and Settlement Service (Disrumkim), the Depok City Public Works and Spatial Planning Office (DPUPR), and other institutions. . This study discusses the dynamics of the Depok City Government in implementing governance management to deal with the impacts of urbanization such as the rise of uninhabitable, obsolete, slum, liars, and so on. In addition, the concept of Dynamic Governance System put forward by Boon Siong Neo and Geraldine Chen in 2007 was used to analyze this research. The results of this study found that the handling carried out by the Depok City Government regarding these problems resulted in positive changes. So that adaptive policies can be created, such as setting simple subsidized house prices that are adjusted to the income of urbanites by making binding regulations, as well as other adaptive policy suggestions put forward in this study on elements of change.

Keywords : *Dynamics of Government, Settlement Governance, Urbanization, City of Depok*

ABSTRAK

Urbanisasi merupakan sebuah fenomena yang dinamis, dimana perpindahan penduduk yang terjadididasari oleh banyaknya pusat-pusat ekonomi di perkotaanterutama pada kawasan JABODETABEK. Namun pada kenyataannyaKota Depok yang merupakan salah satu kota satelit tersebut, belum mampu mengatasi dampak dari peningkatan urbanisasi dalam hal tata kelola permukiman. Penanganan terkait tata kelola permukiman dalam menjawab tantangan urbanisasi di Kota Depok merupakan fokus dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok, Dinas Perumahan Dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, dan lembaga lainnya. Penelitian ini membahas mengenai dinamika Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan tata kelola permukiman untuk menghadapi dampak urbanisasi seperti maraknya rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, permukiman liar, dan sebagainya. Selain itu, konsep *Dynamic Governance System* yang dikemukakan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen pada tahun 2007digunakan untuk menganalisispenelitian ini. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok terkait permasalahan tersebut menghasilkan perubahan yang positif. Sehingga kebijakan yang adaptif dapat tercipta sepertimenetapkan harga rumah subsidi sederhana yang disesuaikan dengan penghasilan kaum urban dengan dibuatkan peraturan yang mengikat, serta saran kebijakan adaptif lainnya yang dikemukakan didalam penelitian ini pada elemen *change*.

Kata Kunci : *Dinamika Pemerintahan, Tata Kelola Permukiman, Urbanisasi, Kota Depok*

1. Pendahuluan

Dinamis adalah sebuah kata yang menggambarkan keadaan dimana sering berubah-ubah atau tidak menentu. Hal inilah yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Keadaan tidak menentu yang dimaksud sama artinya dengan perubahan sosial di masyarakat. Hakikat perubahan sosial menurut Gillin dan Gillin adalah keadaan dimana perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Jelamu Ardu Marius, 2006).

Proses perubahan sosial yang terjadi memiliki pola hubungan yang berbeda tergantung dengan sebab akibatnya, misalnya terdapat proses perubahan pada masyarakat yang berdampak pada dinamika di pemerintahan lalu ada pula dinamika di pemerintahan yang berdampak pada perubahan di masyarakat. Sebagai salah satu contoh dari pola hubungan tersebut, penelitian ini meneliti tentang proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga berdampak pada dinamika di pemerintahan yaitu tentang urbanisasi sebagai akibat dari adanya perubahan sosial yang diakibatkan dari segi komposisi penduduk.

Urbanisasi diartikan sebagai proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dalam hal ini perpindahan penduduk dari desa ke kota. Namun pengertian ini tidak selalu benar merujuk pada kondisi kontekstual. Urbanisasi yang sesungguhnya adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (urban area). Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk diatas satu juta orang dan berdekatan dengan kota satelit disebut sebagai metropolitan (Tjiptoherijanto, 2016).

Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya sering melakukan mobilitas demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses urbanisasi adalah bagian dari kompleksitas perubahan-perubahan sosial seperti yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin sebelumnya. Kondisi-kondisi ekonomis, geografis, komposisi penduduk, ideologis, biologis, temuan-temuan baru dan lain-lain mendorong orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan mereka. Namun peristiwa urbanisasi sendiri memiliki dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak positif yang nyata dari adanya urbanisasi adalah berjalannya pembangunan ekonomi kearah yang lebih baik. Tetapi dampak negatif yang nyata dari adanya urbanisasi salah satunya adalah semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan, terutama untuk lahan hunian yang layak (Society, 2013).

Fenomena inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota supaya tidak menimbulkan permasalahan serius kedepannya. Adapun

kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi serta menjadi wilayah pendukung Ibu Kota Jakarta adalah Kota Depok. Menurut sistem perkotaan nasional, Kota Depok telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Depok juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabekpunjur (DATA & PERKOTAAN, 2022). Banyak sekali masyarakat dari luar daerah yang menetap di Kota Depok dibandingkan kota lainnya seperti Bekasi, Tangerang, maupun Bogor. Karena menurut mereka, Kota Depok adalah wilayah yang paling strategis dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Terutama bagi mereka yang memang bekerja di Jakarta namun memiliki hunian di Kota Depok. Faktor lainnya adalah harga tanah yang relatif lebih murah (kurang dari 5 juta/meter) serta keuntungan dari adanya transportasi CommuterLine sekali perjalanan ke arah Jakarta Kota tanpa transit, dengan jarak menengah, bila dibandingkan dengan Bogor (jarak jauh), dan Tangerang selatan (GreenLine-dua kali transit).

Dilihat dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (urban area). Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok mencatat jumlah penduduk kota Depok tahun 2017 semester I itu ada 1.809.120 penduduk dan pada tahun 2018 semester I ada 1.838.671. Dari jumlah penduduk itu, 1.274.589 orang tercatat mempunyai KTP elektronik (e-KTP). Sedangkan 77.503 orang belum mempunyai e-KTP, karena sebagian besar belum melakukan perekaman. Menurut Henri Mahawan, Sekertaris Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok. Pertumbuhan penduduk di Kota Depok itu memang meningkat tiap tahunnya. Kalau di lihat dari 2018 sekarang tercatat dari Januari hingga September itu meningkat sebanyak 29.551 atau 2 persen. Hal ini didominasi para pendatang baru yang dari luar Depok sisanya kelahiran (Depok smartcity, 2019).

Supaya lebih mudah memahami angka pertumbuhan penduduk Kota Depok terhitung dari tiga tahun terakhir, yakni 2018, 2019, dan 2020. Terlampir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berikut ini.

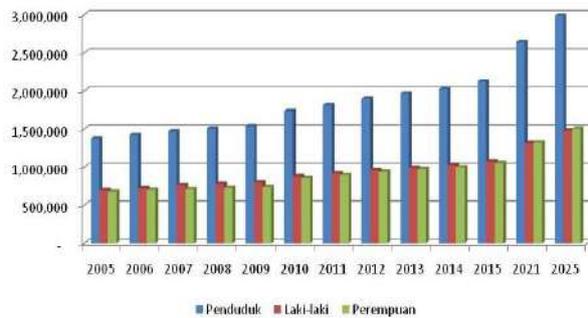
Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa), 2018-2020

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0 - 4	109966	111748	113507	103767	105472	107144	213733	217220	220651
5 - 9	100697	103348	105500	96549	99409	101885	197246	202757	207385
10 - 14	87696	89973	92691	83718	85809	88250	171414	175782	180941
15 - 19	91501	93394	95481	95458	97379	99384	186959	190773	194865
20 - 24	104312	106985	109340	105490	108033	110287	209802	215018	219627
25 - 29	104054	106760	109699	107403	110477	113702	211457	217237	223401
30 - 34	108808	111690	114708	107345	109919	112959	216153	221609	227667
35 - 39	104003	106907	108353	103476	105833	107716	207479	212140	216069
40 - 44	97303	100289	103382	92854	96398	99970	190157	196687	203352
45 - 49	79966	83491	86874	77656	81369	85003	157622	164860	171877
50 - 54	63256	66856	70482	62079	65634	69263	125335	132490	139745
55 - 59	48152	51027	54152	47478	50554	53806	95630	101581	107958
60 - 64	32132	34398	36684	30911	33463	35971	63043	67861	72655
65 - 69	21436	23343	25291	19091	20620	22454	40527	43963	47745
70 - 74	11192	12033	13093	11348	12089	12866	22540	24122	25959
75+	8628	9245	9881	12608	13481	14408	21236	22726	24289
Jumlah	1173102	1210887	1249118	1157231	1195939	1235068	2330333	2406826	2484186

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022 (BPS, 2020)

Selain data tersebut ketika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan berdasarkan data terkini, harus terdapat data tambahan yang memproyeksikan keadaan di masa depan. Maka dari itu terdapat pula data dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Depok tentang proyeksi penduduk hingga 2025 melalui grafik berikut ini.

Tabel 2. Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025



Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 (Bappeda Kota Depok, 2017)

Dari data pertumbuhan tersebut serta pernyataan dari sekretaris Disdukcapil Kota Depok. Faktor urbanisasi turut mengambil bagian dalam peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok. Dari fenomena tersebut diharapkan pemerintah Kota Depok harus untuk segera mengambil langkah kedepan terkait perbandingan pertumbuhan penduduk dengan lahan layak hunian yang tersedia. Jika telat atau salah dalam menangani persoalan ini maka urbanisasi akan menjadi dua bilah mata pisau. Dimana menjadi keuntungan dari Kota Depok karena banyak pendatang baru sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, namun juga efek sampingnya Kota Depok bisa menjadi kota yang tidak layak huni karena lahan yang semakin menipis.

Kekhawatiran tersebut ada mengingat Kota Depok saat ini luas lahannya sekitar 202 kilometer persegi sedangkan jumlah penduduknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, telah melonjak menjadi 2.254.513 orang. Maka perbandingan kepadatan penduduk Kota Depok terhitung tahun 2019 yakni mencapai sekitar 11.000 per kilometer per segi. Jumlah terbilang cukup mengkhawatirkan ditambah pernyataan Mantan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, mengakui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok memang cukup tinggi jika hanya diukur dari angka perpindahan penduduk saja (masuk ke Depok) sekitar 1,3 persen dari total 3,5 persen (jika ditambah angka kelahiran) atau kira-kira 28.000 pendatang pertahun. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk secara nasional yaitu diangka 1,1 persen (Simatupang, 2019).

Berdasarkan data tersebut, sejauh ini dampak urbanisasi sudah terlihat dengan makin meluasnya hunian kumuh yang tidak layak huni di Kota Depok. Seperti yang kita ketahui bahwa urbanisasi menyebabkan

laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan sehingga menyebabkan masalah terhadap lingkungan, salah satu masalah yang dihadapi yaitu adanya pemukiman kumuh (slum area) pada lahan-lahan kosong di daerah perkotaan seperti bantaran sungai, bantaran rel kereta api, taman kota, maupun di bawah jalan layang (Priyatna et al., 2022).

Penghuni pemukiman kumuh (daerah slum) adalah sekelompok orang yang datang dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib, yang umumnya tidak memiliki keahlian maupun kompetensi dan jenjang pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perkotaan. Mereka hanya memiliki pendapatan yang rendah, sehingga mereka tidak mampu mendiami pemukiman yang layak huni karena terkendala finansial. Berdasarkan data pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 memperlihatkan bahwa jumlah permukiman kumuh sebanyak 11 kawasan dengan luas mencapai 137,08 hektar (Bappeda Kota Depok, 2017).

Sesuai dengan arahan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Depok, terdapat tujuan menjadi kota berwawasan lingkungan, lalu terwujudnya Depok sebagai kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengindahkan kelestarian dan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang, yang tercermin dalam pemanfaatan ruang yang serasi antara untuk permukiman, dan lainnya. Dalam hal ini mewujudkan lahan hunian yang layak turut menjadi fokus pemerintah Kota Depok kedepan di tengah tantangan urbanisasi yang ada (Bappeda Kota Depok, 2017).

Dari adanya permasalahan yang timbul, adapun hubungan diantara permasalahan tersebut yakni antara urbanisasi, tata kelola permukiman serta lahan layak huni memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulis menyimpulkan bahwa urbanisasi merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan sehingga pertumbuhan penduduk yang pesat ini mengakibatkan terjadinya sejumlah permasalahan di daerah perkotaan, salah satu diantaranya adalah munculnya pemukiman kumuh atau daerah slum (slumarea) yaitu daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan yang terdapat di daerah perkotaan (Isabella et al., 2019).

Kemampuan pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni tingginya angka urbanisasi yang berdampak pada ketersediaan lahan layak huni di Kota Depok dapat dianalisis dengan menggunakan teori *Dynamic Governance System* Boon Shiong Neo dan Geraldine, Chen (2007) dengan melihatnya dari perspektif *“how the government's ability to respond to future societal developments through early signs that may affect the country's condition”*. Yakni kemampuan pemerintah dalam merespon perkembangan masyarakat ke depan melalui tanda-tanda awal yang dapat berpengaruh terhadap kondisi negara (Aligica, 2019).

Teori ini terdiri dari tiga elemen utama yaitu *culture*, *capabilities* dan *change*. Pada elemen pertama

yaitu *culture* menjelaskan keterkaitan antara budaya dengan dinamika perubahan yang terjadi. Dalam hal ini segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dalam membuat sebuah tindakan baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak lepas dari budaya didalam masyarakat ataupun lembaga pemerintah itu sendiri. Contohnya dalam menyelesaikan sebuah persoalan, pemerintah Kota Depok mengajak semua elemen untuk turut berpartisipasi dengan kata lain tidak ada pihak yang dilupakan (*multiracism*). Adapun elemen *culture* ini terdiri dari tiga belas point turunan seperti *integrity, incorruptibility, meritocracy, market, pragmatism, multi-racialism, state activism, long term, relevance, growth, stability, prudence, self-reliance*.

Namun yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya 5 point *culture* yang meliputi *state activism, growth, long term, stability, dan prudence*. Alasannya adalah pada pengaruh *state activism* kebijakan Pemerintah Kota Depok pasti dipengaruhi oleh pemerintahan lainnya dalam hal ini yakni pemerintah provinsi bahkan pusat, pada *growth* disini melihat pengaruh dari pertumbuhan penduduk di Kota Depok, pada *long term* disini dilihat dari rencana jangka panjang yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Depok, pada *stability* disini dilihat dari sebuah kebijakan apakah mengalami perubahan terus menerus atau justru cenderung stabil, dan yang terakhir yaitu *prudence* disini dilihat apakah langkah yang diambil Pemerintah Kota Depok sudah bijaksana atau tidak.

Lalu untuk elemen kedua adalah *capabilities*, dimana elemen ini adalah fokus utama dalam penelitian ini karena membahas tentang kapabilitas atau kemampuan pemerintah dalam menghadapi dinamika yang ada. Pada elemen *capabilities*, didukung oleh 2 komponen pengungkit, yaitu *able people* (kecakapan sumber daya manusia) dan *agile process* (tata cara yang diketahui) yang menggerakkan proses pola pikir *thinking ahead* (Berpikir ke depan), *thinking again* (Menganalisa kembali) dan *thinking across* (belajar dari pengalaman eksternal) untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif (*adaptif policies*) yang akan membawa institusi mewujudkan *dynamic governance*.

Singkatnya jika dilihat dari ketiga proses pola pikir pada elemen *capabilities*, Pemerintah Kota Depok harus bisa berpikir kedepan atau mempunyai rencana jangka panjang dalam menghadapi fenomena yang terjadi. Dalam hal ini terciptanya peraturan daerah yang dapat mengakomodasi permasalahan urbanisasi (*thinking ahead*). Selain itu Pemerintah Kota Depok juga harus untuk menganalisa kembali atau melakukan evaluasi dari kebijakan yang ada dalam menganani fenomena tersebut sudah efektif atau belum (*thinking again*). Serta Pemerintah Kota Depok harus untuk belajar dari pengalaman pemerintah yang lain dalam mengatasi fenomena yang serupa untuk dijadikan pembelajaran (*thinking across*).

Selanjutnya untuk elemen ketiga atau terakhir didalam *dynamic governance system* yaitu elemen *change*. Elemen ini pada akhirnya akan melihat hasil dari dinamika yang terjadi. Dalam hal ini bisa dilihat salah

satunya adalah kebijakan yang selama ini dibuat untuk mengatasi krisis lahan layak huni akibat dari dampak urbanisasi belum adaptif atau relevan dengan situasi yang terjadi karena permasalahan urbanisasi masih menyebabkan dampak yang nyata seperti masih maraknya permukiman kumuh maka dari itu harus adanya peraturan yang adaptif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Singkatnya analisis menggunakan teori ini akan membahas fenomena di saat ini (sekarang) serta membuat prediksi yang akan datang terkait dinamika pemerintahan dalam menghadapi persoalan yang dinamis.

Adapun metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu untuk teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Untuk validasi data, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dimana data yang diperoleh kemudian di validasi dengan sumber lainnya sehingga dalam penelitian ini dapat data dapat diuji dari berbagai sumber. Serta untuk teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

2. Pembahasan

Dinamika Pemerintahan yang terjadi pada Pemerintahan Kota Depok inidapat dianalisis dengan menggunakan teori *Dynamic Governance* yang dikemukakan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen yang terdiri dari *culture* meliputi *state activism* (aktivitas negara), *growth* (pertumbuhan), *long term* (rencanadan tujuan jangka panjang), *stability* (stabilitas) dan *prudence* (bijaksana), *capabilities* atau kapabilitas yang berupa *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (mengkaji ulang) dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara/organisasi lain), serta *change* atau perubahan sebagai hasil dari adanya pengaruh antara elemen kapabilitas dan budaya.

Dinamika Pemerintahan Kota Depok Terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi Tahun 2022 Dianalisis dari Elemen *Culture*

Aspek *State Activism*

Pada elemen *culture* yang pertama yaitu *state activism* atau terdapat campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Khususnya dalam setiap kebijakan, program, serta arahan dalam penanganan tata kelola permukiman akibat urbanisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok selama ini, dalam membuat sebuah kebijakan yang konkret dalam bentuk sebuah peraturan yang bertujuan untuk mengatur tata kelola permukiman akibat dampak urbanisasi pastinya mengalami campur tangan dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya seperti membentuk RPJMD 2021-2026 yang belum lama ini disahkan, dimana setiap isi dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah perihal tata kelola permukiman, tentunya mengacu terhadap aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebelumnya.

RPJMD Kota Depok 2021-2026 merupakan kebijakan yang digunakan untuk pembangunan daerah dengan mengacu atau berpatokan kepada beberapa aturan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mengacu juga kepada pembangunan nasional baik itu RPJPN serta RPJMN yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi yang ada pada peraturan tersebut, baik dari RPJPN, RPJMN, RPJPD, maupun RPJMD secara keseluruhan merupakan arahan-arahan atau aturan yang bersifat umum dalam berbagai permasalahan yang ada salah satunya dalam hal kebijakan tata kelola permukiman, khususnya untuk mengatasi dampak urbanisasi yang terjadi yaitu adanya permukiman kumuh. Aturan yang bersifat umum tersebut memang tidak mengatur secara spesifik terkait arah kebijakan mengenai tata kelola permukiman akibat dampak urbanisasi, namun pada tahun 2022 Pemerintah Kota Depok sudah mengesahkan peraturan turunan terkait tata kelola permukiman yang tertuang didalam Perda RTRW Kota Depok tahun 2022-2042.

Selain itu terdapat program BSPS yang merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta KotaKU, dan PNPM Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. Program tersebut saling berhubungan dan saling berkolaborasi. Dalam hal ini saling melengkapi namun tidak beririsan. Selain itu program tersebut dirancang agar tidak tumpang tindih, karena programnya sama maka dana dari pemerintah daerah hanya menjadi pendamping atau menjadi cadangan dari pemakaian dana pusat atau provinsi itu sendiri sesuai dengan koordinasi yang dilakukan. Contohnya pada program Pemerintah Kota Depok yaitu TMMD terdapat RTLH Murni yang pelaksanaan tahun 2023 reguler sedangkan RTLH ABT adalah pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Selain program rumah bersubsidi, ada juga program yang dipengaruhi oleh kebijakan diluar Pemerintah Kota Depok. Yaitu program terkait pengadaan rusun dimana pengadaan ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah namun juga oleh pihak swasta. Namun pihak swasta dalam mengadakan rusun sendiri terkendala kebijakan yang mengatur tentang rusun yang bersubsidi. Adapun yang dimaksud rusun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan rusun komersial adalah rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar. Sedangkan DKI Jakarta sudah mengatur pelaksanaan rusun subsidi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan

Pengelolaan Rumah Susun Milik. Selain pengaruh Pemerintah Pusat dan Daerah dari segi kebijakan dan program, ada pula dari segi penanganan akibat dampak urbanisasi bagi tata kelola permukiman bagi Kota-Kota yang terdampak disekitar DKI Jakarta.

Aspek Growth

Pada elemen *culture* yang kedua yaitu *growth* atau pertumbuhan. Pertumbuhan yang ada di Kota Depok berdasarkan penelitian ini terdiri dari jumlah penduduk Kota Depok, perkiraan jumlah kaum urban, perkiraan kawasan kumuh, serta peningkatan jumlah penerima bantuan program RTLH sebagai upaya dalam mengatasi permukiman kumuh atau tidak layak huni. Seperti yang dijelaskan pada sub bab gambaran umum tentang Kota Depok. Jumlah penduduk Kota Depok dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk terbilang cukup pesat hingga saat ini.

Sedangkan menurut Disdukcapil Kota Depok jumlah penduduk Kota Depok jika dilihat dari kepemilikan NIK, tahun 2022 jumlah penduduk Kota Depok mencapai 1.920.182 jiwa dimana luas wilayah Kota Depok sendiri yakni sekitar 200,3 km². Jumlah wilayah yang terbilang cukup luas ditambah letaknya yang strategis dengan Ibu Kota Jakarta membuat Kota Depok menjadi salah satu tujuan para kaum urban, baik untuk tempat tinggal atau sekedar tempat singgah sesaat. Hal ini terbukti berdasarkan data bahwa pada tahun 2022, tercatat ada 45.132 orang pindah datang ke Kota Depok, Jawa Barat.

Baik itu Disdukcapil Kota Depok maupun BPS Kota Depok, keduanya tidak bisa memberikan perkiraan jumlah kaum urban yang ada di Kota Depok. Selain itu jumlah pertumbuhan penduduk Kota Depok tersebut diiringi dengan hadirnya kawasan kumuh di Kota Depok. Tercatat pada tahun 2019 menurut Bappeda Kota Depok kawasan kumuh sekitar 132 Hektare. Selain itu jika melihat perbandingan pada tahun 2019 kebelakang. Kawasan kumuh terus mengalami penurunan akibat penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dengan berbagai dinas terkait. Dari yang sebelumnya pada tahun 2015 kawasan kumuh sekitar 147 Hektare dan pada tahun 2010 mencapai 564 Hektare. Namun menurut Disrumkim kawasan kumuh di Kota Depok kembali mengalami peningkatan terhitung saat ini sekitar 475 hektare pada tahun 2022. Angka ini terbilang cukup besar, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Aspek Long term

Pada elemen *culture* yang ketiga yaitu *long term* atau jangka panjang dimana pada penelitian ini melihat bahwa sejauh mana Pemerintah Kota Depok dalam setiap tindakan yang diambil terkait tata kelola permukiman untuk menghadapi urbanisasi apakah sudah bersifat jangka panjang atau berkelanjutan. Berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan yang ditimbulkan oleh urbanisasi memang bersifat continue atau terus berlanjut selama Kota Depok masih menjadi pilihan bagi

kaum urban untuk menetap. Selain itu penyelesaian kawasan kumuh akibat dampak urbanisasi bukannya persoalan yang mudah diselesaikan dalam sekali tindakan. Perlu keberlanjutan dalam mengatasi persoalan tersebut yang bersifat cukup dinamis.

Disahkannya perda RTRW Kota Depok merupakan sebuah aturan turunan dari RPJMD Kota Depok yang memberikan aturan umum terkait penanganan tata kelola permukiman. Berbicara tentang rencana jangka panjang bisa juga dengan sebuah rencana jangka pendek yang diberlakukan secara terus menerus. Maksudnya adalah sebuah program jangka pendek yang jika dijalankan secara terus menerus maka akan menyelesaikan persoalan jangka panjang. Contoh program dalam penelitian ini yaitu kebijakan bantuan RTLH dimana program ini memang bersifat jangka pendek namun itu justru menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat dibandingkan kebijakan jangka panjang lainnya.

Aspek Stability

Pada elemen *culture* yang keempat yaitu *stability* atau stabilitas. Stabilitas yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu sejauh mana kebijakan atau peraturan yang ada mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Sejauh ini Pemerintah Kota Depok dipimpin oleh kepemimpinan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok selama hampir 20 tahun terhitung dari periode 2006-2011 dan 2011-2016 kader PKS yaitu Nur Mahmudi Ismail menduduki posisi sebagai Wali Kota Depok sebelum akhirnya dilanjutkan oleh Mohammad Idris sampai saat ini. Dampak positif dari kekuasaan yang dijalankan oleh pihak yang sama cenderung akan membuat program serta kebijakan yang ada dapat stabil dan berlanjut, terutama terkait tata kelola permukiman. Namun itu berlaku jika kebijakan tersebut tidak mendapat intervensi di luar Pemerintah Kota Depok. Contohnya adalah pada RPJMD 2016-2021, pertaturan ini mengalami perubahan karena ada ketentuan dari Pemerintah Pusat dalam penentuan nomenklatur program dan penetapan indikator. Selain itu UU Cipta Kerja juga memberikan perubahan yang cukup banyak akibat penyederhanaan prosedur sehingga banyak sekali peraturan-peraturan yang dirubah seperti pada sektor pertanahan, pra kerja, tata ruang, dan lainnya.

Namun jika melihat terhadap peraturan yang ada di Kota Depok, berdasarkan temuan dilapangan. Kebijakan yang ada sudah cukup stabil jika tanpa intervensi diluar Pemerintah Kota Depok. Contohnya selain Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 2019, penanganan RTLH berpatokan kepada aturan turunan yaitu Peraturan Wali Kota Depok Nomer 112 Tahun 2021 tentang pelaksanaan RTLH yang menyangkut seputar hal teknis atau lebih rinci, berdasarkan kedua aturan tersebut sejauh ini Pemerintah Kota Depok melalui Disrumkim Kota Depok sudah sesuai dengan aturan tersebut dalam menjalankan program RTLH seperti kriteria penerima bantuan RTLH yang mengacu kepada Perwal.

Aspek Prudence

Pada elemen *culture* yang kelima yaitu *prudence* atau kebijaksanaan. Berdasarkan temuan di lapangan akibat dari tingginya tingkat urbanisasi di Kota Depok sebagai sebuah konsekuensi pasti karena perannya sebagai salah satu kota satelit atau penopang dari DKI Jakarta. Membuat masyarakat yang ada di Kota Depok menjadi masyarakat majemuk, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, ras, budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda. Serta mempunyai bahasa dan corak sosial budaya yang tidak sama satu dengan lainnya. Selain itu berdasarkan hasil dilapangan didapati bahwa besarnya kemajemukan yang ada di Kota Depok hingga membuat Kota Depok sendiri krisis atas identitas dan sedang dalam proses mencari ciri khasnya.

Namun jika ingin menelaah kembali, seperti yang kita tau letak geografis Kota Depok berada di dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Keberagaman inilah yang perlu diakomodir oleh Pemerintah Kota Depok, salah satunya dalam membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang dinilai bijaksana. Bijaksana sendiri berasal dari kata «Wisdom» yang berarti tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Pertimbangan yang ada tentunya mencakup kepentingan yang ada di masyarakat sehingga memerlukan analisis yang mendalam ke masyarakat. Sementara kebijakan adalah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat unsur kebijaksanaan Pemerintah Kota Depok berdasarkan dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang kedua yaitu melihat dari pandangan masyarakat penerima bantuan RTLH yaitu Bapak Mahludin selaku serta Bapak Muhammad Machmun selaku penerima bantuan RTLH tahun 2022. Menurut mereka tentang program RTLH dalam mengatasi permukiman kumuh akibat dampak urbanisasi. Sejauh ini sudah cukup bijaksana, namun harapan penerima bantuan dengan bantuan yang diberikan pemerintah Kota Depok terkadang berbeda. Misalnya jika penerima bantuan membutuhkan perbaikan atap, terkadang pemerintah membetulkan hal yang lain yang dianggap lebih penting. Dalam hal ini kebijaksanaan menurut Pemerintah Kota Depok adalah memprioritaskan hal-hal yang dianggap perlu maka sering kali berbeda dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.

Dinamika Pemerintahan Kota Depok Terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi Tahun 2022 Dianalisis dari Elemen Capabilities

Aspek Thinking Ahead

Kapabilitas yang pertama adalah *thinkingahead* atau berpikir ke depan. Kemampuan berpikir kedepan merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di masa depan agar dapat memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat dan menghindari ancaman yang dapat menghambat

kemajuan masyarakat. Setiap rencana yang dibuat berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan mengenai tata kelola permukiman agar dapat menghadapi dampak urbanisasi yang terjadi yaitu munculnya permukiman kumuh. Maka semua kebijakan yang ada tersebut diupayakan agar tidak hanya dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi namun juga masalah yang akan datang akibat ketidakmenentuan kondisi di masa depan .

Pengaruh dari adanya peningkatan urbanisasi tentu salah satunya dikarenakan Kota Depok diapit oleh Kota-Kota besar seperti DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Namun belum ada kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh pemerintah terkait. Sehingga permasalahan permukiman hanya diselesaikan oleh pemerintah yang berwenang. Point isu permasalahan tersebut dianggap lebih dapat berdampak karena pengaruh urbanisasi dimana Pemerintah Kota Depok dituntut untuk memikirkan nasib kaum urban yang memutuskan untuk bermukim di Kota Depok dengan segala hambatan yang ada seperti maraknya rumah tidak layak huni, mahal nya harga tanah, muncul nya permukiman kumuh dan lainnya. Sedangkan point lainnya menurut Disrumkim Kota Depok adalah permasalahan bagi warga yang sudah lama bermukim di Kota Depok sehingga pengaruh urbanisasi tidak terlalu berpengaruh atau bukan merupakan akar permasalahan yang ada. Maka dari itu jika Pemerintah Kota Depok dapat mengakomodir kebutuhan rumah layak huni kaum urban sejak mereka pindah ke Kota Depok, permasalahan terkait sanitasi air, limbah dan lainnya bisa dicegah dengan program yang sudah ada dan berjalan.

Selanjutnya pada bagian penjelasan kualitas permukiman dan lingkungan hidup yang baik dan terjaga secara berkelanjutan di dalam RPJMD. Dijelaskan bahwa saat ini akibat meningkatnya segregasi fungsional antara wilayah bisnis dan permukiman ditambah tingginya urbanisasi menciptakan klaster hunian yang hanya dapat diakses oleh kelompok menengah-atas. Hal ini didasari bahwa saat ini Kota Depok selain memiliki sistem pertanahan yang kompleks dan mahal, tidak ada perumahan murah yang tersedia, yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas lingkungan di permukiman hunian tertata dan perkampungan.

Namun di satu sisi, uraian diatas adalah sudut pandang ketika kaum urban yang datang merupakan masyarakat dengan kemampuan taraf kehidupan ekonomi menengah kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah . Akan tetapi jika kaum urban yang datang ke Kota Depok merupakan masyarakat kaum menengah keatas atau masyarakat yang mumpuni secara ekonomi maka tingginya tingkat urbanisasi bisa menjadi sisi positif bagi Pemerintah Kota Depok dari segi pendapatan daerah karena pajak asli daerah Kota Depok salah satunya bersumber dari perizinan pembangunan hunian. Bahkan menurut Disrumkim Kota Depok, jika tanpa promosi kaum urban sudah menjadikan Kota Depok salah satu opsi untuk menetap.

Namun dalam memaksimalnya perlu untuk melakukan kolaborasi antara perangkat daerah,

masyarakat dan pihak swasta untuk membantu mewujudkan kawasan yang tertata serta menyikapi masalah tata kelola permukiman contohnya sama-sama menegakan perda/perwal yang sudah ada. Selain dari dampak positif akibat peningkatan urbanisasi dalam hal permukiman. Peningkatan urbanisasi juga menciptakan munculnya pusat-pusat perniagaan baru selain daerah margonda.

Aspek *Thinking Again*

Kapabilitas kedua adalah *thinkingagain* atau mengkaji ulang. Kapabilitas ini merupakan kemampuan untuk meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program yang sedang diterapkan sehingga pada akhirnya kebijakan yang sudah diterapkan dapat diperbaiki dan dimaksimalkan. Dengan kata lain kebijakan publik yang dibuat selama ini, apakah efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam hal ini, melihat sejauh mana keefektifan Pemerintah Kota Depok mengatasi dampak urbanisasi melalui berbagai macam kebijakan mengenai tata kelola permukiman yang sudah ada.

Adapun beberapa kebijakan yang sudah ada tersebut seperti pada RPJMD bagian isu strategis dan telaah kajian permasalahan bidang perumahan dan permukiman, kebijakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042, kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Depok Tahun 2019-2039, kebijakan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni , kebijakan Peraturan Walikota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Dan Persyaratan Jarak Bebas Bangunan Serta Pemanfaatan Pada Daerah Sempadan, kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan , kebijakan Peraturan Walikota Depok Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016, serta program bantuan RTLH dan pengadaan Rusunawa.

Sama halnya dengan pemberian subsidi, dimana semakin tingginya tingkat urbanisasi maka semakin tingginya anggaran yang diajukan untuk memberikan bantuan rumah subsidi jika hanya mengandalkan APBD Depok saja yang hanya bersekitar 3 sampai 4 Triliun rupiah. Kebijakan rumah bersubsidi ini dituangkan kedalam bantuan RTLH. Dimana Disrumkim Kota Depok berencana untuk mengusulkan penambahan anggaran dengan estimasi sekitar 30 Juta per Unit rumah. Pengajuan ini dikarenakan jumlah rumah tidak layak huni yang terus mengalami peningkatan dan bahan material untuk membangun rumah yang semakin mahal setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun sebelumnya

anggaran per unit rumah sebesar 25 juta yang terdiri dari 20 juta untuk material, 3 juta untuk jasa tukang, dan 2 juta untuk biaya sosialisasi. Dengan total penerima bantuan sebesar 73 penerima tahun 2022 yang berarti estimasi jumlah anggaran yang digunakan pada tahun 2022 kurang lebih 1,8 Miliar Rupiah.

Pengajuan penambahan jumlah anggaran tersebut tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan oleh Disrumkim dengan memberntuk tim monev untuk mengawasi program RTLH. Ruang lingkup bantuan yang didapat oleh penerima bantuan juga terbatas yaitu hanya pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur tengah, pekerjaan struktur atas, sanitasi dasar. Syarat penerima bantuan juga tidak hanya harus warga Depok, namun juga masuk kedalam kriteria umum dan kriteria teknis. Kriteria umum terbagi dua yaitu warga Kota Depok yang dibuktikan dengan KK dan KTP Daerah Kota dan masuk dalam data masyarakat miskin Kota Depok yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.

Selain itu terdapat pula kriteria teknis seperti lokasi rumah sesuai peruntukan permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan teknis lainnya serta tidak termasuk dalam rencana pengembangan jalan atau fasilitas umum lainnya, status kepemilikan lahan dan bangunan milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan, atau surat pernyataan bukti kepemilikan dari pihak yang bersangkutan diketahui oleh Ketua RT, RW, dan Lurah setempat serta merupakan rumah yang ditempati dan rumah pertama, luas bangunan tidak melebihi dari 150 m² meter persegi, kerusakan rumah bukan karena kejadian bencana alam dan atau fenomena alam atau non alam.

Serta yang terakhir adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah milik sendiri, tidak dalam sengketa, tidak akan diperjualbelikan dalam kurun waktu 3 tahun, dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial sejenis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa terdapat satu kriteria penerima bantuan yang perlu diperhatikan seperti syarat kriteria umum penerima bantuan RTLH seharusnya ditambahkan dengan maksimal tinggal di Kota Depok seperti sudah tinggal di Kota Depok selama 5 tahun terhitung sejak masyarakat mengajukan bantuan RTLH pada tahun berjalan.

Aspek Thinking Across

Kapabilitas yang ketiga dan terakhir yaitu *thinking across* atau belajar dari pengalaman negara/organisasi lain). Kapabilitas ini merupakan kemampuan untuk mengambil pendapat, ide, dan pikiran lain di luar kerangka berpikir yang telah ditetapkan secara tradisional dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan tertentu. Selama ini Pemerintah Kota Depok telah belajar dan menerapkan beberapa ide-ide yang selama ini didapat melalui pengalaman dan juga saran pihak lain dalam hal ini pemerintah daerah lainnya.

Adapun langkah yang dilakukan yaitu pertama, Pemerintah Kota Depok telah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dikarenakan pemerintah pusat

memiliki ahli yang lebih baik dan memiliki program yang saling terkait. Kedua, Pemerintah Kota Depok telah melakukan studi banding kepada daerah yang sudah cukup baik dalam menata permukiman akibat dampak urbanisasi seperti DKI Jakarta. Ketiga, telah melakukan kajian bersama dengan kota-kota sekitar depok dalam menata permukiman. Forum publik harus dibuat sejak awal pemukiman kembali untuk membahas proses pelaksanaan, kondisi kepemilikan lahan, biaya yang diperlukan untuk menyediakan lahan, dan layanan dasar. Keempat, melakukan survei masyarakat. Survei yang lengkap harus dilakukan untuk membantu komunitas dan pihak terkait membuat keputusan tentang kepemilikan lahan tempat pemukiman kembali. Survei ini harus mengumpulkan data yang divalidasi oleh semua pihak yang terlibat untuk memastikan proses pemberian lahan yang adil dan terbuka.

Kelima, membuat strategi baru. Masyarakat membutuhkan waktu dan bantuan untuk mengatur pindah dan memilih jenis rumah untuk mempertimbangkan luas lahan yang dibutuhkan, jenis rumah yang diinginkan, serta fasilitas dan ruang publik yang diinginkan di permukiman baru. Bantuan seperti ini sangat penting dalam memberikan dukungan moral kepada korban penggusuran.

Dari solusi tahapan permukiman kembali yang disarankan oleh Pemerintah Pusat tersebut, salah satu hal lainnya yang diadaptasi dan dilakukan adalah dengan membuat kawasan permukiman bersubsidi. Namun permukiman bersubsidi ini belum dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok sepenuhnya. Hanya berupa bantuan RTLH dan Rusunawa tanpa adanya perumahan horizontal yang bersubsidi. Namun di Kota Depok sudah pernah terdapat rumah subsidi yang dibangun waktu zaman presiden soeharto, hingga sekarang program tersebut bernama perumahan.

Selain itu pada langkah yang kedua yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam belajar terhadap pihak lain, Pemerintah Kota Depok menjadikan DKI Jakarta sebagai tolak ukur dalam menata permukiman. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta dinilai sudah cukup baik dalam mengelola tata kelola permukiman dengan berbagai kebijakan yang ada seperti adanya Pergubtentang RDTR DKI Jakarta yang belum dimiliki oleh Kota Depok. Padahal RDTR itu penting sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk untuk pemberian izin. RDTR DKI Jakarta sendiri mencakup Muatan RDTR terdiri atas tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan SubBWP yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Dinamika Pemerintahan Kota Depok Terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi Tahun 2022 Dianalisis dari Elemen Change

Dalam teori *Dynamic Governance System* (Boon Siong Neo & Chen, 2007:12), setelah elemen kapabilitas dan elemen budaya digabungkan, hasilnya

adalah *change* (perubahan). Perubahan yang terjadi adalah hasil dari pengaruh dari budaya yang disebabkan oleh dinamika pemerintahan. *Change* dalam perspektif teori *Dynamic Governance System* yang digunakan adalah konsep perubahan yang positif, yaitu kebijakan yang dihasilkan akan adaptif sesuai perkembangan zaman. Sejalan dengan teori tersebut, Pemerintah Kota Depok berupaya untuk menyesuaikan berbagai kebijakan dan program yang ada dengan berbagai perubahan agar kebijakan dan program tersebut dapat menghadapi permasalahan urbanisasi yang bersifat dinamis.

Pada akhirnya, perubahan berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi kebijakan yang adaptif. Selain itu kebijakan yang adaptif harus bertahan terhadap perkembangan zaman yang terus berubah. Adapun perubahan berdasarkan hasil penelitian yaitu yang pertama Pemerintah Kota Depok harus meniru kebijakan Pemerintah DKI Jakarta untuk menghapus NIK warganya yang berstatus warga DKI namun tidak tinggal di DKI Jakarta. Kedua, Pemerintah Kota Depok harus melakukan integrasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Agar bantuan RTLH hanya dapat diberikan oleh satu warga yang hanya memiliki rumah di satu Kota. Ketiga, Pemerintah Kota Depok harus menentukan minimal luas kavling jika ingin membangun rumah subsidi dengan swasta. Keempat, menetapkan harga rumah subsidi sederhana yang disesuaikan dengan penghasilan kaum urban dengan dibuatkan peraturan yang mengikat.

Kelima, bekerja sama membangun sarana transportasi yang terintegrasi dengan kota-kota lainnya seperti MRT, BRT, dan lainnya. Agar tidak hanya menunjang permukiman yang layak namun juga membuat Kota Depok tidak menjadi satu-satunya pilihan bagi kaum urban untuk menetap jika hanya pada melihat keuntungan transportasi. Dimana Kota Depok saat ini memiliki transportasi *Commuter Line* sekali perjalanan ke arah Jakarta Kota tanpa transit, dengan jarak menengah, bila dibandingkan dengan Bogor (jarak jauh), dan Tangerang selatan (*Green Line*-dua kali transit). Keenam, melakukan rencana jangka panjang dengan razia atau penindakan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok (Disrumkim, Kesbangpol, Satpol-PP) dan berkerja sama dengan Ketua RT setempat sebagai kuncinya untuk melapor apabila terdapat permukiman kumuh dan liar dalam jangka waktu yang lama apabila memang menetap.

Ketujuh, membuat detail atau SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b RPJMD yang dilakukan dengan tahap perencanaan; pembangunan; pemanfaatan dan pengendalian. Kedelapan, jika terkendala harga lahan, Pemerintah Kota Depok bisa mengajak pihak swasta dalam berinvestasi untuk membangun hunian bagi kaum urban sesuai kemampuan mereka. Dengan sedikit memangkas keuntungan finansial yang ada agar kaum urban tidak terlalu diberatkan serta pihak swasta tetap untung.

Kesembilan, menganalisa terkait permukiman teratur dimana jika terdapat kawasan kumuh yang membutuhkan insentif, sanitasi, pembangunan intra komunal (Sekolah, Rumah Sakit, dll). Pemerintah Kota Depok perlu untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Kesepuluh, Pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait harus menindak perumahan liar baik menjadi pihak ketiga antara swasta dengan masyarakat ataupun sebagai pihak pertama yang akan melakukan penertiban apabila berada di tanah pemerintah. Khususnya di tempat yang rawan seperti di pinggir kali, pinggir rel, pinggir setu, dan wilayah berbahaya lainnya serta dijadikan bangunan liar termasuk permukiman.

Kesebelas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun membuat pihak swasta kebingungan mengenai kewajiban membuat rusun umum 20% dari total rusun komersil. Sehingga Pemerintah Kota Depok perlu untuk menetapkan berapa range harga atau luasan. Seperti di DKI Jakarta yang mengatur ketentuan rusun umum melalui Peraturan Gubernurnya. Kedua belas, syarat kriteria umum penerima bantuan RTLH seharusnya ditambahkan dengan maksimal tinggal di Kota Depok. Contohnya seperti sudah tinggal di Kota Depok selama 5 tahun terhitung sejak masyarakat mengajukan bantuan RTLH pada tahun berjalan. Agar masyarakat kaum urban yang baru pindah domisili tidak didahulukan oleh program RTLH, sehingga warga Kota Depok yang sudah menetap lama dan berkontribusi terhadap Kota Depok bisa mendapatkan bantuan RTLH tersebut.

3. Kesimpulan

Walaupun Pemerintah Kota Depok tidak mengetahui teori *Dynamic Governance System* dari Boon Siong Neo dan Geraldine Chen, tetapi secara tidak langsung sebenarnya Pemerintah Kota Depok sudah menerapkan teori tersebut dalam menjalankan pemerintahannya khususnya dalam penyelenggaraan tata kelola permukiman dalam menghadapi dampak urbanisasi. Adapun Tantangan terbesar dalam penataan permukiman padat penduduk adalah memperbaiki lingkungan sekaligus dengan memperbaiki taraf kehidupan ekonomi warganya. Seperti dukungan pelatihan dan layanan kredit mikro yang mudah dan murah, serta membangun sarana dan prasarana ekonomi komunitas. Hal ini penting untuk dilakukan agar menghadapi permasalahan tata kelola permukiman akibat urbanisasi ini tidak hanya dari segi penanganan namun juga pencegahan.

Selain itu peneliti menyimpulkan sebuah fenomena dimana dengan adanya pengaruh dari adanya tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya perumahan kumuh atau tidak layak huni serta perumahan liar. Karena tingkat permukiman kumuh yang tinggi pula cenderung menyebabkan munculnya masalah penyerta lainnya terkait perumahan seperti permasalahan sanitasi atau limbah, lingkungan kotor, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Maka dari itu berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan

rekomendasi atau saran kepada Pemerintah Kota Depok atau pihak yang terlibat serta pembaca tentang kedua belas perubahan kebijakan adaptif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dijelaskan didalam Elemen *Change*.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Alan gibert dan Josef Gugler. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di negara Dunia Ketiga.pdf* (p. 314).
- Aligica, P. D., Boettke, P. J., & Tarko, V. (2019). Dynamic Governance. In *Public Governance and the Classical-Liberal Perspective*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190267032.003.0004>
- Amir, A. M. (2009). Penerapan dinamika kelompok. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad, I*, 120–130.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2022). *Laporan Kinerja Kota Depok 2022*. <https://depokkota.bps.go.id/publication/2023/02/03/ddb6f155984d3ee6aae55a85/laporan-kinerja-badan-pusat-statistik-kota-depok.html>
- Deddy Supriady Bratakusumah, P. . (2001). *OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Depok, B. K. (2022). *KOTA DEPOK DALAM ANGKA Depok Municipality in Figures 2022* (M. S. MBA & Y. Haniati (eds.)). BPS-Statistics of Depok Municipality. <https://doi.org/1102001.3276>
- Dewi, D. S. K. (2022). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK* (J. Harsono (ed.)). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). [http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku_Ajar Kebijakan Publik.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.pdf)
- Harahap, F. R., Sos, S., & Si, M. (2013). *DAMPAK URBANISASI BAGIPERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si. I(1)*, 35–45.
- Haudi, S.Pd., M. . (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (M. M. Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H. (ed.)). INSAN CENDEKIA MANDIRI (Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI).
- <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Indramayu, F. U. (2016). *FISIP UNWIR Indramayu 151*. 151–155.
- Isabella, I., Sesar, J., & Amaliatulwalidain, A. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 40–44. <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.650>
- Jelamu Ardu Marius. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 125–132.
- Khairi, H. (2022). *OTONOMI DAERAH : Gagasan dan Kritik* (Tim Penerbit Buku Kompas (ed.)). PT Kompas Gramedia Nusantara. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/860/1/Buku KPPOD.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/860/1/Buku_KPPOD.pdf)
- Kaufmann, D., & Mastruzzi, M. (2003). *Governance Indicators for 1996-1002. August*.
- Mifta, D., Ikhsandi, R., Yuningsih, N. Y., & Akbar, I. (2022). *Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius*. 7(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.14138>
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 134. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i1.238>
- Mulyawan, R. (2015). Sistem Pemerintahan Indonesia. In *UNPAD PRESS* (Vol. 4, Issue 1).
- Putri, G. A., Hakim, I. A., Ratna, E., & Wati, K. (2019). *Dinamika Kelompok pada Majelis Taklim Jami 'atul Muslimah di Desa Mataram Kabupaten Musi Rawas*. 3(1), 44–51. <https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.30889>
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29–34. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2313>
- Rauf, R. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (S. Maulidiyah (ed.)). marpoyan tujuh. [https://repository.uir.ac.id/1994/1/Buku_posisi dewan perwakilan.pdf](https://repository.uir.ac.id/1994/1/Buku_posisi_dewan_perwakilan.pdf)

- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Society, J. (2013). *DAMPAK URBANISASI BAGI PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si. I(1)*, 35–45.
- Solihah, R. (n.d.). *Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah*. 1–63.
- Sujarwoto. (n.d.). *Dinamika Konsep Kebijakan Publik*.
- Suprianto. (2014). *FUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar)*. 1(2), 139.
- Syahza, A., & Riau, U. (2011). *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2011* (Issue September).
- Taufiqurakhman. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK : PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN* (Issue 1993).
- Tjiptoherijanto, P. (2016). Urbanisasi Dan Pengembangan Kota Di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jp.12484>

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang

Idham Noviar¹⁾, Evi Priyanti²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat
Email Koresponden : 1910631180137@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

Development planning is a step that needs to be initiated by the Government in making a development policy. The purpose of this research was to produce an analysis related to the participation of the Warung Bambu Village Community regarding a development plan in Warung Bambu Village, Karawang Regency. This study uses a qualitative method using the theory of Sarah Cook and Steve Macaulay which consists of 4 indicators, namely decision making, implementation, satisfaction, and evaluation. Participation is indispensable in development planning. In planning for participatory development there are also clear criteria, including the involvement of all stakeholders, efforts to build strong and legitimized community institutions, the existence of a political process through negotiations or deliberations which ultimately leads to the formation of collective agreements with the principle of togetherness, and efforts community empowerment through joint learning activities as part of the democratization process. The results of the research include first, the Village Government in making decisions has carried out the Village Development Planning Meeting (MusRemBang), but it is only held once a year and does not directly involve the community but only representatives of each hamlet, namely the Hamlet Head; Second, the Village Government in realizing community involvement is still lacking because there is no forum for aspirations and the Village Information System (SID) via the website is still problematic; Third advantage received by the Government in Community involvement is still very less; And the fourth evaluation in reducing community participation in development planning is still a future plan.

Keywords : Society, Planning, Development, Indulgence

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah langkah yang perlu dimulai oleh Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan. Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk melahirkan sebuah analisis terkait partisipasi yang dimiliki Masyarakat Desa Warung Bambu mengenai sebuah perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Sarah Cook dan Steve Macaulay yang terdiri dari 4 indikator yaitu pengambilan keputusan, implementasi, kepuasan, dan evaluasi. Partisipasi sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan mengenai pembangunan yang partisipatif juga terdapat kriteria yang jelas, antara lain pelibatan pemangku kepentingan, terdapat kemauan membangun sebuah kelembagaan pada masyarakat yang inklusif, legislasi, terdapat langkah politik dengan menggunakan asas musyawarah lalu melahirkan sebuah perjanjian, dan terdapat pemberdayaan bagi masyarakat dengan prinsip mengacu pada belajar untuk bersama yang menjadi aspek dari sebuah asas demokrasi. Hasil penelitian meliputi pertama, Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan sudah menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa, namun hanya dilakukan setiap satu tahun sekali dan tidak melibatkan Masyarakat secara langsung melainkan hanya perwakilan setiap dusun yaitu Kepala Dusun; Kedua, Pemerintah Desa dalam mewujudkan keterlibatan Masyarakat masih kurang sebab tidak adanya wadah aspirasi dan Sistem Informasi Desa (SID) via website masih bermasalah; Ketiga keuntungan yang diterima Pemerintah dalam keterlibatan Masyarakat masih sangat kurang sekali; Dan keempat evaluasi dalam penurunan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih sebuah rencana kedepan.

Kata Kunci : Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi

1. Pendahuluan

Perencanaan membangun sebuah pedesaan desa menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemerintah untuk menciptakan gambaran tentang apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang sudah diinginkan. Nur, dkk (dalam Ningsih 2023), bahwa desa adalah sebuah bagian yang paling bawah untuk tingkatan daerah otonom serta memiliki sebuah instansi pemerintahan dan berperan penting dalam pembangunan.

Aparatur tingkat desa merupakan bagian dari aparatur penyelenggara negara, yang memiliki daftar tanggung jawab negara seperti mengelola instansi pada sebuah desa, melaksanakan serangkaian program untuk pembangunan kedepan dan memberikan sebuah pelayanan untuk kebutuhan administrasi penting yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat pedesaan dengan prinsip adil untuk semua. (Tara, 2022). Pada tahap bagian rencana, anggaran, implementasi dan sebuah kewajiban dalam tanggung jawab, pemerintah pada sebuah desa wajib mengajak serta berkolaborasi dengan masyarakat pada desanya dengan diwakili instansi BPD, untuk menyusun program untuk kerja dan menjadwalkan sebuah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat di desanya, lalu sesuai atas kemampuan yang dimiliki oleh desanya. (Goni, et al., 2023). Sebesar apapun jumlah uang yang dikerahkan dan dialokasikan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran, jika pengeluaran publik tidak ditujukan untuk mendorong perekonomian dan menyediakan barang publik, maka tidak akan membawa manfaat yang maksimal (Sutrisna, 2023).

Guna meraih tujuan pada sebuah pembangunan yang efisien serta efektif, diperlukan rencana yang berbasis partisipatif dengan mengikutsertakan setiap masyarakat pada langkah penilaian pembangunan, serta manfaat yang dilahirkan dapat menjadi satu kesatuan. Sastropoetro (dalam Sungi, 2023) memberikan pendapatnya tentang partisipasi, yaitu keterlibatan mental atau pemikiran dan emosional seseorang dalam situasi kelompok guna mendorongnya untuk berperan serta berkontribusi pada tim dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab kepada institusi yang bersangkutan.

Keterarikan dan perhatian terhadap penggunaan langkah rencana yang berbasis partisipatif dalam setiap Pemerintahan sangat dibutuhkan atau penting untuk masyarakat, langkah yang berfokus untuk kepentingan atau kebutuhan bagi publik secara luas, partisipasi (involvement), dinamisme, sinergi, legitimasi dan kemudahan (praktis). Pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, rencana untuk pembangunan bagi desa dapat terlaksana melalui kolaborasi yang baik terhadap masyarakat di desanya. Kemudian dalam Undang – Undang tersebut dalam ayat 2, guna merencanakan pembangunan yang efisien di sebuah desa, perangkat desa diharuskan

memiliki kewajiban melakukan sebuah langkah musyawarah yang bertujuan untuk melahirkan rencana perihal pembangunan kedepan di desa. Peraturan perundang-undangan perihal desa merupakan salah satu tanda kemauan politik yang dilakukan pemerintah guna melahirkan sebuah kemajuan substansial dalam meraih kesejahteraan berasas keadilan, kebahagiaan, dan rangkai pemberdayaan untuk masyarakat, serta memacu mobilitas dan keikutsertaan masyarakat di pedesaan (Yasir, 2023). UU Desa menempatkan desa sebagai andalan pembangunan di Indonesia (Waruwu, dkk., 2023).

Lalu, pembangunan yang memiliki rencana yang melakukan kolaborasi masyarakat memiliki ciri - ciri mencakup pelibatan pemangku kepentingan, terdapat kemauan membangun sebuah kelembagaan pada masyarakat yang inklusif, legislasi, terdapat langkah politik dengan menggunakan asas musyawarah lalu melahirkan sebuah perjanjian, dan terdapat pemberdayaan bagi masyarakat dengan prinsip mengacu pada belajar untuk bersama yang menjadi aspek dari sebuah asas demokrasi. Pembangunan yang dilakukan pada masyarakat pedesaan tidak hanya pembangunan yang ditujukan untuk membangun prasarana, sarana dan prasarana, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia khususnya masyarakat pedesaan desa dengan memberdayakan masyarakat (Hermawan, 2023).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Warungbambu, terdapat penyimpangan dalam hal musyawarah untuk pembangunan di desa karena masih menerapkan pendekatan *top-down planning* yang kuat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak memperkuat kepentingan penduduk, padahal tingkat keberhasilan partisipasi diukur dari sejauh mana masyarakat berpartisipasi pada rencana, pelaksanaan serta penggunaan program dalam sebuah pembangunan kedepan.

Partisipasi berbasis kolaborasi dengan masyarakat dalam sebuah penerapan pembangunan di desa belum optimal, padahal perangkat desa atau kepala desa sangat penting guna mengarahkan masyarakat untuk memiliki motivasi yang maju untuk berkolaborasi pada pembangunan di desanya yang dipimpin. Guna mengacu pada partisipasi berbasis kolaborasi dengan masyarakatnya, perangkat atau aparatur di sebuah desa berkewajiban melahirkan sinergi pada rencana kegiatan dengan selalu memperhatikan etika sosial. Dengan itu, peaksanakan kegiatan sebuah pembangunan bisa menjamin kesejahteraan bagi masyarakat luas serta dapat menghadirkan partisipasi berbasis kolaborasi dengan masyarakat dalam pembangunan kedepan di desa.

Penelitian sebelumnya yang terkait pada pembahasan penelitian yaitu pertama, penelitian Ningsih Widiya yang berjudul “PENGARUH PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPM) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)” ditemukan hasil penelitian yaitu partisipasi yang berbasis kolaborasi masyarakat desa Pancuran Gading terkait pembangunan di desanya dominan masih berdasarkan kegiatan pemerintah serta partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat masih digalang pemerintah di desanya atau masih mencari masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi; Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ecin Sante, Vecky A.J Masinambow, dan Jacline I. Sumual yang berjudul “ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi: Desa Tabulo Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo)” ditemukan hasil penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan memiliki dampak positif namun tidak berpengaruh pada pembangunan kedepan di desa, sehingga ketika kolaborasi masyarakat di perencanaan mengalami kenaikan maka diikuti dengan meningkatnya kinerja/proses dari pembangunan desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Skolastika Desinta yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI MELALUI USAHA KECIL MENENGAH (Studi di UD Tohu Srijaya, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)” ditemukan hasil penelitian yaitu partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat untuk penerapan pembangunan kedepan desa mandiri dengan memanfaatkan UMKM di Ud Tohu Srijaya cukup baik, masyarakat berkolaborasi pada langkah pengambilan sebuah keputusan, namun faktor penghambatnya adalah rendahnya pendidikan yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan teknologi modern, dimana masyarakat belum memiliki keterampilan mengenai dunia modern, dan masalah Covid-19 yang menyebabkan penurunan pemasaran produk yang mereka jual; Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rego Bobby Afrionaldy dan Rina Martini yang berjudul “TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YANG TEGUH WIBOWO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2021” ditemukan hasil penelitian yaitu gaya kepemimpinan yang dimiliki kepala desa Yan Teguh Wibowo guna menciptakan sebuah peningkatan partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kedepan di desa Ngale memiliki tipe kepemimpinan yang demokratis, tetapi kekurangan yang dimilikinya yaitu kepala desa saat memberikan sosialisasi perihal pentingnya sebuah pembangunan di desanya masih diwakilkan kepala dusun; Dan kelima, penelitian Yosua Lumingkewas, Ventje Kasenda, dan Neni Kumayas yang berjudul “Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Tounalet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa” ditemukan hasil penelitian yaitu Peran Organisasi masyarakat Rukun Tetangga Malawe guna mempertegas rencana pembangunan kedepan dengan berfokus atas masalah

serta semua kebutuhan yang menimpa masyarakat perlu mengacu pada aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis memiliki karakteristik terbaru sebagai membedakan atas hasil yang telah ditemukan pada penelitian sebelumnya meliputi objek pada penelitian ini dilakukan di Desa Wanasari Kabupaten Karawang, dan penelitian ini menggunakan konsep teori partisipasi Cohen dan Uphoff (dalam Safitri,dkk., 2022) sebagai alur berfikir dalam menganalisa mengenai partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan di desa Warung Bambu Kabupaten Karawang yakni:

Pertama, pengambilan Keputusan merupakan aspek yang berkaitan dengan mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan masyarakat mengenai ide atau gagasan yang berhubungan dengan kebaikan bersama. Kedua, implementasi merupakan aspek pengerahan sumber daya keuangan dan kegiatan administratif pada sebuah ketetapan rencana, mengenai rencana, implementasi ataupun tujuannya.

Terakhir, kepuasan merupakan aspek kinerja yang dicapai baik secara tulisan maupun angka. Keempat, evaluasi merupakan aspek perbaikan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya, serta untuk memahami capaian pelaksanaan program yang telah dilakukan.

Penelitian ini mengacu atas metode deskriptif melalui pendekatan yang berbasis penelitian yang kualitatif. Langkah penelitian yang kualitatif merupakan langkah penelitian berbasis post positivism, untuk menganalisa atas suasana lapangan yang asli terjadi. Langkah penelitian memiliki maksud untuk memberikan sketsa perihal bagaimana pelaksanaan yang terjadi selama partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Akhirnya dapat mengetahui partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat berjalan dengan semestinya atau gagal.

Penggunaan sumber data untuk membantu penulis yaitu data primer dan data sekunder yang didapat melalui para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan perihal partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, meliputi: data primer didapat melalui pelaksanaan observasi peneliti dan pelaksanaan wawancara informan perihal partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Data sekunder didapat melalui buku sastra, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah serta berita di media online perihal dengan isu-isu terkait dengan partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Data yang dikumpulkan wawancara perihal partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang; Kedua, Observasi Desa Warung Bambu untuk mengamati partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang; Ketiga, penulis mendokumentasi.

Teknik analisis penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis kegiatan dalam proses penelitian seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (dalam Khikmah, 2020), yang pertama, meliputi minimalisasi (reduksi) data, yaitu agregasi data yang diperoleh kemudian mengidentifikasi data untuk penelitian ini dengan klasifikasi yang ada. Sementara data yang kurang relevan dikecualikan. Data yang relevan terkait dengan masalah utama yang diidentifikasi; Kedua, data display atau penyajian data, yaitu penyajian berbagai informasi data yang telah dianalisis untuk memberikan gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari penelitian yang dilakukan; dan Ketiga, menarik kesimpulan dan verifikasi yaitu kesimpulan awal sebagai langkah awal untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian ini.

2. Pembahasan

Kondisi pengambilan keputusan dalam partisipasi berbasis kolaborasi Masyarakat Desa Warung Bambu terkait perencanaan sebuah pembangunan kedepan Di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Pengambilan keputusan merupakan sebuah aspek partisipasi yang berkaitan dengan penetapan suatu kebijakan atau hasil kesepakatan. Keputusan yang baik berlandaskan atas aspirasi masyarakat, sehingga tujuan yang ingin dilakukan dapat sesuai dengan Masyarakat dan Bersama. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Pemerintah di Desanya dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan sudah menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa. Namun hanya dilakukan setiap satu tahun sekali dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung melainkan hanya perwakilan setiap dusun yaitu Kepala Dusun. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara konsisten dan tidak melibatkan Masyarakat secara merata.

Kepuasan Masyarakat Desa Warung Bambu dalam pengambilan keputusan masih terbilang kurang puas. Sebab, kurangnya wadah aspirasi dalam menampung aspirasi kritik dan saran, sehingga Masyarakat merasa pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan masih kurang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pengambilan keputusan di lingkungan desa yang baik, perlu memiliki sebuah kinerja organisasi pemerintah yang baik pada ruang lingkup pemerintah desanya. Kinerja atau dalam Bahasa Inggris "*Performance*" merupakan sebuah proses mengubah sebuah energi menjadi sebuah nilai, serta semua proses

yang terjadi pada ruang lingkup manajemen (Ndraha dalam Samangun, dkk., 2023). Kemudian, menurut Gibson (dalam Samangun, dkk., 2023) kinerja yaitu sebuah hasil atas pelaksanaan pekerjaan terkait tingkat pencapaian tujuan instansi atau organisasi, tingkat efisiensi, dan keefektifan dari pelaksanaan pekerjaan lainnya.

Dengan adanya kinerja yang baik dari organisasi pemerintah desa membuat pengambilan keputusan dalam hal partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik pula tanpa adanya hambatan serta konflik yang timbul dalam pelaksanaannya.

Partisipasi dari masyarakat atas pengambilan keputusan yakni sebuah sikap paling utama dalam menghasilkan sebuah aturan atau kebijakan dengan memberikan sebuah peluang atau kontribusi yang maksimal dari masyarakat untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Aji, dkk., 2022). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, sebab akan memberikan sebuah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan menciptakan keterlibatan secara aktif selalu masyarakat dalam hal diskusi maupun rapat dalam musyawarah pada desa.

Selanjutnya, pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara langsung memerlukan sebuah penentuan alternatif dengan seluruh lapisan masyarakat agar menghasilkan sebuah kesepakatan perihal kepentingan bersama maupun perencanaan bersama (Cohen dan Uphoff dalam Safitiri, dkk., 2022). Kaho (dalam Aji, dkk., 2022) menyatakan bahwa perwujudan atas lahirnya sebuah partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan yakni ikut aktif dalam memberikan pemikirannya maupun gagasan dalam sebuah wadah aspirasi, turut hadir dalam lingkup diskusi, dan memberikan masukan maupun saran atas kebijakan atau program yang telah dilaksanakan.

Pembangunan yang berlandaskan asas partisipasi masyarakat tentunya akan memberikan sebuah capaian yang sesuai atas keinginan Masyarakat serta tidak hanya memuaskan kelompok atau individu saja. Diperlukan sebuah sinergitas yang baik antara Pemerintah Desa Warungbambu Kabupaten Karawang dengan Masyarakat Desa Warungbambu Kabupaten Karawang untuk meraih pembangunan yang memberikan dampak positif serta memberikan kemajuan atas desanya. Apabila pembangunan dapat berjalan dengan baik, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pula bagi masyarakatnya serta Masyarakat juga akan puas dengan pengambilan keputusan atas aspirasinya.

Pengambilan keputusan merupakan sebuah bagian dari asas demokrasi yang harus ditanamkan dalam ruang lingkup Pemerintahan Desa, sebab dengan adanya pengambilan keputusan yang berkolaborasi dengan Masyarakat tentunya mewujudkan sebuah transparansi serta keterbukaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa, dan Masyarakat pun dapat mempercayai setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan Pemerintah Desa tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat merugikan Masyarakat Desa.

Demi kemajuan pembangunan desa yang baik, keputusan bersama menjadi sebuah kunci atas keberhasilan – keberhasilan yang lahir dalam pembangunan Desa, sehingga Masyarakat Desa dapat hidup sejahtera tanpa harus menelan kepahitan atas kepentingan para Pejabat Pemerintah Desa.

Pengimplementasian partisipasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Implementasi merupakan aspek selanjutnya pada partisipasi yang sangat penting dan berkaitan dengan perwujudan nyata. Implementasi dalam partisipasi yang baik berdasarkan terpenuhinya kebutuhan Masyarakat yang diwujudkan dalam langkah baik dan fakta. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Implementasi dalam mewujudkan keterlibatan Masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan masih kurang sebab tidak adanya wadah aspirasi dan masih dalam prosesnya pelayanan yang efisien, cepat, dan berbasis *online* menjadi faktor kurang pedulinya Masyarakat terhadap Pemerintah, seperti Sistem Informasi Desa (SID) via *website* masih bermasalah.

Implementasi terkait keterlibatan secara langsung dalam perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu masih sangat kurang, sebab komunikasi yang diberikan pemerintah untuk turun ke Masyarakat sangat kurang. Tahap implementasi dalam partisipasi menjadi sebuah langkah yang sangat berpengaruh atas pembangunan yang mementingkan aspirasi masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan individu atau kelompok, sehingga hasil dari pembangunan dapat memuaskan Masyarakat serta tidak menyengsarakan Masyarakat. Kemudian, pada tahap pelaksanaan merupakan sebuah komponen yang cukup penting dan dapat mengukur tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik atau tidak (Safitri, dkk., 2022). Menurut Cohen dalam Uphof (dalam Safitri, dkk., 2022) menyatakan bahwa partisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan membutuhkan sebuah unsur atau seluruh lapisan masyarakat dalam hal menggerakkan sumber daya serta dana atas pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dilihat program pembangunan yang dijalankan berhasil atau tidak.

Partisipasi Masyarakat atas sebuah implementasi atau pelaksanaan berupa gotong – royong, berpartisipasi aktif dalam kepanitiaan, melaksanakan kerjabakti, serta sebagai pengumpul informasi untuk dapat disebarluaskan pada media sosial. Partisipasi Masyarakat desa dalam pembangunan desa sangatlah penting, sebab pembangunan yang berbasas demokrasi memerlukan sebuah keikutsertaan Masyarakat desa didalamnya. Apabila Masyarakat desa tidak terlibat langsung dalam pembangunan di desa tentunya pembangunan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta tidak

lahirnya sebuah transparansi kepada masyarakat desa.

Dalam menciptakan implementasi yang berlandaskan partisipasi dengan berbasas demokrasi harus memiliki empat prinsip pokok atas demokrasi yang berdasarkan hukum. Menurut Asshidiqie (dalam Widodo, dkk., 2023) empat prinsip demokrasi atas hukum meliputi menjamin kesetaraan lalu menjamin juga kesetaraan dalam hidup di berbagai hal; Kedua mengakui dan menghormati seluruh perbedaan yang muncul atau pluralitas; Ketiga, Seluruh aturan yang bersifat mengikar dimanfaatkan untuk sumber referensi bersama; Dan keempat, dalam menyelesaikan perselisihan menggunakan sistem peraturan yang diakui bersama.

Pemerintah desa sangat penting memberikan sebuah wadah kepada para masyarakat desa untuk dapat memberikan tenaga serta pikiran pada implementasi pembangunan. Sebab, agar melahirkan sebuah hasil pembangunan yang menguntungkan masyarakat desa dan memberikan keterbukaan atas segala sesuatu yang terjadi selama pembangunan

Apabila Pemerintah desa sudah sangat dekat dengan masyarakat dalam hal pembangunan, tentunya permasalahan seperti korupsi, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan tidak akan terjadi, serta pembangunan desa akan mengarah pada kemajuan. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat desa akan terjamin juga jika pembangunan yang dijalankan memberikan wadah masyarakat untuk berperan aktif didalamnya.

Keuntungan dalam partisipasi Masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Keuntungan merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan penerimaan positif yang tidak merugikan. Keuntungan tidak mudah didapatkan sebab perlunya sebuah proses yang diberikan harus baik dan mengurangi kerugian-kerugian yang terjadi. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Keuntungan yang diterima Pemerintah dalam keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlibat cukup namun masih sangat kurang sekali. Pemerintah Desa masih berupaya untuk memberikan peningkatan pelayanan dan fasilitas untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang berlandaskan partisipasi Masyarakat.

Masyarakat Warung Bambu belum juga dapat menerima keuntungan terkait fasilitas dan pelayanan dari Pemerintah Warung Bambu. Kepuasan yang buruk Masyarakat membuat Masyarakat kurang peduli terhadap Pemerintah dalam perencanaan pembangunan, perlunya memperbaiki kedekatan dengan Masyarakat

Menurut Cohen dalam Uphof (dalam Safitri, dkk., 2022) Partisipasi yang melahirkan sebuah keuntungan tentunya memerlukan sebuah hasil yang memberikan manfaat dan berkualitas, serta tingkat

keberhasil dilihat dari segi kuantitas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah faktor pendukung atas partisipasi masyarakat. Menurut Hendrawati Hamid (dalam Safitri, dkk., 2022) faktor pendukung atas partisipasi meliputi terdapat unsur kesempatan dalam lingkungan kehidupan untuk memberikan peluang berkontribusi; Kedua, terdapat kemauan atau motivasi untuk melahirkan rasa semangat dalam turut serta berkontribusi yang dimana terdapat manfaat yang dapat dirasakan; Dan ketiga, terdapat kemampuan atas kesadaran pada diri sendiri bahwa dapat mampu untuk berkontribusi dan hal tersebut dapat berupa pikiran, waktu, tenaga serta material lainnya. Kepuasan dalam partisipasi tidak terlepas atas kualitas maupun kuantitas dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan (Aji, dkk., 2022). Apabila pembangunan yang dihasilkan memberikan manfaat positif maka kepuasan masyarakatpun dapat lahir. Sebaliknya, jika hasil pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat maka kemungkinan tidak akan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pembangunan desa yang melahirkan sebuah kepuasan bagi masyarakat desa membutuhkan sebuah sinergitas antara seluruh *stakeholder* Pemerintah desa dengan seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan adanya sinergitas tersebut, tentunya akan memberikan sebuah Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Apabila pembangunan desa dirasa melahirkan kepuasan masyarakat desa, tentunya infrastruktur desa dapat mengarah pada peningkatan serta dapat memberikan banyak keuntungan agar dapat mendorong desa menjadi desa yang maju.

Desa yang maju memerlukan sebuah sarana dan prasarana serta pelayanan masyarakat yang berkualitas. Hal tersebut menjadi pembeda dengan desa yang tidak maju. Desa yang tidak maju tentunya memiliki sara dan prasarana yang tidak baik, pelayanan masyarakat sangat tidak profesional, serta tidak adanya kepuasan yang timbul dalam partisipasi masyarakat desa. Desa maju memberikan kesejahteraan masyarakat yang baik dan terus meningkat, sebab masyarakat desa disajikan dengan beberapa sarana atau infrastruktur yang memadai seperti jalan yang baik dan infrastruktur yang memadai seperti pada bidang Kesehatan yakni memiliki posyandu dan dokter yang profesional, bidang sosial yakni terdapat pasar yang bersih, bidang agama yakni terdapat sarana beribadah untuk seluruh agama seperti masjid, gereja, dan tempat ibadah agama lainnya, dan bidang Pendidikan yakni akses jalan menuju sekolah yang baik dan tidak menyulitkan murid.

Apabila semua sarana maupun prasarana telah terpenuhi dalam segala bidang, maka dapat melahirkan sebuah kesejahteraan masyarakat yang memberikan banyak kepuasan atas kinerja pemerintah desa yang bekerja dengan penuh semangat membangun desa. Berbeda dengan desa yang tidak memiliki berbagai sarana maupun prasarana di berbagai bidang, tentunya masyarakat desa tidak akan merasakan manfaat serta tidak adanya kepuasan yang lahir dalam pembangunan. Pemerintah desa seakan mementingkan kepentingan

kelompok maupun pribadinya. Pemerintah yang mementingkan kelompok maupun pribadi merupakan sebuah pemerintahan yang tidak berasas demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat tidak akan menjadi sebuah acuan. Pembangunan desa yang dipimpin oleh pemerintah dengan tidak berasas demokrasi akan memberikan sebuah ketidakhadiran dalam hal sarana maupun infrastruktur di desa.

Pengevaluasian ketika terjadi penurunan partisipasi berasas kolaborasi masyarakat pada perencanaan pembangunan kedepan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Evaluasi merupakan aspek yang berkaitan dengan perbaikan permasalahan yang timbul. Evaluasi sangat diperlukan dalam hal meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Evaluasi merupakan kunci dalam menerapkan perubahan yang baik. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Evaluasi terhadap penurunan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih baru menjadi sebuah rencana dan belum dilaksanakan terkait evaluasi penurunan partisipasi seperti pembuatan pelayanan sistem online dan peningkatan fasilitas yang masih diproses atau direncanakan Masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Evaluasi Pemerintah di Desa pada kemajuan partisipasi berasas kolaborasi masyarakat pada perencanaan pembangunan kedepan masih belum ada perubahan yang signifikan dan inovasi belum menguntungkan masyarakat, serta tidak terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat di Desanya.

Menurut Cohen dalam Uphof (dalam Safitri, dkk., 2022) Partisipasi dalam evaluasi berkaitan atas pelaksanaan yang dilakukan secara menyeluruh dan bertujuan mengetahui keberhasilan program. Masyarakat sangat penting dalam hal melakukan pengawasan atas evaluasi yang terjadi.

Rapat evaluasi menjadi sebuah wadah yang dilakukan pemerintah desa untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait keberhasilan dan kegagalan dalam kebijakan pembangunaa, kemudian memberikan sebuah sosialisasi terkait bentuk fisik atas kebijakan infrasturktur maupun sarana dalam pembangunan yang telah dilakukan (Aji, dkk., 2022). Evaluasi menjadi sebuah pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemerintah desa dalam membuat sebuah laporan pertanggung jawaban untuk dapat disampaikan pada masyarakat desa.

Pemerintah desa yang berasas demokrasi tentunya memberikan sebuah wadah untuk penyampaian terkait keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengawasan yang melibatkan masyarakat untuk dapat mengawal jawannya pembangunan desa.

Evaluasi sangat penting dalam hal pembangunan, sebab untuk menjadi tolak ukur atas kelebihan dan kekurangan kemampuan pemerintah desa. Evaluasi perlu melahirkan sebuah kebijakan pembangunan yang mengarah pada kemajuan dengan berkolaborasi pada

aspek teknologi seperti media sosial atau internet. Sehingga pembangunan yang dijalan tidak hanya selalu begitu saja dan tidak ada perubahan. Pemerintah desa harus memberikan sebuah inovasi yang baru dalam pembangunan desa, sehingga pembangunan yang dihasilkan dapat memberikan kemajuan bagi desa serta masyarakat dapat mendapatkan keuntungan yang baik dalam pembangunan yang terjadi pada desa yang dihidupinya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang”, kesimpulannya pada pengambilan keputusan, Pemerintah di Desa terkait pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan sudah menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa. Namun hanya dilakukan setiap satu tahun sekali dan tidak melibatkan Masyarakat secara langsung melainkan hanya perwakilan setiap dusun yaitu Kepala Dusun. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara konsisten dan tidak melibatkan Masyarakat secara merata. Kepuasan Masyarakat Desa Warung Bambu dalam pengambilan keputusan masih terbilang kurang puas.

Kedua pada aspek implementasi, Pemerintah Desa dalam mewujudkan keterlibatan Masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan masih kurang sebab tidak adanya wadah aspirasi dan masih dalam prosesnya pelayanan yang efisien, cepat, dan berbasis *online* menjadi faktor kurang pedulinya Masyarakat terhadap Pemerintah, seperti Sistem Informasi Desa (SID) via website masih bermasalah. Komunikasi Pemerintah untuk turun ke Masyarakat sangat kurang; Ketiga pada aspek keuntungan, Keuntungan yang diterima Pemerintah dalam keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlibat cukup, namun masih sangat kurang sekali. Pemerintah Desa masih berupaya untuk memberikan peningkatan pelayanan dan fasilitas untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang berlandaskan partisipasi Masyarakat. Masyarakat Warung Bambu belum juga dapat menerima keuntungan terkait fasilitas dan pelayanan dari Pemerintah Warung Bambu.

Keempat pada aspek evaluasi, evaluasi dalam penurunan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih baru menjadi sebuah rencana dan belum dilaksanakan terkait evaluasi penurunan partisipasi seperti pembuatan pelayanan sistem online dan peningkatan fasilitas yang masih diproses atau direncanakan masyarakat terhadap rencana pembangunan kedepan. Evaluasi Pemerintah di Desanya perihal kemajuan partisipasi berasas kolaborasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih belum ada perubahan yang signifikan dan inovasi belum dapat dirasakan oleh masyarakat

Daftar Pustaka

- Afrionaldy, R. B. (2023). TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YAN TEGUH WIBOWO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 532-545.
- Agustin, M., & Rahaju, T. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Aji, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(3).
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135-142.
- Desinta, S. K. O. L. A. S. T. I. K. A., Adiwidjaja, I., & Romi, M. N. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mandiri Melalui Usaha Kecil Menengah (Studi di UD Tohu Srijaya, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Goni, K. M., Lopian, M. T., & Egeten, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(1).
- Hermawan, E. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Partisipatif Membawa Pembangunan Pada Masyarakat Desa. *Distingsi: Journal of Digital Society*, 1(2), 12-17.
- Khikmah, H. (2020). *Analisis Tingkat Konsentrasi Belajar Dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau Dari Hasil Belajar Siswa Kelas V Umar Bin Khattab SDIT Qurrota A'yun Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- Lumingkewas, Y., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2023). Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *GOVERNANCE*, 3(1).

- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200.
- Mustanir, A., Fariad, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.
- Safitri, N., Myrna, R., & Ismanto, S. U. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 304-313.
- Sante, E., Masinambow, V. A., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi: Desa Tabulo Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 109-120.
- Sungi, G. (2023). PENGARUH PERANAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN DI DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *Cross-border*, 6(1), 159-184.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(1), 7-15.
- Sutrisna, I. W. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI ANGGARAN DI DESA. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 85-94.
- Tara, A. L., Suprojo, A., & Setiamandani, E. D. (2023). *Strategi Komunikasi Aparatur Desa Pada Pembangunan Menuju Desa Mandiri* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Waruwu, H. A., Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *PERSPEKTIF*, 12(1), 161-170.
- Widiya, N. (2023). *PENGARUH PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Widodo, A., Kurniawan, RC, & Maryanah, T. (2023). Permasalahan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8 (1).
- Yasir, M., & Munawaroh, W. S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 330-340.

Sistem Penyimpanan Arsip Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Plelen

Aria Mulyapradana¹⁾, Aghus Jamaludin Kharis²⁾, Farikul Muafiq³⁾, Intan Indi Paramita⁴⁾,
Madina Cahya Lestari⁵⁾

^{1), 2), 3), 4), 5)} *Administrasi Perkantoran, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
Jl. Karangdowo, No. 9, Kemoren, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan
Email Koresponden : farikhul@gmail.com*

ABSTRACT

Archives are very important for any organization or company. In order for work activities, decision making and public services to run well, archives must be stored properly and correctly. Researchers want to research more about public services and archive storage systems. The purpose of this study was to determine the archive storage system and public services at the Plelen Village Office. This study used triangulation and qualitative description. This research was conducted at the Plelen Village Office and used primary and secondary data. The village head, village secretary and three village officials were informants for this research. The result of this research is that the archive storage system at the Plelen Village Office has been running quite well but still needs to be improved because the archive storage system is still manual, the number of archives created is not proportional to the area where archives are stored, it is necessary to add archive equipment to store archives and start switching to using information technology, one of which is Google Drive which is a solution to archive storage. The use of Google Drive at the Plelen Village Office has not been utilized optimally due to the limited number of human resources who handle archives, providing archival training and information technology to village officials which are not routinely carried out so that there is a lack of knowledge and skills in archive storage. Therefore, the provision of training on records management and digitization needs to be scheduled so that records managers can manage their records properly and the quality of public services and the image of the organization is well maintained.

Keywords: *archive, archive storage, dynamic archive, google drive, public services.*

ABSTRAK

Arsip sangat penting bagi setiap organisasi atau perusahaan. Agar aktivitas kerja, pengambilan keputusan dan pelayanan publik berjalan baik maka arsip harus disimpan dengan baik dan benar. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pelayanan publik dan sistem penyimpanan arsip. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyimpanan arsip dan pelayanan publik di Kantor Desa Plelen. Penelitian ini menggunakan triangulasi dan deskripsi kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Plelen dan menggunakan data primer dan sekunder. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan tiga perangkat desa adalah informan penelitian ini. Hasil penelitian ini yakni sistem penyimpanan arsip di Kantor Desa Plelen sudah berjalan cukup baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan karena sistem penyimpanan arsip yang masih manual, jumlah arsip yang diciptakan tidak sebanding dengan luas tempat penyimpanan arsip, perlu ditambahkannya peralatan arsip untuk menyimpan arsip dan mulai beralih menggunakan teknologi informasi salah satunya google drive yang menjadi solusi terhadap penyimpan arsip. Penggunaan google drive di Kantor Desa Plelen belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani arsip, pemberian pelatihan kearsipan dan teknologi informasi kepada perangkat desa yang tidak rutin dilakukan sehingga kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penyimpanan arsip. Oleh karena itu, pemberian pelatihan pengelolaan arsip dan digitalisasi perlu di jadwalkan agar pengelola arsip dapat mengelola arsipnya dengan baik dan kualitas pelayanan publik serta citra organisasi tetap terjaga baik.

Kata Kunci : Arsip, Penyimpanan Arsip, Arsip Dinamis, Google Drive, Pelayanan Publik.

1. Pendahuluan

Fungsi kantor salah satunya sebagai pusat kegiatan administrasi dimana semua informasi terpusat di kantor. Maka, informasi tersebut menjadi acuan pembuat kebijakan dan keputusan sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan. Tertib administrasi menjadi faktor utama keberhasilan tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi, adapun yang dimaksud yakni tertib dalam pengelolaan arsip. Karena arsip berfungsi sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan, para pengelola kantor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip dari awal pembuatan hingga distribusi, penyimpanan, dan perawatan. (Mulyapradana et al., 2019).

Fungsi lain dari arsip yakni sebagai penunjang perencanaan, sebagai kontrol, sebagai alat bukti, sebagai pengingat, dan untuk kepentingan umum dan ekonomi. Maka, arsip yang dikelola merupakan aktivitas yang penting bagi organisasi maupun perusahaan (Suhendi et al., 2020).

Arsip berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dijelaskan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (2009).

Sumber data di organisasi maupun perusahaan yakni arsip maka perlu ditangani secara baik dan benar akan tetapi sering kali kurang diperhatikan dalam pengelolaan arsip sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas kerja di organisasi. Untuk meminimalisir kondisi tersebut maka diperlukannya perhatian khusus dari semua orang yang bergabung di organisasi oleh karena itu diperlukannya sistem informasi manajemen sebagai solusinya (Mulyapradana et al., 2019). Ricks, data yang disimpan dalam bentuk media data apapun yang dibuat atau diterima oleh organisasi untuk membantu operasinya berjalan lebih efisien dikenal sebagai arsip. (Suhendi et al., 2020).

Seiring dengan waktu, banyaknya arsip yang dihasilkan oleh perusahaan atau instansi perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pengelola karena semakin banyaknya arsip maka akan berdampak pada penumpukan arsip. Guna mengatasi penumpukan arsip maka diperlukannya kolaborasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (Muhidin et al., 2016).

Adanya sistem informasi manajemen dapat membantu dalam aktivitas kerja, sejalan dengan riset dari Ahmad Bahrum Maula Rahman, dkk menyampaikan bahwa penggunaan sistem informasi kearsipan berbasis web dapat membuat proses penyimpanan data surat masuk dan surat keluar lebih mudah (Rahman et al., 2021).

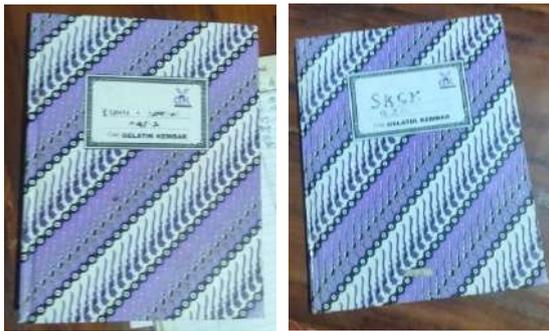
Untuk menjaga kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara keseluruhan maka perlu memperhatikan pengelolaan arsip di instansi atau organisasi karena arsip memiliki nilai guna yang penting oleh karena itu penyimpanan arsip wajib dijalankan oleh pengelola. Arsip yang disimpan memiliki nilai fungsi sebagai alat bukti dan dokumen bagi organisasi (Muhidin & Winata, 2016; Nopriana, Liliana, et al., 2022). Maka, pengelolaan arsip menjadi bagian yang penting di sebuah instansi salah satunya adalah Kantor Pemerintah Desa.

Kantor Desa Plelen memiliki tingkat penciptaan arsip yang cukup banyak rata-rata dalam satu bulan bisa menghasilkan lima puluh arsip yang tercipta bahkan lebih, adapun surat yang diciptakan yakni untuk segala kategori surat seperti surat pengajuan KTP, surat pengajuan pindah penduduk, permohonan pengajuan SKCK, dan lain-lain maka arsip yang berada di Kantor Desa Plelen masuk ke dalam kategori arsip dinamis dan aktif. Menurut undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu serta frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus (2009).

Sebagaimana dinyatakan oleh Sambas dan Hendri, arsip dinamis digunakan secara langsung selama proses penciptaan dan disimpan selama periode waktu tertentu. Nilai guna arsip dinamis terdiri dari nilai guna primer dan sekunder. Nilai guna primer didasarkan pada kepentingan organisasi yang menciptakan arsip, sedangkan nilai guna sekunder didasarkan pada kepentingan penerima atau pengguna arsip. Nilai guna khusus arsip dinamis termasuk nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna pajak, nilai guna penelitian, nilai guna pendidikan, dan nilai guna dokumen (Muhidin & Winata, 2016).

Proses penciptaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali dapat dipercepat dengan pengelolaan arsip dinamis. Kegiatan seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional kerja, penyediaan informasi, dan penyedia bukti kebijakan mendapat manfaat darinya (Muhidin & Winata, 2016; Sudarsono, 2013).

Hasil dari wawancara dan observasi peneliti bahwa sistem pengelolaan arsip di Kantor Desa Plelen berjalan dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai contoh masih adanya penumpukan arsip di beberapa tempat kerja dan gudang disamping itu pula sistem penataan arsip yang masih kurang rapih. Arsip yang tercipta dilakukan pencatatan akan tetapi masih dilakukan secara manual dengan menggunakan beberapa buku sesuai dengan kegunaan seperti buku surat pengajuan KTP, buku pindah penduduk, buku surat pengajuan SKCK dan lain-lainnya. Masih minimnya perangkat desa yang memiliki pengetahuan di bidang tata kelola arsip.



Sumber: Pribadi, 2023
Gambar 1. Buku Surat Masuk

Pada gambar 1 menerangkan bahwa pencatatan surat di Kantor Desa Plelen masih bersifat manual. Buku tersebut digunakan sebagai media pencatatan surat berdasarkan kegunaannya, sebagai contoh jika ada warga yang mengajukan surat permohonan pembuatan SKCK maka perangkat desa mencatat surat permohonan tersebut di buku SKCK. Pencatatan tersebut dicatat berdasarkan berkas yang masuk ke meja perangkat desa.

Banyaknya arsip yang diciptakan menjadi persoalan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian karena keterbatasan ruang penyimpanan dan peralatan untuk penyimpanan arsip yang belum sesuai dengan jumlah volume arsip yang diciptakan serta banyaknya data yang telah dicatat di buku menjadi kendala dalam temu kembali. Perlunya solusi atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini berdampak pada masalah pengarsipan sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesulitan dalam menemukan surat-surat penting bahkan ada kemungkinan hilang untuk arsip-arsip yang lama serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengumpulannya. Hampir sebagian besar permasalahan penyimpanan arsip menjadi fenomena yang perlu diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan, seperti halnya yang diungkapkan oleh Sari & Putra dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sistem pengelolaan arsip di Kelurahan Keboledan mengalami hambatan dari segi fasilitas, sarpas yang masih minim dan kurangnya SDM yang mengelola arsip. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan media yang aman dan mudah untuk pencarian (Nopriana, Liliana, et al., 2022; Sari & Putra, 2022).

Pelayanan yang baik adalah bagian dari perusahaan dan organisasi publik; arsip yang buruk dapat mempengaruhi pelayanan. Menurut Sinambela, pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara disebut pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rencana kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Karena aktivitas pelayanan akan mempengaruhi kelancaran aktivitas kerja di organisasi dan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan

tugas (Dewi & Suparno, 2022; Erlianti, 2019; Insani & Mellita, 2022; Mulyapradana, 2017).

Penyedia layanan, penerimaan layanan, jasa layanan, dan kepuasan pelanggan adalah empat bagian dari proses pelayanan publik. Selain itu, Gasperz menunjukkan enam ciri pelayanan yaitu waktu, akurasi, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan layanan (Dewi & Suparno, 2022; Rukayat, 2017).

Pengelola harus memahami bagaimana arsip disimpan untuk mengurangi kehilangan dokumen, mempermudah temu kembali dokumen, dan mempertahankan kualitas pelayanan publik. Penyimpanan arsip adalah bagian dari manajemen arsip dan memungkinkan penemuan kembali dan penggunaannya di masa yang akan datang. Arsip harus disimpan dengan mempertimbangkan tiga prinsip utama. (Muhidin & Winata, 2016) sebagai berikut: 1) Kondisi lingkungan yang mencakup lokasi, kontrol lingkungan, dan perlindungan. 2) Pengamanan yang mencakup pemeliharaan, penanganan, dan kemudahan akses. 3) Perlindungan. Dengan mengacu pada prinsip dasar, pengelola arsip perlu memperhatikan tiga prinsip tersebut. Berdasarkan hasil observasi, di temukan bahwa fasilitas fisik di objek penelitian sangat terbatas. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi harus diselesaikan atau dicari cara lain untuk menyimpan arsip dinamis.

Dengan berkembangnya internet dan teknologinya, orang sekarang dapat melakukan banyak hal melaluinya, seperti mencari informasi dan menggunakan berbagai layanan yang disediakan oleh Google, salah satu mesin pencari terbesar di internet. Google membuat layanan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dengan menggunakan teori perkembangan sistem informasi (Nopriana, KD, et al., 2022).

Google drive, layanan terbaru diluncurkan pada tahun 2012 dan memudahkan pengguna membuat, menyimpan, dan mengirimkan dokumen kepada orang lain (Khikmawati, 2016). Menurut Ningrum dan Puspasari (2015), *google drive* bertujuan untuk menyimpan, melindungi arsip dan menjadi alternatif untuk penyimpanan dokumen secara fisik (Nopriana, KD, et al., 2022).

Hasil penelitian Salsabila dan Syarif menunjukkan bahwa *google drive* merupakan media yang dapat digunakan untuk mengelola dokumen elektronik di Komisi Aparatur Sipil Negara seperti pengunggahan dokumen (input), pengaturan nama file, dan lokasi penyimpanan file. *Google drive* adalah penyimpanan cloud yang berfungsi sebagai basis data untuk sistem informasi. Kelebihannya adalah tidak menggunakan alamat *internet protocol*, yang berarti bahwa proses pengoperasiannya dapat dilakukan di berbagai lokasi dengan hanya memiliki akses jaringan internet (Salsabila & Syarif, 2022). Aplikasi *google drive* adalah sistem yang baik karena memenuhi ukuran efektivitas sistem informasi dan dapat mengurangi kertas kurang lebih 5% (Ningrum & Puspasari, 2015).

Salah satu manfaat menggunakan *google drive* adalah pengguna menyimpan file seperti menyimpan

dokumen di PC mereka, pengguna mengirimkan file kepada orang lain melalui alamat *drive* mereka, memiliki integrasi dengan berbagai menu layanan Google, memiliki fitur pencarian yang lebih baik dan lebih akurat, termasuk pencarian gambar dan grafik lainnya, dan memiliki kemampuan untuk menyimpan file dalam berbagai format (Yenianti, 2021). Anisa mengungkapkan beberapa keuntungan menggunakan *google drive*, termasuk kapasitas penyimpanan yang besar, media penyimpanan virtual, dukungan untuk file, edit file secara bersamaan, akses kapan saja, penyebaran aman, dan komentar (Ni'matussholihah, 2016).

Didasarkan pada fenomena ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sistem penyimpanan arsip untuk meningkatkan pelayanan publik di Kantor Desa Plelen disimpan. Rumusan masalah di penelitian ini adalah bagaimana sistem penyimpanan arsip dapat meningkatkan pelayanan publik di Kantor Desa Plelen?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyimpanan arsip untuk meningkatkan pelayanan publik di Kantor Desa Plelen.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data lapangan di lokasi tempat penelitian sesuai dengan masalah yang ditelitinya (Tajibu, 2021). Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data dan fakta dari berbagai literatur serta untuk menggunakan sesuatu di luar data sebagai alat pengecek dan pembandingan (Suprianto, 2023). Sumber data yang digunakan ada dua yakni data primer berupa hasil wawancara. Informan penelitian dipilih secara purposive diantaranya Kepala Desa Plelen, Sekretaris Desa dan tiga orang perangkat desa yang menangani administrasi. Objek penelitian merupakan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya (Misno et al., 2021; Sujatmiko et al., 2023), untuk objek penelitian ini berada di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing – Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk memperoleh sumber data terkait permasalahan yang diteliti. Untuk metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan studi pustaka, peneliti menggunakan hasil riset dari penelitian sebelumnya dan buku referensi terkait topik yang dibahas oleh peneliti (Suprianto & Mulyapradana, 2023).

2. Pembahasan

Lokasi penelitian yakni di Kantor Kantor Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Plelen saat ini di pimpin oleh Ibu ST. Amri Alimatul selaku Kepala Desa Plelen dan dibantu 13 orang perangkat desa untuk menjalankan Pemerintahan Desa Plelen. Desa Plelen memiliki luas wilayah 369,66 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 6.658 orang pada tahun 2022 yang berada di 8 dukuh. Adapun dukuh di Desa Plelen yakni Dukuh Persil, Dukuh Bong, Dukuh Plelen Lor, Dukuh Plebean, Dukuh Kertosono, Dukuh Pancuran, Dukuh Ngrau, dan Dukuh Bunderan. Secara letak geografis, Desa Plelen berada di

daerah pantura. Jarak Desa Plelen ke pusat pemerintah kecamatan yakni 1,3 Km dan jarak ke pusat pemerintah kabupaten yakni 30 Km (*Monografi Desa Plelen*, 2022).

Arsip dikatakan baik jika dapat digunakan sebagai bukti, bahan pertanggungjawaban, pendukung proses pengambilan keputusan, pendukung proses perencanaan, dan pendukung proses kontrol dan dapat digunakan untuk kepentingan publik dan ekonomi (Muhidin & Winata, 2016). Agar tercapai tujuan dari penyelenggaraan kearsipan maka memperhatikan pengelolaan arsip, salah satunya yakni penyimpanan arsip. Berpengaruh pada layanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui penyimpanan arsip yang baik dan benar.

Secara umum, pelayanan publik adalah pelayanan penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan merupakan indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah. Pelayanan publik berorientasi pada masyarakat dan masyarakat puas dengan pelayanan tersebut. (Hayat, 2017).

Menggunakan standar pelayanan publik secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas. Ada lima indikator dalam pelayanan publik yakni: *reliability*, *tangibles*, *responsiveness*, *assurance*, *empati* (Mukarom & Wijaya Laksana, 2018).

- a. *Reliability*, pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

Perangkat desa telah memberikan layanan masyarakat dengan baik dan sesuai dengan prosedur operasional. Hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Plelen dijumpai ada warga yang sedang mengajukan surat permohonan pembuatan surat SKCK. Perangkat desa pertama kali melakukan pengecekan berkas yang dibawa oleh pemohon setelah berkas yang diperiksa sudah lengkap selanjutnya melakukan pencatatan di buku khusus yakni buku pengajuan surat pengantar pembuatan SKCK dan membuat surat pengantar permohonan pembuatan SKCK sebanyak dua rangkap. Setelah surat di tanda tangani oleh Kepala Desa, pemohon mendapatkan satu berkas dan satu berkasnya untuk Kantor Desa Plelen.

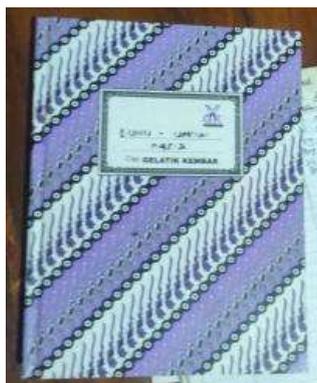
Berkas yang telah diciptakan oleh perangkat desa langkah selanjutnya yakni melakukan penyimpanan arsip. Prosedur penyimpanan arsip yang dikemukakan oleh Sugiarto & Wahyono yang terdiri dari pemeriksaan, mengindeks, memberi tanda, menyortir, dan menyimpan (Suhendi et al., 2020). Senada yang diungkapkan oleh Mulyapradana, dkk (2019) bahwa ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan penyimpanan diantaranya adalah membuat indeks, dokumen diberikan kode, melakukan penyortiran dokumen, menyimpan di tempat penyimpanan, membuat sistem penyimpanan arsip, melakukan pemusnahan arsip. Disamping itu pula, untuk pelaksanaan penerimaan arsip perlu diadakan kartu kendali, pembuatan label dan tunjuk silang, dan diadakannya lembar peminjaman berkas. Komponen-

komponen tersebut berguna untuk penemuan kembali arsip dan meminimalisir kehilangan arsip (Sukriolah, 2013).

Prosedur penyimpanan arsip di Kantor Desa Plelen dilakukan secara sentralisasi dan telah menerapkan prosedur penyimpanan arsip, yaitu:

- 1) Pemeriksaan, surat diperiksa sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya yakni memastikan kesiapan arsip untuk disimpan.
- 2) Penyortiran, surat dikelompokkan berdasarkan jenis surat.
- 3) Penandaan, surat yang sudah dikelompokkan diberi tanda dengan jenis surat, bulan dan tahun.
- 4) Surat yang sudah dikelompokkan dan ditandai lalu dicatat pada daftar pertelaan arsip surat.
- 5) Surat disimpan di dalam map arsip dan pada bagian depan map diberikan kertas berisi daftar arsip dan disimpan di lemari penyimpanan arsip.

Pertama, pemeriksaan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen sudah siap untuk disimpan. Ini merupakan kegiatan awal untuk mengecek surat-surat tersebut sebelum melakukan penyortiran. Prosedur penyimpanan arsip di langkah pertama sudah dilakukan oleh Kantor Pemerintah Desa sesuai dengan teori tersebut.



Sumber: Pribadi, 2023
Gambar 2. Buku Catatan Surat

Pada gambar 2, pemeriksaan berkas surat masuk dan keluar dilakukan oleh perangkat desa saat penerimaan berkas tersebut. Perangkat desa melakukan pengecekan berkas berdasarkan tanggal terbit surat, isi surat dan tujuan surat tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan surat selanjutnya dilakukan pencatatan di buku khusus. Untuk keamanan berkas, maka pencatatan dilakukan menggunakan dengan *microsoft office* yang bersumber dari buku tersebut. Pencatatan dilakukan media yang berbeda yakni buku dan komputer agar terjaga keamanan surat dan memudahkan dalam pengecekan surat tersebut.

Kedua, menyortir. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk menghindari kesalahan dalam penyimpanan. Oleh karena itu, dilakukan pengelompokan dokumen. Langkah ini dilakukan untuk membuat penyimpanan lebih mudah dalam urutan yang sudah ditentukan. Pada penataan arsip surat di Kantor Kantor Desa Plelen, surat

disortir terlebih dahulu berdasarkan bulannya, tahunnya, dan yang terakhir berdasarkan jenis kegunaan dari surat yang nanti kemudian jenis surat tersebut digunakan sebagai tanda dalam langkah selanjutnya yaitu proses pengkodean. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diperoleh hasil bahwa perangkat desa sudah melakukan menyortir surat-surat yang masuk dan keluar berdasarkan tanggal dan jenis suratnya, penyortiran ini dilakukan agar perangkat desa dengan mudah mengetahui isi dari surat tersebut untuk dilakukan pengkodean.

Ketiga, pengkodean. Pemberian kode di surat dapat memudahkan pengelola arsip dalam melakukan sortir dan penyimpanan arsip. Di samping itu, memudahkan petugas arsip dalam melacak arsip yang dipinjam. Di Kantor Desa Plelen kegiatan pengkodean arsip sudah dilakukan, pengkodean berdasarkan jenis surat dan nilai guna surat seperti yang tertera di gambar 3.



Sumber: Pribadi, 2023
Gambar 3. Tempat Penyimpanan Arsip

- b. *Tangibles*, tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi.

Kegiatan pemeriksaan, penyortiran dan pengkodean telah dilaksanakan oleh perangkat desa, langkah selanjutnya yakni arsip disimpan. Perangkat Desa Plelen sudah melakukan penyimpanan arsip menggunakan folder map maupun dus yang telah diberikan kode, label/keterangan di depannya sebagai keterangan atas berkas yang di simpan seperti gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa berkas yang disimpan sudah melewati serangkaian prosedur penyimpanan arsip yang dilakukan oleh perangkat desa. Seiring dengan waktu banyak file yang disimpan di sudut ruang kerja, karena volume file yang terus bertambah dan ruang yang terbatas menjadi hambatan dalam penyimpanan arsip maka dijumpai saat observasi ditemukan banyak berkas yang disimpan di sudut ruang kerja.

Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyimpanan arsip yakni pertama, kurangnya SDM baik dalam segi kualitas dan kuantitas. Petugas yang menangani arsip hanya satu orang dan tidak seimbang dengan banyaknya arsip yang ada serta latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kompetensi di bidang arsip. Sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menerangkan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan adalah arsiparis (2009).

Bersumber dari hasil wawancara, diperoleh hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan arsip di Kantor Desa Plelen masih belum maksimal karena perangkat desa yang menangani arsip belum memiliki kompetensi di bidang arsip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kurangnya pelatihan atau pembekalan terkait pengelolaan arsip atau penyimpanan arsip dari instansi pemerintah di atasnya kepada perangkat desa sehingga pengelolaan arsip yang belum maksimal dan adanya penumpukan berkas di setiap sudut ruang kerja mengakibatkan akan berdampak pada pemberian pelayanan. Dan keterbatasannya sumber daya manusia yang mengelola arsip di Kantor Desa Plelen.

Kedua, ruang tempat penyimpanan arsip. Kantor Desa Plelen telah menggunakan peralatan dan perlengkapan arsip dan memiliki ruang khusus untuk menyimpan arsip meskipun ruang arsipnya kecil dan tidak sebanding dengan volume arsip yang terus bertambah. Hasil observasi menunjukkan bahwa Kantor Desa Plelen telah melakukan upaya penyimpanan arsip yang cukup baik tetapi belum maksimal. Dikarenakan perbandingan yang tidak sebanding antara volume arsip dan ruang arsip, dijumpai ada penumpukan arsip di ruang khusus arsip, meja kerja dan sudut ruang kerja. Saat wawancara, Pemerintah Desa Plelen sudah melakukan upaya untuk sistem penyimpanan arsip yakni pengadaan peralatan dan perlengkapan arsip seperti lemari, box file, odner, dan map serta ada rencana untuk penambahan ruangan arsip di lokasi yang berbeda.

Arsip yang disimpan pada kardus dan banyaknya tumpukan arsip membuat perangkat desa kesulitan dalam pencarian temu kembali arsip dan dijumpai ada beberapa arsip yang mengalami kerusakan sehingga nilai guna arsipnya berkurang.



Sumber: Pribadi, 2023

Gambar 4. Peralatan dan Perlengkapan Penyimpanan Arsip

Salah satu bagian dari manajemen arsip adalah penyimpanan arsip untuk memastikan bahwa arsip aman, terjaga, dan dapat digunakan lagi di masa depan. Untuk memastikan bahwa arsip aman, terjaga, dan terpelihara, penyimpanan arsip secara fisik harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar berikut: kondisi lingkungan, keamanan, dan proteksi (Muhidin & Winata, 2016).

c. *Responsiveness*, keinginan melayani konsumen dengan cepat.

Melihat minimnya ruangan penyimpanan arsip dan jumlah volume arsip yang kian banyak serta memperhatikan prinsip dasar tersebut maka optimalisasi teknologi diperlukan. Di Kantor Desa Plelen memiliki lima buah perangkat komputer digunakan oleh perangkat desa untuk aktivitas kerja termasuk penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip yang dilakukan oleh perangkat desa hanya sebatas penginputan berkas ke dalam *microsoft office*, *scan* berkas dan tidak memaksimalkan penggunaan komputer serta teknologi dan informasi yang sebenarnya dapat memudahkan dalam pengelolaan penyimpanan arsip.

Ketidakhahaman dalam penggunaan teknologi dan informasi oleh perangkat desa berdampak belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi sehingga banyaknya penumpukan berkas baik di ruang kerja dan gudang. Saat wawancara dan observasi di lapangan ditemukan bahwa perangkat desa dalam menyimpan berkas masih secara manual dan tidak menggunakan *google drive* sebagai media alternative penyimpanan berkas.

Google drive memiliki nilai kebermanfaatannya untuk aktivitas kerja salah satunya adalah sebagai sarana pengarsipan yang bertujuan agar file tidak hilang, cepat dalam temu kembali arsip, dapat diakses tanpa terhalang waktu dan tempat (Nopriana, KD, et al., 2022). Pemanfaatan *google drive* untuk penyimpanan arsip di Kantor Desa Plelen belum dilaksanakan secara maksimal dan masih menerapkan sistem penyimpanan secara manual serta menyimpan berkas menggunakan laptop dan *flashdisk* sehingga berdampak pada penumpukan berkas dan membutuhkan waktu untuk temu kembali arsip.

d. *Assurance*, kecakapan instansi/karyawan dalam menjamin kerahasiaan para konsumen.

Kinerja Pemerintah Desa Plelen secara keseluruhan di nilai baik oleh masyarakat yang berdampak pada kepuasan masyarakat. Lokasi Kantor Desa Plelen berada di pinggir jalan panturan Kabupaten Batang secara geografis merupakan lokasi yang sangat terjangkau oleh masyarakat Desa Plelen akan tetapi luas area Kantor Desa Plelen yang terlalu kecil sehingga berdampak pada minimnya fasilitas fisik kantor terutama ruang khusus arsip. Untuk menjamin keamanan arsip atau berkas-berkas yang diciptakan oleh Pemerintah Desa maka dilakukan penyimpanan arsip berupa melakukan *scan* pada berkas-berkas yang telah diciptakan, berkas dibuat

rangkap, melakukan pencatatan surat di buku khusus dan disimpan di komputer serta *flasdisk*.

e. *Empati*, memberikan perhatian.

Terbatasnya fasilitas fisik yang dimiliki oleh Pemerinta Desa Plelen terutama ruang khusus arsip dan minimnya pengetahuan perangkat desa terkait pengelolaan arsip menjadi tantangan yang harus diatasi oleh Kepala Desa agar permasalahan dapat teratasi dengan baik maka perlu adanya perencanaan kerja dan anggaran untuk pengembangan SDM yakni program pelatihan untuk perangkat desa di bidang pengelolaan arsip dan pengadaan ruangan arsip. Lokasi kantor di pinggir jalan menjadi salah satu faktor terbatasnya ruangan di Kantor Desa Plelen. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nadia Dwi Insani dan Dina Mellita (2022) bahwa pengelolaan arsip yang baik dapat meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Gelumbang.

Secara keseluruhan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, kendala-kendala yang dihadapi Kantor Desa Plelen dalam sistem penyimpanan arsip yakni kompetensi SDM dan kurangnya ruangan untuk penyimpanan arsip. Kondisi tersebut berkaitan dengan indikator kualitas pelayanan publik yakni *tangible*, karena berkaitan dengan penyediaan yang memadai sumber daya lainnya seperti fasilitas fisik, peralatan, personel, dan komunikasi. Kendala yang dihadapi tidak dicarikan solusinya dan dibiarkan terus-menerus maka berdampak terhambatnya kegiatan kerja yang telah direncanakan, citra organisasi Kantor Desa Plelen karena dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan menurunkan kepuasan masyarakat.

3. Kesimpulan

Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan penyimpanan arsip di Kantor Desa Plelen sudah terlaksana cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan karena arsip yang diciptakan dalam waktu ke waktu jumlahnya sangat banyak dan tidak sebanding dengan tempat penyimpanan arsip sehingga belum mencukupi maka masih adanya berkas-berkas yang tersimpan di sudut ruang kerja sehingga terlihat tidak rapih. Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir penumpukan berkas, Kantor Desa Plelen sudah melakukan penyimpanan arsip melalui peralatan kantor seperti komputer atau laptop dan *flashdisk* akan tetapi masih belum optimal dalam menggunakan teknologi informasi terutama pemanfaatan *google drive* sebagai alternative media penyimpanan arsip yang tidak memerlukan tempat untuk menyimpan arsip dan mudah untuk penemuan kembali arsip. Agar arsip yang disimpan dan dikelola baik dan terjaga diperlukan SDM yang kompeten di bidang arsip maka perangkat desa perlu meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam pelatihan pengelolaan arsip baik secara manual dan digitalisasi sehingga mereka dapat mengaplikasikan hasil pelatihatannya ke tempat kerja mereka serta penambahan perangkat desa yang khusus

mengelola arsip. Merencanakan penambahan fasilitas fisik untuk kegiatan penyimpanan arsip khususnya ruang khusus arsip yang sesuai dengan standar dan pembuatan program *software* khusus pengelolaan arsip sehingga kualitas pelayanan publik dan citra organisasi dapat terjaga baik.

Daftar Pustaka

- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jma/article/view/67/69>
- Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *JAPaBis: Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(1), 9–18. <https://ejournal.stia-ldumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/3/2>
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik* (2nd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Insani, N. D., & Mellita, D. (2022). Pengelolaan Arsip Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Gelumbang. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)*. <https://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/2587/1144>
- Misno, A., Mulyapradana, A., Tajibu, M. J., Saputra, N., Aziza, N., & Anita, T. L. (2021). *Fundamentals of Social Reseachr*. GCAINDO.
- Monografi Desa Plelen*. (2022).
- Muhidin, S. A., & Winata, H. (2016). *Manajemen Kearsipan (Untuk Organisasi Publik, Bisnis, Sosial, Politik dan Kemasyarakatan)* (U. T. Sontani (Ed.); 1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Muhidin, S. A., Winata, H., & Santoso, B. (2016). Pengelolaan Arsip Digital. *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen*, 2(3).
- Mukarom, Z., & Wijaya Laksana, M. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik* (B. Ahmad Saebani (Ed.); 2nd ed.). CV Pustaka Setia.
- Mulyapradana, A. (2017). Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Pekalongan Timur. *Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen*.
- Mulyapradana, A., Anjarini, A. D., & Setiaji, D. (2019). Mekanisme Pengelolaan Arsip Barang Habis Pakai Bagian Perlengkapan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabaupaten Batang. *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1–11.
- Ningrum, O. S., & Puspasari, D. (2015). Penggunaan Aplikasi Google Drive Sebagai Penunjang Paperles Office. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 3(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/12527>

- Nopriana, T., Liliana, I., Firmasari, S., Asnawati, S., Wahyuni, S., & Nadifa, A. (2022). Pemanfaatan Google Drive Untuk Pengarsipan Bagi Guru di SMP Negeri di Kabupaten Cirebon. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 103–110.
- Rahman, A. B. M., Rafly, A., Mulyawan, Nurdiawan, O., & Anwar, S. (2021). Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis Web Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi. *Information System For Educators And Professionals*, 6(1), 1–12. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/article/view/1683/1399>
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2). <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32>
- Salsabila, Z., & Syarif, A. (2022). Pemanfaatan Media Google Drive dalam Pengelolaan Dokumen Elektronik Komisi Aparatur Sipil Negara. *Serasi : Jurnal Sekretaris & Administrasi*, 20(2), 116–125.
- Sari, S. F., & Putra, R. S. (2022). Literature Review Sistem Pengelolaan Arsip di Kantor Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. *Mizana: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 116–126.
- Sudarsono, N. H. (2013). Manajemen Penyimpanan Arsip dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v1n3.p%25p>
- Suhendi, D., Permana, Y., Permana, H. B., Nurhudin, R., Silvia, S., & Oktaviana, T. (2020). Penyimpanan Arsip Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(1).
- Sujatmiko, Orbawati, E. B., Fadlurrahman, & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 8(1).
- Sukrilah, Y. (2013). Kegiatan Kearsipan Tata Usaha SMP Negeri se-Kecamatan Sleman. *Hanata Widya*, 2(2). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fipmp/article/view/562>
- Suprianto, B. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 8(2), 123–128. <http://www.ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3015/1876>
- Suprianto, B., & Mulyapradana, A. (2023). Strategi Penguatan Karakter Mahasiswa Melalui Matakuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 20(1). <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/678/640>
- Tajibu, M. J. (2021). Analisis Data Penelitian. In GCAINDO (Ed.), *Fundamentals of Social Research* (1st ed., p. 94). GCAINDO.
- Undang-Undang Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*. https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu_pip/UU_No_43_Tahun_2009_Kearsipan.pdf
- Yeniarti, I. (2021). Google Drive sebagai Alternatif Penyimpanan Arsip Digital Dokumen Akreditasi Perpustakaan (Best Practice pada Perpustakaan IAIN Salatiga). *PUSTABILIA: Journal of Library and Information Science*, 5(5).

Analisis SWOT dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan UMKM

Fadlurrahman¹⁾, Eny Boedi Orbawati²⁾, Rani Pajrin³⁾, Ari Mukti⁴⁾, Budi Rahardjo⁵⁾

^{1), 2)}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar

³⁾Program Studi Hukum, Universitas Tidar

⁴⁾Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar

⁵⁾Program Studi Manajemen, Universitas Tidar

Email Korespondensi : fadlurrahman@untidar.ac.id

ABSTRACT

Magelang City UMKM actors operate in three fields, namely industry, services and trade. The development of UMKM actors in Magelang City from 2020 to 2022 experienced fluctuations. UMKM players are encouraged to expand their marketing through market places. The emergence of various digital platforms indicates that UMKM players are in the era of globalization. The development of UMKM which is accompanied by environmental changes must be adjusted to appropriate strategies such as SWOT analysis approach. The aim of this research is create a model or framework for implementing UMKM development strategies in Magelang City. The research method is qualitative with a SWOT analysis approach (identification of strengths, weaknesses, opportunities and threats). The location of the research was in Magelang City. Informants were selected using a purposive sampling technique, including heads of UMKM associations, trader coordinators and regional apparatus organizations related to UMKM empowerment. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. This research identified 6 strengths, 7 weaknesses, 7 opportunities and 4 threats. From this identification, 16 strategies were produced in the form of 7 SO strategies, 3 WO strategies, 3 ST strategies, and 3 WT strategies. After that, a strategy implementation framework was formulated which focused on the classification of action planning for UMKM actors by paying attention to SO, WO, ST and WT strategies. All of these strategies are classified into four components, including optimizing the availability of human resources, utilizing external programs and technology, obtaining and using business legality, and forming branding and business characteristics.

Keywords : SWOT analysis, Magelang City UMKM, UMKM Strategy Framework.

ABSTRAK

Pelaku UMKM Kota Magelang bergerak di tiga bidang yaitu industri, jasa dan perdagangan. Perkembangan pelaku UMKM Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pelaku UMKM didorong melakukan perluasan pemasaran melalui market place. Munculnya berbagai platform digital menandakan para pelaku UMKM telah berada di era globalisasi atau dengan kata lain berkontestasi dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perkembangan UMKM yang diikuti oleh perubahan-perubahan lingkungan harus disesuaikan dengan strategi yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu strategi yakni dengan analisis SWOT. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menciptakan model atau framework implementasi strategi pengembangan UMKM di Kota Magelang. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT (identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Lokasi penelitian dilakukan di Kota Magelang. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling diantaranya ketua paguyuban UMKM, koordinator pedagang dan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengidentifikasi diantaranya 6 kekuatan, 7 kelemahan, 7 peluang, dan 4 ancaman. Dari identifikasi tersebut dihasilkan 16 strategi berupa strategi SO 7 strategi, strategi WO 3 strategi, strategi ST 3 strategi, dan strategi WT 3 strategi. Setelah itu dirumuskan framework implementasi strategi yang difokuskan pada klasifikasi perencanaan tindakan pelaku UMKM dengan memperhatikan strategi SO, WO, ST, dan WT. Semua strategi tersebut diklasifikasikan ke empat komponen diantaranya mengoptimalkan ketersediaan sumber daya manusia, memanfaatkan program eksternal dan teknologi, mendapatkan dan menggunakan legalitas usaha, serta membentuk branding dan ciri khas bisnis.

Kata Kunci : Analisis SWOT, UMKM Kota Magelang, Kerangka Kerja Strategi UMKM.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan antara usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Masing-masing memiliki karakteristik maupun kategori yang keseluruhannya diatur didalam Undang-Undang. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tujuan dalam menumbuhkan maupun mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara prinsip pemberdayaan yang dilakukan harus mengacu pada pertumbuhan kemandirian, kebersamaan serta kewirausahaan; mewujudkan kebijakan publik yang akuntabel, transparan dan berkeadilan; mengembangkan usaha pada potensi daerah serta berorientasi pada pasar; meningkatkan daya saing serta menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian terpadu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM mencapai 64 juta. Namun, secara empiris baru 13 % para pelaku UMKM yang telah melakukan inovasi dalam pemasaran produknya melalui *marketplace*. Pemberdayaan melalui ekosistem digital menjadi keniscayaan bagi setiap pelaku UMKM sehingga kemandirian dan daya saing secara berkelanjutan dapat terwujud. Era 4sasi akan sangat mempengaruhi ekosistem para pelaku usaha karena persaingan pasar tidak hanya dengan pasar domestic melainkan dengan produk-produk dari mancanegara. Perbaikan produktivitas UMKM melalui produktivitas UMKM dengan penerapan teknologi tepat guna yang tetap mempertahankan kriteria UMKM yang merupakan kelompok usaha yang bersifat padat karya (Fatimah, 2011).

Berbagai tantangan para pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Tantangan yang muncul dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Di masa pandemi covid 19 para pelaku UMKM juga mengalami berbagai tantangan maupun hambatan, dan nyatanya perekonomian Indonesia melemah dan angka kemiskinan pada kuartal pertama tahun 2021 masih mencapai 10,14% (Sujatmiko, Orbawati, Fadlurrahman, dan Mukti, 2023). Padahal sektor UMKM adalah salah satu roda perekonomian terbesar di Indonesia. Menurut Alfrian dan Pitaloka (2020) ada empat strategi yang dilakukan diantaranya: Melakukan pemasaran dengan digital marketing; Memperkuat SDM; Melakukan inovasi kreatif dan Peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Pada akhir tahun 2022 Pemerintah Kota Magelang mencatat adanya peningkatan jumlah UMKM dari 6.000 pelaku UMKM menjadi 9.000 Pelaku UMKM. Kenaikan jumlah pelaku UMKM kemudian didorong melakukan perluasan pemasaran melalui *market place* seperti Magelang Smart City (Magesty). Munculnya berbagai platform digital menandakan para pelaku UMKM telah berada di era globalisasi atau dengan kata lain berkontestasi pelaku usaha yang lebih besar. Di satu sisi era globalisasi memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, namun disisi lain berdampak negatif jika pelaku

UMKM tidak bisa memanfaatkan peluang maupun memiliki strategi yang tentunya di dukung oleh kebijakan pemerintah setempat.

Berdasarkan pada observasi dan wawancara awal yang dilakukan, pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bidang perdagangan menyatakan bahwasanya saat ini persaingan antar pelaku usaha semakin ketat apalagi dari sisi marketing atau penjualan. Setengah dari pelaku UMKM Kota Magelang masih memasarkan produknya secara konvensional atau dengan membuka lapak tanpa adanya penggunaan teknologi. Selain itu, permasalahan lainnya persaingan tidak hanya antar pelaku usaha yang ada di Kota Magelang saja, namun juga dari luar Kota Magelang yang memiliki produk serupa bahkan dengan retail atau industri besar seperti swalayan ataupun supermarket. Masuknya produk dari luar Kota Magelang juga menandakan telah terjadi persaingan di era pasar bebas sehingga persaingan tak dapat dielakkan (Umairi, Kencana, dan Amaliatulwalidain, 2021). Kemudian permasalahan yang lainnya yaitu kurangnya *branding* terhadap produk yang dimiliki sehingga konsumen tidak cukup tertarik untuk membeli produk yang mereka dagangkan.

Berdasarkan pada kondisi diatas maka penting adanya penelitian mengenai strategi pengembangan UMKM di Kota Megelang dengan tujuan untuk menciptakan model strategi yang tepat dan dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan dan pelaku UMKM di Kota Magelang dalam mewujudkan UMKM yang mandiri dan berdaya saing global.

Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan suatu proses atau rangkaian aktifitas manajer atau manajemen puncak pada suatu kelompok/organisasi/lembaga guna merumuskan strategi. Strategi tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mulyadi, 2001; Siagian, 2008). Aktifitas dalam manajemen strategi termasuk juga formulasi, implemntasi, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan suatu organisasi (David, 2004). Sesuai dengan hal tersebut, Montanari, Daneke & Bracker (1989) dalam Hughes (1998) berpendapat manajemen strategi:

".....aims to integrate the planning function with the overall management task. Beyond this point, there are differing views as to exactly what is entailed in strategic management. As in the private sector, strategic planning involves analyzing the environment for opportunities or cope with threats. In one view, strategic management includes these two aspect of strategic planning and extend strategy development to include strategy implementation and strategic control"

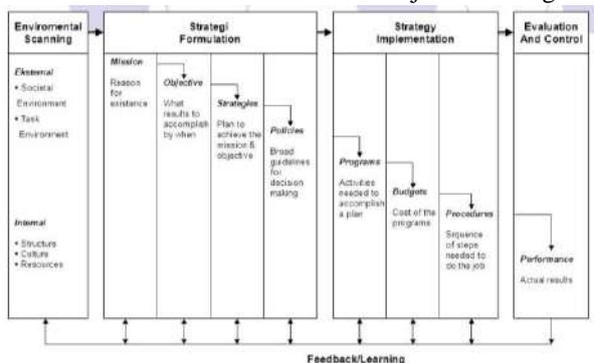
Secara lebih lengkap, Nawawi (2005) memberikan pengertian manajemen strategi ke dalam empat pengertian:

- a. Proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara mengimplementasikannya yang dibuat oleh manajer puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan.
- b. Kegiatan pencapaian tujuan yang sesuai dengan misi organisasi dengan berupaya menumbuh-kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksplorasi peluang yang muncul.
- c. Arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif.
- d. Perencanaan skala besar yang memiliki visi masa depan untuk jangka panjang dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (dasar dan prinsipil).

Manajemen strategi memiliki empat prinsip utama: (1) berjangka panjang, (2) integrasi tujuan dan objektif ke dalam hirarki yang koheren, (3) mengenal manajemen strategi tersebut dan perencanaan bukan terimplementasi mandiri, dan (4) Perspektif eksternal menekankan tidak beradaptasi dengan lingkungan tetapi mengantisipasi dan membentuk perubahan lingkungan (Bozeman & Straussman, 1990 dalam Hughes (1998).

Wheelen dan Hunger (2012) menggambarkan model proses manajemen strategi dengan komponennya sebagai berikut:

Gambar 1. Model sistem manajemen strategi



Sumber: Wheelen dan Hunger (2012)

Manajemen strategi terdiri atas empat komponen, yaitu environmental scanning (internal dan eksternal), strategy formulation (mission, objective, strategies, policies), strategy implementation (programs, budgets, procedurs), serta evaluation dan control (performance) atau evaluasi kinerja. Salah satu tools dalam manajemen strategi yaitu dengan pendekatan analisis SWOT. Jogiyanto dalam Sanjaya (2020) mengatakan SWOT memiliki beberapa tujuan, diantaranya mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dan dijadikan sebagai input untuk merancang proses agar berjalan optimal, efektif, dan efisien, menganalisis suatu kondisi dimana akan diciptakan sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, mengetahui keuntungan dan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan, menganalisis prospek perusahaan, sebagai persiapan apabila terdapat permasalahan dikemudian hari, dan sebagai persiapan

untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka analisis SWOT memiliki beragam manfaat bagi organisasi ataupun program yang akan dijalankan, diantaranya sebagai pedoman atau panduan untuk menyusun berbagai kebijakan strategis, menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis, memberikan tantangan ide-ide, dan memberikan informasi mengenai kondisi organisasi (Sanjaya, 2020).

Konsepsi UMKM

UMKM merupakan suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (Nayla, 2014). Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro (Tambunan, 2009). UMKM dikategorikan dengan nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2012).

UMKM merupakan kelompok usaha yang paling cepat berkembang dan tahan terhadap guncangan krisis ekonomi. Perkembangan UMKM dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap, diantaranya: (1) livelihood activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal, contohnya pedagang kaki lima; (2) micro enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan; dan (3) small dynamic enterprise,

merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor (Rahmana, 2009).

Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT yakni mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). SWOT merupakan sebuah pendekatan awal (*preliminary stages*) untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal dengan cara mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam rangka menciptakan keputusan dalam perencanaan manajemen strategi (Srivastava, Kulshreshtha, Mohanty, Pushpangadan, & Singh, 2005; Aslan, Cinar, & Ozen, 2014; David, 2004; Yuan, 2013).

Kotler & Keller (2009) berpendapat bahwa organisasi perlu menganalisis faktor lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan yang nantinya dapat dimanfaatkan ketika bertemu dengan peluang ataupun ancaman eksternal. Analisis SWOT mendasar pada logika memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan secara bersamaan turut meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2009).

Guna mempermudah dalam menganalisis kondisi organisasi, maka perlu untuk membentuk matriks SWOT yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Matriks SWOT

Faktor Eksternal	Faktor Internal	Kekuatan (S) Daftarkan faktor-faktor internal	Kelemahan (W) Daftarkan faktor-faktor internal
	Peluang (O) Daftarkan faktor-faktor eksternal	Strategi (S-O) Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi (W-O) Buat strategi disini yang memanfaatkan peluang mengatasi kelemahan
Ancaman (T) Daftarkan faktor-faktor eksternal	Strategi (S-T) Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman	Strategi (W-T) Buat strategi disini yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	

Sumber: Rangkuti (2009)

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Magelang. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling diantaranya ketua paguyuban UMKM, koordinator pedagang dan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM.

2. Pembahasan

Identifikasi SWOT: Situasi Internal-Eksternal UMKM Kota Magelang

Berdasarkan data yang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, perkembangan UMKM mengalami fluktuasi khususnya pelaku UMKM. Tercatat bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, pelaku UMKM mengalami peningkatan namun dipenghujung tahun 2022 mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Pelaku UMKM tersebut bergerak di tiga bidang, diantaranya bidang industri, jasa, dan perdagangan. Berikut sebaran jumlah pelaku UMKM Kota Magelang.

Tabel 1. Jumlah sebaran pelaku UMKM Kota Magelang

Kecamatan/Kelurahan	Perdagangan			Jasa			Industri		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	
Magelang Selatan	2.309	2.354	1.909	492	530	480	616	794	718
Rejowinangun Selatan	512	501	426	112	123	111	115	154	148
Magersari	532	618	448	107	120	104	94	140	118
Jurangombo Utara	150	223	170	36	61	48	94	115	83
Jurangombo Selatan	212	239	227	59	71	72	106	93	111
Tidar Utara	653	485	448	140	107	108	99	163	152
Tidar Selatan	250	288	190	38	48	37	108	129	106
Magelang Utara	1.115	1.103	1.096	352	406	409	466	490	570
Wates	272	272	251	83	106	100	89	101	110
Potrobongsan	333	258	229	107	96	86	98	128	120
Kedungsari	197	205	235	38	71	81	130	65	133
Kramat Utara	126	159	155	52	62	58	77	88	93
Kramat Selatan	187	209	226	72	71	84	72	108	114
Magelang Tengah	2.140	2.080	1.827	577	649	609	596	687	742
Kemirijejo	171	213	190	61	66	65	40	70	64
Cacaban	440	312	301	120	112	120	117	140	144
Rejowinangun Utara	497	472	431	137	148	127	170	228	220
Magelang	263	323	289	93	110	108	78	88	99
Panjangan	375	373	299	85	97	85	96	97	133
Gelangan	394	387	317	81	116	104	95	64	82
Kota Magelang	5.564	5.537	4.832	1.421	1.585	1.498	1.678	1.971	2.030

Sumber: datago.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang berupaya untuk terus mendorong pelaku UMKM dapat berkembang di era globalisasi, khususnya dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Secara sadar ataupun tidak sadar, globalisasi teknologi memaksa pelaku UMKM untuk lebih inovatif karena persaingan semakin ketat. Persaingan antar pelaku UMKM tidak lagi berada di ranah lokal, namun nasional bahkan internasional untuk produk yang serupa. Salah satu langkah Pemerintah Kota Magelang untuk menciptakan iklim positif bagi pelaku UMKM yakni program Magelang Keren atau Kelurahan Entrepreneurship Center dengan berfokus pada pelatihan SDM, pelatihan manajemen, fasilitasi perijinan, perbaikan produk, pendampingan berkelanjutan, IKM center, maupun fasilitasi permodalan (ppid.magelangkota.go.id, 2023).

Perkembangan UMKM yang diikuti oleh perubahan-perubahan lingkungan harus disesuaikan dengan strategi yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu strategi yakni SWOT. Pendekatan SWOT digunakan untuk menganalisis kondisi lingkungan internal organisasi (*strengths-weaknesses*) dan kondisi eksternal organisasi (*opportunities-threats*) dalam hal ini UMKM. Pada tataran internal, *strengths* (kekuatan) merupakan kelebihan yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan *weakness* (kelemahan) merupakan kekurangan organisasi yang harus direduksi atau diminimalisir. Kemudian tataran eksternal, *opportunities* (peluang) merupakan hal yang dapat digunakan oleh organisasi, sedangkan *threats* (ancaman) merupakan hal yang harus dihindari. Berikut tabel 2 yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman UMKM di Kota Magelang

Tabel 2. Kekuatan dan Kelemahan UMKM Kota Magelang

<i>Strengts</i> (kekuatan)	<i>Weakness</i> (kelemahan)
1. Jumlah pelaku UMKM yang besar sebanyak 8.360 di tahun 2022	1. Banyak pelaku UMKM yang kurang menguasai teknologi
2. Produk kuliner memiliki ciri khas Kota Magelang	2. Permodalan usaha bagi pelaku UMKM skala kecil

<ol style="list-style-type: none"> 3. Harga produk relatif murah 4. Sebagian pelaku UMKM memiliki sertifikat izin usaha 5. Memiliki konsumen tetap 6. Lokasi usaha yang strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kemampuan dalam membranding produk belum baik 4. Cakupan pemasaran yang belum luas 5. Ketersediaan bahan baku yang kurang 6. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat izin usaha 7. Kemampuan manajemen keuangan yang belum baik
Opportunitas (peluang)	Threats (ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan retail nasional 2. Tersedia digital market place yang bisa diakses secara gratis untuk memasarkan produk skala nasional 3. Dukungan program pelatihan dari Pemkot Magelang 4. Dukungan fasilitas perijinan dari Pemkot Magelang 5. Tersedia IKM center 6. Dukungan pameran UMKM dari Pemkot Magelang 7. Tersedia platform lokal (digital market place) dari Pemkot Magelang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan dengan produk luar daerah yang ada di Kota Magelang 2. Belum banyak pelaku UMKM yang bekerjasama dengan toko lokal atau retail nasional 3. Persaingan produk yang ada di digital market place 4. Persaingan antar pelaku usaha dengan produk yang sama

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Pelaku UMKM Kota Magelang memberikan sumbangsih yang signifikan bagi peningkatan perekonomian daerah sebesar 60% khususnya di sektor jasa. Kota Magelang sendiri terkenal dengan sebagai kota jasa berupa jasa perdagangan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan jasa pengolahan sampah (Prokompim, 2021). Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Magelang mengklaim bahwa UMKM Kota Magelang mampu menyerap 12.122 tenaga kerja dengan omzet mencapai Rp. 1,2 trilliun di sepanjang tahun 2022 (Ginting, 2023). Hal ini menandakan bahwa meskipun para pelaku UMKM mengalami masa sulit khususnya pada saat pandemi Covid-19 kurang lebih selama dua tahun, tetapi UMKM tetap bisa bangkit dan memberikan kontribusi bagi daerah.

Pelaku UMKM Kota Magelang mengalami berbagai macam tantangan dalam mengembangkan usahanya. Namun UMKM Kota Magelang tetap tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku UMKM dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2022 terdapat 8.360 pelaku UMKM Kota Magelang dari

tiga sektor yakni perdagangan, jasa, dan industri yang tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang. Sektor perdagangan memiliki jumlah pelaku UMKM yang lebih besar, diikuti oleh sektor industri dan sektor jasa. Salah satu bidang yang ada di sektor perdagangan yaitu perdagangan bidang kuliner yang memiliki pelaku terbanyak. Apabila mengunjungi Kota Magelang, maka akan terlihat di setiap sudut kota dipenuhi oleh para pelaku kuliner dan terpusat di alun-alun Kota Magelang yang menjadi lokasi strategis bagi pelaku UMKM kuliner Kota Magelang. Kota Magelang memiliki ciri khas tersendiri pada produk kulinernya misalnya criping, getuk, sop senerek, dan kupat tahu. Selain itu, harga yang ditawarkanpun relatif sangat terjangkau bagi semua kalangan. Di sisi lain, para pelaku UMKM ketiga sektor tersebut sebagian besar telah memiliki sertifikat izin usaha secara legal. Hal demikian menjadi kekuatan (strength) bagi para pelaku UMKM Kota Magelang.

Sementara itu, berbagai kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh para pelaku UMKM Kota Magelang juga turut menjadi hambatan bagi perkembangan usaha, diantaranya kurangnya kemampuan menguasai perkembangan teknologi, masalah permodalan usaha khususnya UMKM skala kecil, produk yang belum memiliki branding yang baik, area atau cakupan pemasaran yang masih sangat terbatas, bahan baku yang kurang tersedia di wilayah Kota Magelang, tidak memiliki sertifikat izin usaha yang layak, dan kemampuan manajemen bisnis yang belum matang. Dari aspek teknologi, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis misalnya untuk melakukan pemasaran ataupun mencari pelatihan secara online. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM belum terbiasa dan masih merasa nyaman dengan cara konvensional. Padahal apabila bisa dimanfaatkan dengan baik, maka teknologi sebetulnya sangat membantu dalam pengembangan usaha. Kemudian dari aspek modal, banyak pelaku UMKM yang merasa sulit mengembangkan usaha dikarenakan modal yang dimiliki masih minim, sedangkan support modal dari investor ataupun pemerintah belum menyentuh semua kalangan dikarenakan kurang dalam mengakses informasi atau ketidaktahuan untuk mencari investor.

Kemudian apabila melihat kondisi eksternal berupa peluang (opportunities) yang ada, seharusnya para pelaku UMKM dapat menangkap atau memanfaatkan peluang tersebut dengan baik untuk mengembangkan usahanya. Adapun beberapa peluang yang berhasil dihimpun diantaranya terdapat kerjasama dengan retail skala nasional, akses terhadap digital market place secara gratis, dan dukungan berbagai program dari Pemerintah Kota Magelang. Salah satu retail terbesar di Indonesia yang tersebar di beberapa titik di Kota Magelang yakni Indomaret. Indomaret di berbagai daerah bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk memasarkan produk UMKM lokal, begitupun yang terjadi di Kota Magelang. Beberapa produk khususnya kuliner Kota Magelang telah ter-display di gerai Indomaret yang ada di Kota Magelang. Tentunya ini membantu para pelaku UMKM

untuk mendapatkan pasar (konsumen) yang lebih luas dan cepat. Selain pemasaran atau pengenalan produk yang ada di Indomaret, pelaku UMKM sebetulnya bisa lebih luas memasarkan produknya melalui digital market place yang dapat diakses secara gratis oleh siapapun, misalnya shopee, tokopedia, bukalapak, facebook market place, dan lain-lain. Penggunaan digital market place tersebut sangat efektif dalam mencakup pasar yang lebih luas tanpa perlu memasarkan produk secara konvensional. Bahkan akan sangat membantu dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Magelang juga membentuk berbagai program untuk membantu pelaku UMKM misalnya berupa program pelatihan, fasilitas perizinan usaha, dukungan pameran usaha, adanya IKM center, dan adanya platform digital market place lokal yang dapat digunakan secara bebas oleh para pelaku UMKM.

Kondisi eksternal lainnya yang mempengaruhi perkembangan UMKM Kota Magelang dapat kita lihat dari aspek ancaman (threats). Ancaman ini akan sangat mempengaruhi pelaku UMKM apabila tidak segera diatasi. Adapun beberapa ancaman yang terdapat diantaranya persaingan antar pelaku usaha lokal dengan produk yang sama, persaingan dengan produk luar Kota Magelang namun terdistribusi di Kota Magelang, persaingan produk yang ada di digital market place, dan masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan kerjasama dengan toko lokal atau retail nasional. Hal yang wajar apabila terjadi persaingan produk baik secara lokal maupun nasional, khususnya yang terjadi di platform digital (market place). Para pelaku UMKM kembali lagi harus menegaskan keunikan produk yang ditawarkan dan memperkuat branding yang dilakukan agar calon konsumen semakin tertarik.

Strategi Pengembangan UMKM Kota Magelang

Berdasarkan identifikasi SWOT yang telah dilakukan, maka rekomendasi strategi untuk mengembangkan UMKM Kota Magelang tertuang dalam tabel 9. Prinsip dasar penciptaan strategi tersebut yaitu memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang (SO), memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (WO), menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman (ST), serta mengelola kelemahan dan meminimalkan ancaman (WT). Maka dari itu, terdapat 16 strategi yang dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu SO tiga strategi, WO tiga strategi, ST tiga strategi, dan WT tiga strategi.

Tabel 3. Matriks SWOT strategi pengembangan UMKM Kota Magelang

STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
1. Jumlah pelaku UMKM yang besar sebanyak 8.360 di tahun 2022	1. Banyak pelaku UMKM yang kurang menguasai teknologi
2. Produk kuliner memiliki ciri khas Kota Magelang	2. Permodalan usaha bagi pelaku UMKM skala kecil
3. Harga produk relatif	3. Kemampuan dalam membranding produk

<p>murah</p> <p>4. Sebagian pelaku UMKM memiliki sertifikat izin usaha</p> <p>5. Memiliki konsumen tetap</p> <p>6. Lokasi usaha yang strategis</p>	<p>belum baik</p> <p>4. Cakupan pemasaran yang belum luas</p> <p>5. Ketersediaan bahan baku yang kurang</p> <p>6. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat izin usaha</p> <p>7. Kemampuan manajemen keuangan yang belum baik</p>
<p>Strategi (S-O)</p> <p>1. Memanfaatkan jumlah anggota UMKM untuk membentuk paguyuban dan bekerjasama dengan retail nasional dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pelatihan dan fasilitas perijinan (S1, O1, O3, O4)</p> <p>2. Menonjolkan ciri khas produk UMKM melalui pameran dan yang disediakan pemerintah (S2, O6)</p> <p>3. Memanfaatkan platform lokal sebagai market place untuk produk khas Kota Magelang (S2, O7)</p> <p>4. Sharing resources antara pelaku UMKM, Pemkot, dan swasta (S1, O1, O3, O4, O5, O6)</p> <p>5. Memanfaatkan legalitas usaha untuk bekerjasama dengan retail nasional (S4, O1)</p> <p>6. Mengarahkan konsumen tetap ke IKM center untuk pembelian produk (S5, O5)</p> <p>7. Memadukan lokasi usaha yang strategis dan memanfaatkan digital market place sebagai wadah promosi (S7, O1, O7)</p>	<p>Strategi (W-O)</p> <p>1. Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk pengembangan usaha dan kapasitas pelaku UMKM (O3, O4, O5, O6, W1, W2, W3, W4, W6, W7)</p> <p>2. Memanfaatkan kerjasama dengan retail dan digital market place guna mengembangkan cakupan pemasaran (O1, O2, O7, W4)</p> <p>3. Memanfaatkan digital market place untuk menemukan bahan baku secara online (O2, W5)</p>
<p>Strategi (S-T)</p> <p>1. Memanfaatkan jaringan pelaku</p>	<p>Strategi (W-T)</p> <p>1. Meningkatkan branding produk</p>

<p>UMKM dan paguyuban untuk saling sharing produk dalam konteks perluasan pemasaran guna menekan persaingan (S1, T1, T3, T4)</p> <p>2. Menonjolkan ciri khas produk dan harga kompetitif untuk menarik konsumen (S2, S3, T1, T3, T4)</p> <p>3. Memanfaatkan legalitas usaha untuk bekerjasama dengan toko lokal dan retail nasional (S4, T2)</p>	<p>untuk meminimalisir persaingan produk (W3, T1, T3, T4)</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan teknologi guna memperluas pemasaran dan meningkatkan penjangkauan konsumen di berbagai wilayah baik offline dan online (W1, W4, T1, T3, T4)</p> <p>3. Memperoleh legalitas agar dapat bekerjasama dengan toko lokal atau retail nasional (W6, T1)</p>
--	--

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Strategi strengths-opportunities (SO): tujuh strategi dibuat dengan menggunakan kekuatan pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang yang sebetulnya telah tersedia. Pelaku UMKM perlu menggunakan resources sebagai contoh sumber daya manusia dengan memanfaatkan jumlah keanggotaan UMKM yang mencapai 8.360 pelaku untuk memperkuat posisi guna menangkap berbagai peluang yang ada seperti program-program yang disediakan pemerintah dan juga swasta. Para pelaku UMKM juga bisa membentuk suatu paguyuban baru atau memperkuat paguyuban yang telah ada. Selain itu agar produk lokal UMKM Kota Magelang semakin dikenal masyarakat luas, maka perlu untuk menonjolkan ciri khas yang mewakili Kota Magelang melalui pameran atau bazar, pemasaran online, dan boot yang tersedia di toko retail. Memiliki lokasi usaha yang strategis merupakan salah satu unsur penunjang bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produk, namun memanfaatkan digital market place juga tidak kalah penting agar produk yang diperdagangkan mendapat pasar yang lebih luas. Selanjutnya legalitas usaha juga dapat digunakan dalam menjalin kerjasama eksternal.

Strategi weakness-opportunities (WO): salah satu kelemahan pelaku UMKM khususnya skala kecil, yakni kurangnya informasi dalam mengembangkan usaha dikarenakan kemampuan dalam mengakses informasi tersebut masih rendah. Di satu sisi pemerintah telah menciptakan berbagai program bagi pelaku UMKM, namun di sisi lain informasi program-program tersebut tidak selalu sampai ke para pelaku UMKM, sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang secara signifikan. Oleh sebab itu langkah awal yang dapat dilakukan pelaku UMKM yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengakses informasi agar dapat memanfaatkan berbagai program dari pemerintah ataupun dari swasta (bila ada). Selain itu, pelaku UMKM juga harus meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi agar mampu memasarkan

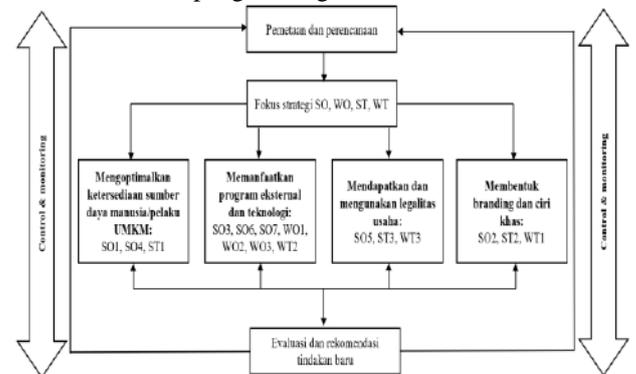
produk secara online atau mencari informasi terkait ketersediaan bahan baku dalam produknya.

Strategi strengths-threats (ST): perkembangan UMKM di Kota Magelang memberikan arah yang positif bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Pembentukan paguyuban ataupun memperkuat paguyuban yang sudah ada merupakan langkah yang dapat ditempuh sebagai wadah koordinasi guna berbagi (sharing) informasi, karena pada dasarnya tidak ada pelaku UMKM yang sukses tanpa bantuan dari orang lain termasuk juga dari para pelaku UMKM lainnya. Mereka ataupun paguyuban memiliki ciri khas tersendiri misalnya produk yang diperdagangkan. Ciri khas tersebut dapat ditonjolkan guna menarik konsumen.

Strategi weakness-threats (WT): persaingan antar pelaku UMKM adalah hal yang lumrah baik secara lokal maupun nasional. Hal yang perlu difikirkan yaitu apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir persaingan tersebut. Maka dari itu, perlu menonjolkan ciri khas misalnya dalam konteks branding produk. Branding pada suatu produk mempunyai fungsi vital agar konsumen yakin terhadap pilihannya. Branding juga berarti menegaskan profil usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Apabila brand sudah terbentuk dengan kuat, maka mulailah untuk memasarkan secara luas baik secara offline maupun online dengan memanfaatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan pada strategi SO, WO, ST, dan WT tersebut, maka implementasi strategi dapat dilakukan dengan mengadopsi *framework* sebagai berikut (Orbawati, Fadlurrahman dan Mukti, 2021):

Gambar 3. Framework implementasi strategi pengembangan UMKM



Sumber: Orbawati, et. al., (2021) dan diolah oleh peneliti (2023)

Framework atau kerangka kerja tersebut diadopsi dari penelitian Orbawati, et. al, (2021) yang masih berkaitan dengan analisis SWOT dan diadopsi untuk kebutuhan penelitian ini. Pola pikirnya sama, yakni dimulai dari proses penciptaan strategi dengan pendekatan SWOT yang masuk ke dalam kategori pemetaan faktor internal dan eksternal. Setelah strategi tersusun, maka dilakukan perencanaan berupa formulasi tindakan atau aksi oleh pelaku UMKM. Tindakan yang dilakukan harus memperhatikan strategi SO, WO, ST,

dan WT. Setelah tindakan atau aksi terbentuk, maka harus diimplementasikan dengan jangka waktu tertentu, apakah jangka pendek ataupun jangka panjang. Implementasi harus diiringi dengan kontrol dan monitoring agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan. Setelah tindakan tersebut mendekati akhir dari perencanaan, maka dilakukan evaluasi guna menilai capaian. Pada tahap ini, akan muncul rekomendasi apa yang perlu dilakukan, apakah mempertahankan strategi yang ada, memodifikasi, atau mengubah keseluruhan strategi. Hal ini tergantung dari penilaian hasil dari evaluasi. Selanjutnya rekomendasi tersebut kembali lagi ke proses perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya (*Ibid*).

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 16 strategi dan *framework* dalam mengimplementasikan strategi yang dapat digunakan bagi berbagai pihak khususnya pelaku UMKM agar mampu bersaing dan mengembangkan dirinya. *Framework* tersebut belum pernah diuji coba, maka dari itu perlu adanya kajian lebih lanjut untuk menilai keberhasilan *framework* implementasi strategi pengembangan UMKM. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal di level kebijakan, yaitu Pemerintah Kota Magelang harus dapat membuat program bagi pelaku UMKM seperti pelatihan *e-marketing*, program penguatan *branding* usaha, membuka akses kerjasama antara pelaku UMKM dan *stakeholders*, sistem legalitas usaha yang mudah, serta move legalitas usaha secara berkala. Sedangkan pada level komunitas, kelompok UMKM harus menjalin kerjasama dengan akademisi untuk mengembangkan usahanya seperti kegiatan advokasi, pembelajaran, dan pendampingan.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal

- Alfrian, G. R., & Pitaloka, E. (2020, November). Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 6(2), 139-146.
- Aslan, I., Cinar, O., & Ozen, U. (2014). Developing Strategies for the Future of Healthcare in Turkey by Benchmarking and SWOT Analysis. *Procedia*, 150, 230-240.
- David, F. R. (2004). *Manajemen Strategis Konsep-Konsep*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Fatimah, T. (2011). Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi globalisasi. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 9(1), 49-61.
- Hughes, O. E. (1998). *Public Management and Administration* (Second Edition). Great Britain: Macmillan Press LTD.

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran, Edisi 13* (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, H. (2005). *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nayla, A. P. (2014). *Komplet Akuntansi Untuk UKM dan Waralaba*. Laksana: Yogyakarta.
- Orbawati, E. B., Fadlurrahman, Mukti, A. (2021). *Strategi Peningkatan Kesiapan Masyarakat Dalam Mewujudkan Global Village Sektor Pariwisata*. Laporan Penelitian. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar.
- Rahmana, A. (2009). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*: 2-5.
- Rangkuti, F. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sanjaya, A. P. (2020). *Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Pemasaran Untuk Peningkatan Penjualan Mesin Diesel*. Skripsi: Universitas Sanata Dharma
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Strategik (Cetakan kedelapan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Srivastava, P. K., Kulshrestha, K., Mohanty, C. S., Pushpangadan, P., & Singh, A. (2005). Stakeholder-Based SWOT Analysis for Successful Municipal Solid Waste Management in Lucknow, India. *Waste Management*, 25, 531-537.
- Sujatmiko, Orbawati, E. B., Fadlurrahman, & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(1), 1-8.
- Tambunan, T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. LP3ES: Jakarta.
- Umairi, A., Kencana, N., & Amaliatulwalidain. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan UMKM Kota Palembang di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(3), 121-126.
- Yuan, H. (2013). A SWOT Analysis of Successful Construction Waste Management. *Journal of Cleaner Production*, 39,1-8.

Internet

- Prokompim. (2021). Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang di Tengah Pandemi. Diakses dari humas.magelangkota.go.id/, pada tanggal 1 September 2023.

Ginting, N. S. (2023). Tak Tergoyahkan Pandemi, UMKM di Kota Magelang Mampu Serap Sebanyak 12.122 Tenaga Kerja. Diakses dari jogja.tribunnews.com, pada tanggal 1 September 2023.

Keterlibatan Selebriti Pasca *Parliamentary Threshold* dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia

Muslimin Ritonga¹, Raegen Harahap²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Jenderal Sudirman, KM, 3.5, Kemuning, Kota Palembang

Email Koresponden: musliminritonga@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze celebrity involvement after the change in the Parliamentary Threshold of 4 percent which was first set in 2012 and implemented in the 2014 elections. Therefore, the implementation of the Parliamentary Threshold regulation actually brought controversy and criticism from various parties up to judicial review. One of the aspects that is considered controversial about the parliamentary threshold is that there are indications that it makes it difficult for political parties to contest in general elections, so that political parties are starting to recruit as many celebrities as possible, especially those placed in legislative elections. This research uses a qualitative-descriptive research approach with the library research method. Researchers collected research from 2011-2023 via Google Scholars related to celebrities or artists who participated in political contestations, especially in legislative general election contestations. From the data collection process, this research found two urgencies that had not been examined by previous research, (1) there was a change in the Parliamentary Threshold rules, resulting in political parties becoming more aggressive in involving celebrities in the Legislative Election contestation who were used as vote-getters to help vote other political candidates. Second, political parties, in involving celebrities as legislative candidates, use the Son of the Soil strategy, namely being placed according to their respective regions, both in terms of place of birth and descent from the electoral district.

Keywords: *Celebrities, Legislative Elections, Parliamentary Threshold*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keterlibatan selebriti setelah adanya perubahan Parliamentary Threshold (ambang batas) sebesar 4 persen yang ditetapkan pertama kali pada tahun 2012 dan diberlakukan pada Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, adanya pemberlakuan aturan Parliamentary Threshold sejatinya mendatangkan kontroversi-kontroversi dan kritikan-kritikan berbagai pihak sampai kepada *judicial review*. Salah satunya aspek yang dianggap kontroversi dari parliamentary Threshold tersebut adalah adanya indikasi terhadap mempersulit partai politik untuk berkontestasi pada pemilihan umum, sehingga partai politik mulai merekrut selebriti sebanyak mungkin, terutama ditempatkan pada pemilihan legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif dengan metode *library research* (kepustakaan). Peneliti mengumpulkan riset-riset dari tahun 2011-2023 melalui *Google Scholars* yang berkaitan dengan selebriti ataupun artis yang masuk dalam kontestasi politik, khususnya dalam kontestasi pemilihan umum legislatif. Dari proses pengumpulan data tersebut, penelitian ini mendapatkan dua urgensi yang belum diteliti oleh riset-riset sebelumnya, (1) adanya perubahan aturan Parliamentary Threshold, mengakibatkan partai politik semakin gencar untuk melibatkan selebriti dalam kontestasi Pemilu Legislatif yang digunakan sebagai vote-getter untuk membantu suara kandidat politisi lainnya. Kedua, partai politik dalam melibatkan selebriti sebagai kandidat calon legislatifnya, menggunakan strategi Son of the Soil yaitu ditempatkan sesuai dengan daerah masing-masing baik dari segi tempat lahir maupun keturunan dari daerah pemilihan.

Kata Kunci: Selebriti, Pemilihan Legislatif, Parliamentary Threshold

1. Pendahuluan

Demokratisasi pada tahun 1998, sering dikatakan sebagai babak baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Beberapa ciri khas yang dapat diidentifikasi seperti munculnya partai politik baru (Ufen, 2009), menurunnya peran tentara dalam urusan sosial-politik dan ekonomi (Croissant dkk., 2013), kebebasan pers (Kakiailatu, 2007), desentralisasi (Ostwald et al., 2016), langsung pemilu presiden dan lokal (Baswedan, 2007), peningkatan kekuasaan legislatif (Sherlock, 2010), dan khususnya meningkat kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi politik dan pemerintahan (Mujani & Liddle, 2015; Mujani dkk., 2018).

Dalam konteks kesempatan masyarakat berkontestasi politik di Indonesia, salah satunya ditandai dengan keterlibatan selebritas maupun artis dalam kontestasi politik elektoral, yang menghadirkan sebuah fenomena baru, namun juga tidak dapat dilepaskan dari pro dan kontra Masyarakat. Kendati demikian, fenomena itu harus tetap diterima sebagai dinamika politik yang dinamis, dan disikapi dengan bijak, karena sebagai warga negara memiliki kesempatan dan hak dengan orang lain dalam konteks demokrasi di Indonesia, untuk dipilih dan untuk memilih, sehingga keterlibatan selebriti dalam panggung politik bukanlah sebuah kesalahan, disaat yang sama, mereka juga memiliki popularitas di masyarakat sebagai modalitas untuk berkontestasi (Yulanda, Fitriasia, & Ofianto, 2023). Maka dari itu, partai politik tertarik merekrut selebriti untuk dijadikan calon legislatif (Darmawan, 2015; Lubis, 2015; Nabilah dkk, 2022).

Transformasi selebriti masuk dalam panggung politik di Indonesia (Ni'mah, 2015), semakin menarik dianalisis, bukan hanya dianggap sebagai *vote-getter*, melainkan juga adanya simbiosis-mutualisme dengan partai politik (Cenderamata & Darmayanti, 2019). Hal ini kemudian ditunjukkan dengan banyaknya kajian tentang keterlibatan selebriti dalam panggung politik dengan fokus yang berbeda-beda. Mereka dianggap hanya sebatas etalase dan panjangan partai politik (Jati, 2014), mereka juga sering dianggap hanya *endorsement* partai politik (Martana & Andriana, 2018; Rifai, 2016), dan bahkan mereka dianggap hanya sebatas komoditas partai politik (Mustika & Arifianto, 2018; Choiriyati & Wiendijarti, 2020) dan kosmetika partai politik (Putri, 2017) dalam rangka untuk memoles citra baik dalam meningkatkan elektabilitas sebuah partai politik (Subandi & Ubaid, 2020). Dari banyaknya anggapan selebriti tersebut, tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan politik Indonesia yang terjadi pasca Orde Baru, yang disebabkan tiga hal penting. Pertama, sistem pemilihan umum, yang terbuka

(Sugiarto, & Yuwanto, 2020), dimana para peserta Pemilu dimasa Orde Baru, sangat tergantung pada partai Politik, dan masyarakat belum memilih secara langsung dan secara terbuka. Kedua, perilaku pemilih yang mengalami perubahan. Dalam hal ini, dimasa Orde Baru, preferensi pemilih sangat bergantung pada dasar ideologi sebuah partai, namun mengalami degradasi perubahan kepada preferensi figure, yang terjadi pada Pemilu 2004 (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2018). Ketiga, partai politik Indonesia mengalami perubahan fragmentisme yang semakin tinggi (Aldianto & Noak, 2016), yang tidak lagi mementingkan fungsi partai (Darmawan, 2015; Nabilah dkk, 2022), sehingga selebriti dijadikan dan digunakan sebagai *vote-getter*. Namun, kajian dan riset tentang keterlibatan selebriti dengan perubahan Parliamentary Threshold (PT), sejauh yang penulis ketahui, masih belum diteliti. Meskipun terdapat penelitian dari Khamimiya dkk, (2023) dan Subandi & Ubaid (2020), yang mengkaitkan keterlibatan selebriti dengan PT. Namun, belum membahas secara komprehensif tentang kaitan antara calon legislatif selebriti dengan PT. Dengan kata lain, studi tersebut tidak menjelaskan lebih terperinci tentang bagaimana aturan ambang batas tersebut berimplikasi terhadap strategi yang dilakukan partai politik terhadap calon legislatif dari kalangan selebriti. Selain itu, studi ini juga akan menganalisis tentang pola strategi yang dilakukan partai politik dalam membagi para selebiri di daerah pemilihan (Dapil).

Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, peneliti telah membagi analisis menjadi dua bagian kunci. Pertama, penelitian memfokuskan pada konteks perubahan politik elektoral di Indonesia pasca perubahan aturan Parliamentary Threshold. Perubahan ini telah menciptakan konteks yang berubah secara signifikan terhadap keterlibatan selebriti dalam arena politik. Selain sekadar sebagai pemain yang berperan dalam mendapatkan suara (*vote-getter*), perubahan ini juga telah menjadikan selebriti sebagai alat strategis bagi partai politik untuk mendapatkan dukungan lebih banyak lagi, baik dari pemilih maupun kandidat lainnya. Dengan kata lain, konteks perubahan aturan parliamentary threshold adalah faktor utama yang mendorong penelitian ini. Ini termasuk analisis mendalam tentang bagaimana perubahan ini memengaruhi taktik dan strategi partai politik dalam memasukkan selebriti dalam kontestasi politik. Perubahan ambang batas parlemen telah membuka pintu bagi partai politik untuk mencalonkan selebriti dengan lebih bebas, karena selebriti dapat memberikan suara yang signifikan bagi partai politik tanpa harus meraih ambang batas tersebut secara mandiri. Kedua, penelitian membahas strategi yang dilakukan partai politik dengan keterlibatan

selebriti dalam kontestasi politik pasca perubahan aturan parliamentary threshold. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana partai politik membuat strategi terhadap calon legislatif dari selebriti dalam mencapai tujuan politik mereka.

Dengan menggabungkan kedua bagian ini dalam analisisnya, penelitian berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana perubahan aturan parliamentary threshold telah mempengaruhi keterlibatan selebriti dalam politik Indonesia, baik sebagai alat strategis bagi partai politik maupun dalam konteks perwakilan politik yang lebih luas. Ini memungkinkan untuk menggambarkan bagaimana perubahan dalam peraturan politik dapat membentuk dinamika politik di Indonesia dan peran yang semakin penting yang dimainkan oleh selebriti dalam proses tersebut.

a. Metode Penelitian

Dengan mengadopsi metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengandalkan konsep pengumpulan data melalui metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan beragam sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan artikel ilmiah lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian (Zed, 2004: 34). Dalam konteks ini, peneliti telah menelusuri dan menganalisis secara intensif sebanyak 20 artikel yang tersedia di Google Scholar, yang merupakan hasil riset-riset yang diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2011 hingga 2023. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel-artikel ini adalah "selebriti dalam kontestasi politik di Indonesia." Pemilihan jumlah artikel ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang diambil mewakili berbagai sudut pandang dan perkembangan terkini dalam peran selebriti dalam konteks politik Indonesia. Dengan memanfaatkan metode ini, penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis dengan mendalam peran serta dampak selebriti dalam dinamika politik Indonesia, memahami pandangan yang telah dinyatakan dalam literatur terkait, dan mengidentifikasi tren serta temuan utama yang muncul dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Selanjutnya, peneliti melakukan tahap pengklasifikasian terhadap seluruh literatur yang berhasil dikumpulkan dalam rangka menemukan potensi kekosongan riset yang belum dieksplorasi oleh para peneliti sebelumnya. Dalam proses ini, peneliti berupaya secara sistematis menyusun dan memilah artikel-artikel tersebut berdasarkan aspek-aspek kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti peran selebriti dalam politik, dampaknya, dan perkembangan terbaru dalam konteks politik Indonesia. Tujuannya adalah untuk

mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat menjadi fokus penelitian yang lebih mendalam. Langkah terakhir, peneliti mengembangkan tema-tema utama yang muncul dari seluruh dataset literatur yang telah terkumpul. Tema-tema ini menjadi dasar untuk analisis mendalam yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Proses pengembangan tema ini melibatkan identifikasi pola-pola, hubungan, dan temuan yang signifikan dalam literatur yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang lebih baik dan menghasilkan temuan yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran serta selebriti dalam kontestasi politik di Indonesia.

2. Pembahasan

a. Perubahan PT terhadap Kontestasi Partai Politik terhadap Perekrutan Selebriti

Harus diakui bahwa penetapan PT, yang secara resmi diterapkan sejak tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, merupakan suatu peraturan yang menentukan ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat mengirimkan kandidat terpilih mereka ke parlemen pusat. Konsep ini diberikan status hukum yang lebih kuat dengan diberlakukannya Pasal 208 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021. Aturan ambang batas ini merujuk pada persentase minimum suara yang harus diperoleh oleh sebuah partai politik dalam pemilihan umum untuk dapat mengamankan kursi di parlemen. Dengan kata lain, partai politik harus meraih persentase suara tertentu dari total suara yang diberikan oleh pemilih agar dapat memasukkan anggotanya ke dalam parlemen. Hal ini didesain untuk memastikan bahwa hanya partai-partai politik yang memiliki dukungan signifikan dari pemilih yang dapat mewakili rakyat di lembaga legislatif.

Seiring dengan berlalunya waktu, ambang batas hanya 2.5% yang berlaku pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, dan pada pemilu 2014 meningkat sebesar 3.5%. Ambang batas ini telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik serta komposisi parlemen. Sementara penetapan PT telah memberikan kestabilan dan kejelasan dalam proses pemilihan umum, perubahan dalam ambang batas ini juga telah menciptakan tantangan dan peluang bagi partai politik, termasuk strategi perekrutan kandidat selebriti untuk memastikan pemenuhan ambang batas tersebut

Tujuan utama dari pemberlakuan aturan ambang batas ini adalah untuk mendorong partai

politik agar lebih serius dan berkomitmen dalam upaya mereka untuk memenangkan dukungan publik dan menjaga legitimasi yang diberikan oleh rakyat sebagai konstituen mereka. Ambang batas ini sebenarnya bertujuan untuk mengukur tingkat popularitas dan dukungan yang diterima oleh partai politik, serta mendorong partai untuk merumuskan program yang lebih menarik bagi pemilih. Dengan kata lain, aturan ambang batas mengharuskan partai politik untuk lebih fokus pada perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas calon legislatif mereka agar dapat bersaing dalam arena politik yang kompetitif. Meskipun tujuannya nampak jelas dalam mempromosikan kompetisi politik yang sehat dan memastikan partai-partai yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi masyarakat, pemberlakuan aturan ambang batas ini tidak berjalan tanpa kontroversi. Beberapa pihak menganggap aturan ini sebagai campur tangan pemerintah dalam proses penyederhanaan partai politik dalam sistem multipartai. Mereka berpendapat bahwa ambang batas yang tinggi dapat membatasi pluralisme politik dan merugikan partai politik kecil atau baru yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau dukungan yang sama dengan partai yang lebih besar. Selain itu, ada juga pandangan bahwa aturan ambang batas dapat menghambat proses demokratisasi dan mencegah kandidat-kandidat berkualitas yang berasal dari partai-partai kecil untuk memiliki akses ke parlemen. Hal ini bisa mengurangi keragaman pandangan dalam perwakilan politik dan membatasi alternatif-alternatif yang tersedia bagi pemilih. Oleh karena itu, perdebatan tentang efek positif dan negatif dari aturan ambang batas tetap menjadi bagian dari diskusi politik di Indonesia.

Keterlibatan selebriti dalam dunia partai politik telah menjadi semakin mencolok, terutama setelah penerapan aturan ambang batas yang lebih ketat, mencapai 4 persen. Hal ini tidak hanya menjadi cara untuk mengatasi ambang batas PT, tetapi juga merupakan strategi yang sangat diandalkan untuk mendapatkan suara bagi partai politik. Keputusan untuk mencalonkan sejumlah artis terkemuka dalam pemilihan tampaknya menjadi satu-satunya jalan bagi partai-partai tersebut untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Motivasi di balik strategi ini mencakup beberapa faktor penting. Oleh karena itu, strategi melibatkan selebriti dalam politik memberikan partai-partai politik kesempatan untuk memanfaatkan popularitas, pengaruh, dan visibilitas mereka, serta mengakses suara tambahan dari penggemar setia. Hal ini menjadi strategi yang penting terutama ketika partai politik berjuang untuk mencapai ambang batas yang diperlukan untuk tetap relevan dalam pesta politik.

Bukti empiris yang sangat meyakinkan menunjukkan bahwa partai-partai politik yang

memasukkan selebriti sebagai salah satu kandidat calon legislatif mereka dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan 2019 berhasil melewati ambang batas Partai Terbuka (PT) yang ditetapkan sebesar 4 persen. Pencapaian ini menggarisbawahi dampak positif yang dihasilkan dari strategi menghadirkan selebriti dalam arena politik. Untuk lebih mengilustrasikan pencapaian ini, dapat dilihat pada tabel berikut yang mencantumkan partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum 2014 dan 2019. Secara keseluruhan, partai-partai ini secara konsisten memasukkan selebriti sebagai salah satu calon legislatif mereka. Tabel ini mencerminkan sejauh mana popularitas dan daya tarik selebriti ini memberikan kontribusi penting dalam membantu partai-partai tersebut melewati ambang batas PT.

Tabel 2: Daftar Partai Politik Lolos PT

No	Partai Pengusung Artis	Pemilu	
		2014	2019
1	PDI-P	✓	✓
2	Golkar	✓	✓
3	Gerindra	✓	✓
4	PAN	✓	✓
5	PKB	✓	✓
6	NasDem	✓	✓
7	Demokrat	✓	✓
8	PKS	✓	✓
9	PPP	✓	✓
10	Hanura	✓	X
11	PBB	X	X
12	Garuda	X	X
13	PSI	X	X
14	Berkarya	X	X
15	Perindo	X	X
16	PKPI	X	X

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

Dari tabel di atas, terlihat adanya peran selebriti dalam membantu partai politik untuk mengamankan kursi di parlemen dan tetap relevan dalam sistem politik. Keberhasilan ini menegaskan bahwa popularitas dan pengaruh selebriti dapat menjadi aset berharga dalam dunia politik, terutama ketika digunakan dengan efektif dalam strategi kampanye. Dengan adanya perubahan dalam aturan PT, peran popularitas selebriti yang bersinar menjadi aset yang lebih berharga bagi partai politik. Mereka seringkali mengalami proses rekrutmen yang lebih lancar meskipun sebelumnya tidak memiliki pengalaman atau pemahaman yang mendalam tentang dunia politik. Dalam konteks ini, popularitas menjadi faktor utama yang membedakan mereka dari kandidat lainnya. Oleh karena itu, selebriti yang memasuki dunia politik melalui jalur ini memiliki peluang besar untuk terpilih, terutama karena mereka sudah membangun

modal popularitas yang kuat di dunia hiburan atau bidang lainnya. Disaat yang bersamaan, popularitas ini memberikan mereka daya tarik yang signifikan di antara pemilih, yang mungkin lebih cenderung memberikan suaranya kepada seseorang yang sudah dikenal secara luas.

b. Strategi Partai Politik dengan menggunakan artis sebagai Vote-Getter untuk Melewati Ambang Batas 4 Persen

Secara umum partai-partai politik yang memiliki kandidat calon legislatif pada pemilu tahun 2014 dan 2019 memiliki strategi politik masing-masing untuk meraup suara pemilih sebanyak-banyaknya (Subekti & Al-Hamdi, 2023). Sejak diterapkannya sistem pemilu terbuka dari tahun 2004, terbukti jumlah selebriti masuk dalam panggung politik semakin meningkat. Dari Pemilu tahun 2004, hanya berjumlah 38, pada Pemilu tahun 2009 berjumlah sebanyak 61 orang, pada Pemilu tahun 2014 berjumlah sebanyak 77 orang dan pada pemilu tahun 2019, sedikit berkurang menjadi 55 orang. Kendati demikian, ada banyak juga dari selebriti yang tidak lolos dan terpilih menjadi anggota DPRRI. Pada tahun 2004, jumlah selebriti hanya memperoleh 4.94%, pada Pemilu tahun 2009, jumlah selebriti hanya 13%, pada pemilu 2014, naik menjadi 29% dan pada pemilu 2019 sedikit turun menjadi 25%.

Tabel 3: jumlah Selebriti Terpilih Menjadi DPRRI

Tahun Pemilu	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai dengan mengukung Artis	Jumlah partai Lolos PT	Jumlah artis	Persentase
2004	48	13	38	38	18%
2009	38	11	12	61	31%
2014	12	10	16	77	29%
2019	16	8	9	55	25%

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dan 2019, keterlibatan selebriti dalam kontestasi politik elektoral semakin meningkat jumlahnya. Ada hal yang menarik dari uraian di atas, bahwa terbukti dari perolehan suara secara nasional, partai politik yang memiliki calon legislatif dari selebriti cenderung memiliki suara di atas 10 persen. Oleh karena itu, keterlibatan selebriti pada kontestasi politik, menjadi salah satu strategi partai politik, untuk mendulang suara para pemilih. Modalitas selebriti dari popularitas menjadi poin utama yang dilihat partai politik, sehingga, eksistensi mereka hanya sebagai bumper suara dari kandidat lain yang memiliki kapabilitas dan kapasitas pengalaman di bidang politik (Widodo, Kurniawan & Maryanah, 2023). Strategi ini cukup baik diterapkan oleh partai politik, sehingga dapat membantu melewati aturan PT. Kenaikan PT menjadi 3.5% merupakan

tantangan berat bagi partai politik pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Kebijakan aturan PT dengan ambang batas sebesar 2.5% telah menjadi sebuah tantangan yang signifikan bagi partai politik dalam mengelola dan merancang strategi mereka. Tantangan semakin meningkatkan, ketika ambang batas ini ditingkatkan menjadi 3.5%. Angka ini masih dianggap sebagai tingkat yang moderat, terutama bagi partai politik yang beroperasi dalam kategori kelas menengah. Dalam konteks ini, penting untuk mencari keseimbangan antara menetapkan ambang batas yang memastikan stabilitas dan efisiensi dalam sistem politik dan juga mempertahankan ruang bagi partai politik agar dapat berperan secara konstruktif dalam pembentukan kebijakan dan perwakilan rakyat. Keputusan untuk menaikkan ambang batas PT harus mempertimbangkan dampak potensialnya terhadap pluralisme politik dan keberagaman pendapat dalam masyarakat, seiring dengan upaya untuk meminimalkan potensi eliminasi eksistensi partai-partai tersebut.

Dalam konteks kandidat selebriti, partai-partai politik semakin mengandalkan strategi yang dikenal sebagai "Son of the Soil" atau "Anak Daerah". Strategi ini telah terbukti sangat efektif dan menjadi pilihan yang paling sesuai ketika berurusan dengan kandidat selebriti. Para selebriti, yang sudah memiliki modalitas popularitas, dianggap lebih dari sekadar calon terpilih; mereka juga dianggap sebagai alat untuk mendukung jumlah suara yang lebih besar bagi calon legislatif dari latar belakang lain. Dalam konteks ini, para kandidat selebriti ditempatkan secara langsung di daerah asal dan kelahiran mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan modalitas popularitas mereka dengan lebih efektif. Mereka didorong untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, menyampaikan program-program yang relevan, dan mengimplementasikan tindakan nyata sebagai titik fokus dari strategi kampanye mereka. Pendekatan ini diyakini sangat efektif karena daerah asal dan kelahiran para kandidat selebriti dianggap memiliki hubungan kedekatan yang kuat dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemilih cenderung lebih terbuka terhadap pesan dan tindakan dari para kandidat ini.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, partai politik dan kandidat selebriti harus bekerja sama untuk memanfaatkan popularitas dan akar lokal mereka, menjalankan kampanye yang dekat dengan masyarakat, dan memastikan bahwa pemilih merasa terhubung secara pribadi dengan calon-calon mereka. Strategi "Son of the Soil" telah membantu mengubah lanskap politik dengan memberikan kesempatan bagi kandidat selebriti untuk bersaing secara signifikan dalam arena politik Indonesia yang dinamis. Dalam konteks

kandidat calon legislatif dari selebriti, dalam memilih segmentasi pemilih pun, partai-partai politik tidak lagi menjadikan ideologinya sebagai fokus utama strateginya (Febriyanti & Siahaan, 2022). Dengan membuat strategi Son of the Soil tersebut, sejatinya partai politik menyadari melakukan pemetaan segmentasi pemilih. Dengan kata lain, segmentasi pemilih dengan strategi lainnya sudah diterapkan dan ditetapkan kepada kandidat calon lainnya, yang rata-rata memiliki perbedaan strategi khususnya wilayah perkotaan, sudah banyak yang beralih ke partai lain.

Terbukti, beberapa kandidat calon legislatifnya yang ditempatkan dengan daerah asal masing-masing mayoritasnya berhasil terpilih menjadi DPR-RI pada Pemilu tahun 2014-2019 dan Pemilu tahun 2019-2024. Misalnya, dari selebriti Okky Asokawati, Lucky Hakim, Anang Hermansyah, Desi Ratnasari, Primus Yustisio, Eko Hendro Purnomo, Dede Yusuf Macan, Venna Melinda, Krisna Mukti, Rachel Maryam Sayidina, Moreno Suprpto, Jamal Mirdad, Rieke Diah Pitaloka, Junico BP. Siahaan. Partai politik berhasil menggarap suara pemilih di Dapil masing-masing sesuai dengan ikatan daerah asal masing-masing.

Tabel 4: Selebriti Lolos menjadi DPR-RI Tahun 2014-2019

No	Nama artis	ParPol	Dapil	Daerah Asal
1	Okky Asokawati	PPP	DKI Jakarta II	DKI Jakarta
2	Lucky Hakim	PAN	Jawa Barat VI	Indramayu
3	Anang Hermansyah	PAN	Jawa Timur IV	Jember
4	Desi Ratnasari	PAN	Jawa Barat IV	Sukabumi
5	Primus Yustisio	PAN	Jawa Barat V	Bogor
6	Eko Hendro Purnomo	PAN	Jawa Timur VIII	Nganjuk
7	Dede Yusuf Macan	Demokrat	Jawa Barat II	Jakarta
8	Venna Melinda	Demokrat	Jawa Timur VI	Surabaya
9	Krisna Mukti	PKB	Jawa Barat II	Jakarta
10	Rachel Maryam Sayidina	Gerindra	Jawa Barat V	Bandung

11	Moreno Suprpto	Gerindra	Jawa Timur V	Jakarta
12	Jamal Mirdad	Gerindra	Jawa Tengah I	Kabupaten Kudus
13	Rieke Diah Pitaloka	PDI-P	Jawa Barat VII	Garut kota
14	Junico BP. Siahaan	PDI-P	Jawa Barat I	Bandung
15	Tantowi Yahya	Golkar	DKI Jakarta III	Indralaya

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

Tabel 5: Selebriti Lolos Menjadi DPR-RI Tahun 2019-2024

No	Nama artis	ParPol	Dapil	Daerah Asal
1	Eko Hendro Purnomo	PAN	DKI Jakarta I	Nganjuk
2	Desy Ratnasari	PAN	Jawa Barat IV	Sukabumi
3	Dede Yusuf Macan Effendi	Demokrat	Jawa Barat II	Jakarta
4	Tommy Kurniawan	PKB	Jawa Barat V	Jakarta
5	Primus Yustisio	PAN	Jawa Barat V	Bogor
6	Rieke Diah Pitaloka	PDI-P	Jawa Barat VII	Garut kota
7	Arzeti Bilbina	PKB	Jawa Timur I	Lampung
8	Krisdayanti	PDI-P	Jawa Timur V	Kota Batu
9	Rano Karno	PDI-P	Banten III	Jakarta
10	Nurul Arifin	Golkar	Jawa Barat I	Bandung
11	Farhan	NasDem	Jawa Barat I	Bogor
12	Rachel Maryam Sayidina	Gerindra	Jawa Barat II	Bandung
13	Nico Siahaan	PDI-P	Jawa Barat I	Bandung
14	Mulan Jameela	Gerindra	Jawa Barat XI	Garut

Sumber: Disusun oleh Peneliti, 2023

3. Kesimpulan

Keterlibatan selebriti dalam panggung kontestasi politik elektoral di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Perubahan ini sangat mencolok, terutama dalam konteks bagaimana selebriti digunakan sebagai alat untuk mencapai PT, yang telah menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh partai politik. Awalnya, peran selebriti dalam pemilu lebih sering terbatas pada menjadi *celebrity endorser*, di mana mereka

digunakan oleh partai politik sebagai figur publik yang populer untuk mendapatkan dukungan dari penggemar mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya persyaratan PT yang mencapai 4 persen, partai-partai politik menghadapi tantangan yang lebih besar untuk memenuhi ambang batas ini. Kini, selebriti semakin sering diposisikan sebagai calon legislatif, dengan harapan dengan modalitas dari popularitas dan ketenaran dapat memberikan suara tambahan bagi partai politik pengusung, sehingga mereka dapat mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh PT. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan selebriti dalam pemilu juga memiliki pro dan kontra. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini bisa merendahkan kualitas perwakilan politik, karena selebriti mungkin kurang berpengalaman dalam urusan politik. Selain itu, pemilihan selebriti sebagai calon legislatif juga dapat menciptakan kesan bahwa politik lebih fokus pada citra dan popularitas daripada pada kompetensi dan program kerja. Oleh karena itu, keterlibatan selebriti dalam pemilu di Indonesia mencerminkan upaya partai politik hanya untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh aturan PT yang ketat, sambil memanfaatkan daya tarik dan pengaruh selebriti untuk mendapatkan dukungan pemilih tambahan.

Daftar Pustaka

- Aldianto, A. P., & Noak, P. A. (2016). Popularity Melalui Track Record di Panggung Politik. *Jurnal Wacana Politik*, 1-9.
- Baswedan, A. R. (2007). Indonesian Politics in 2007: the Presidency, Local Elections and the Future of Democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(2), 323–340. <https://doi.org/10.1080/00074910701727597>
- Cenderamata, R. C., & Darmayanti, N. (2019). Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring. *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 3(1), 1-8.
- Choiriyati, W., & Wiendijarti, I. (2020). Popularitas Selebriti sebagai Komoditas Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 128-142.
- Croissant, A., Kuehn, D., Lorenz, P., & Chambers, P. W. (2013). *Democratization and Civilian Control in Asia*. New York: Palgrave MacMillan
- Darmawan, I. (2015). Keterlibatan selebriti dalam pemilu Indonesia pasca Orde Baru. *Sosiohumaniora*, 17(3), 230-236.
- Febriyanti, Y., & Siahaan, C. (2022). Fenomena Selebriti Menjadi Politikus Serta Strategi Komunikasi Selebriti Dalam Berkampanye. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(01), 9-15.
- Jati, W. R. (2014). Politik Selebritas Elaborasi Teoritik Terhadap Model Kampanye Baru. *Jurnal Kawistara*, 4(2).
- Kakiailatu, T. (2007). Media in Indonesia: Forum for political change and critical assessment. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 60–71. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2007.00330.x>
- Lubis, S. (2015). Artis Dan Kegiatan Politik: Studi Keterlibatan Artis Pada Pemilu Legislatif 2014. *Ilmu dan Budaya*, 39(44), 5209-5226.
- Martana, I. K., & Andriana, D. (2018). Endorser Selebriti Pada Iklan Politik Sebagai Upaya Vote Getter Pada Pemilih Muda. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, 5(1), 25-39.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2015). Indonesia's Democratic Performance: A Popular Assessment. *Japanese Journal of Political Science*, 16(2), 210–226. <https://doi.org/10.1017/S1468109915000067>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats. New York: Cambridge University Press.
- Mustika, R., & Arifianto, S. (2018). Komodifikasi “Popularitas Selebritis” untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 139-150.
- Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(2), 81-92.
- Ni'mah, M. (2015). Transformasi Selebriti Menjadi Politisi: Urgensi Personal Front Dalam Ranah Sosial. *Informasi*, 45(2), 141-154.
- Putri, D. T. E. (2017). Popularitas Selebriti sebagai Alat Kosmetika Politik. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 103-115.
- Putri, I. E. E., Midiana, A., El Fani, S., Subagyo, R. A., Awaludin, M. A. M., & Fauzi, A. M. (2019). Persepsi Mahasiswa yang Kuliah di Surabaya Tentang Keterlibatan Artis Dalam Pilihan Legislatif 2019 Daerah Pilihan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 22-33.
- Rifai, M. (2016). POLITIK SELEBRITAS DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 dan 2009. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(2), 1-1.

- Sherlock, S. (2010). The Parliament in Indonesia's Decade of Democracy: People's Forum of Chamber of Cronies. In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problem of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions, and Society* (pp. 160–178). Singapore: ISEAS– Yusof Ishak Institute.
- Subandi, H. H., & Ubaid, A. H. (2020). Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 21-45.
- Subekti, D., & Al-Hamdi, R. (2023). Political Motives of Islamic Parties in Nominating Celebrities as Legislative Candidates for the 2024 Elections. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(3), 160-170.
- Subekti, D., & Wahid, M. (2023). The Political Parties Coalition Behaviour in Election: A Meta-Analysis. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(3), 183-192.
- Sugiarto, M. D., & Yuwanto, Y. (2020). Celebrities in the Recruitment of Candidates for Legislative Members of the Indonesian Parliament in the Legislative Elections. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 117-136.
- Tito, F. A. (2023). Commodification of Celebrities in the 2024 General Election Contestation. *MEDIASI Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 4(2), 119-129.
- Twald, K., Tajima, Y., & Samphantharak, K. (2016). Indonesia's Decentralization Experiment: Motivations, Successes, and Unintended Consequences. *Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE)*, 33(2), 139–156. <https://doi.org/10.1355/ae33-2b>
- Ufen, A. (2009). Political Parties and Democratization in Indonesia. In M. Bünte & A. Ufen (Eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (pp. 153–175). New York: Routledge
- Widodo, A., Kurniawan, R. C., & Maryanah, T. (2023). Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(1).
- Yulanda, A., Fitriana, A., & Ofianto, O. (2023). Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 141-154.

JURNAL

PEMERINTAHAN DAN
POLITIK

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang

Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-

357754

